Evaluasi Ekonomi
2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo

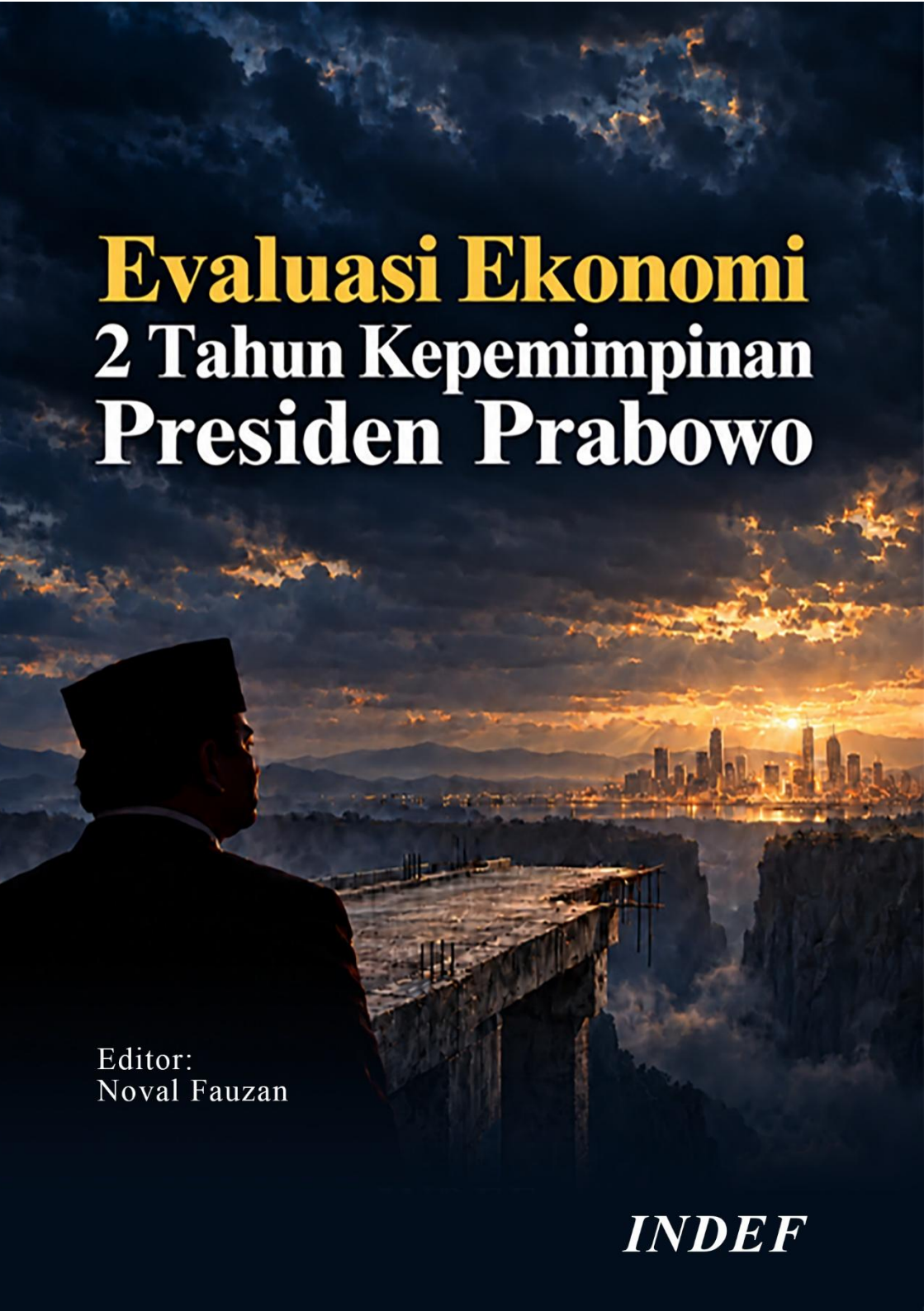

Editor:
Noval Fauzan

INDEF

EVALUASI EKONOMI
2 TAHUN KEPEMIMPINAN PRESIDEN PRABOWO

Penulis
M. Rizal Taufikurahman
Eko Listiyanto
Abdul Manap Pulungan
Riza Annisa Pujarama
Sia Nawir
Salsabila Azkia Farhani
Noval Fauzan
Zulianissa Diah Kusmawati
Pramudya Putra Bintang

Editor:
Noval Fauzan

Center of Macroeconomics and Finance
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo

Penulis
M. Rizal Taufikurahman
Eko Listiyanto
Abdul Manap Pulungan
Riza Annisa Pujarama
Sia Nawir
Salsabila Azkia Farhani
Noval Fauzan
Zulianissa Diah Kusmawati
Pramudya Putra Bintang

Editor:
Noval Fauzan

Tata Letak dan Disain Cover: Sarwo Edhie

Oktober 2026

Hak Cipta © 2026 Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh:
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Jl. Batu Merah No. 45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510
Telp. 021-7901001, Fax. 021-79194018
Email: indef@indef.or.id; csed@indef.or.id
Website: http://indef.or.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kemampuan mempertahankan pertumbuhan dan memperluas program prioritas, tetapi belum menghasilkan percepatan transformasi ekonomi yang sebanding dengan besarnya mobilisasi sumber daya. Ekonomi tumbuh 5,11% pada 2025, hanya meningkat 0,08 poin persentase dibandingkan 2024, sementara pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45%. Capaian tersebut masih menyisakan jarak menuju sasaran pertumbuhan 8%. Persoalan utamanya terletak pada lemahnya hubungan antara peningkatan investasi, produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan perbaikan kesejahteraan. Evaluasi ini menggunakan periode data sebagaimana tersedia dalam laporan; angka parsial 2026 tidak diperlakukan sebagai capaian setahun penuh, dan seluruh perubahan ekonomi tidak serta-merta diatribusikan kepada pemerintahan saat ini.

Kualitas pertumbuhan masih menghadapi hambatan struktural. Pertumbuhan tahunan melambat dari 5,61% pada triwulan I menjadi 5,29% pada triwulan II 2026, ketika andil industri pengolahan turun dari 1,03 menjadi 0,90 poin persentase. Rasio tambahan modal terhadap tambahan output atau ICOR membaik dari 6,50 pada 2024 menjadi 6,24 pada 2025, tetapi masih menunjukkan kebutuhan modal yang tinggi untuk menghasilkan pertumbuhan. Pada saat yang sama, elastisitas kesempatan kerja dalam perhitungan Bab 1 turun dari 0,68 menjadi 0,26. Konsentrasi ekonomi juga tetap kuat, dengan Jawa menyumbang 56,47% PDB pada triwulan II 2026. Kombinasi ini menunjukkan bahwa akumulasi modal belum cukup efektif memperluas basis produksi dan pemerataan ekonomi.

Stabilitas moneter menghadapi tekanan bersamaan dari nilai tukar, harga, dan ketimpangan pertumbuhan intermediasi perbankan. Laporan mencatat kurs bergerak dari Rp15.732 per dolar AS pada akhir Oktober 2024 menjadi Rp18.046 pada 19 Oktober 2026, sementara inflasi meningkat dari 1,71% menjadi 3,28% pada September 2026. Kredit perbankan tumbuh 13,58% pada Juli 2026, terutama ditopang kredit investasi sebesar 25,13%, sedangkan kredit konsumsi hanya tumbuh 5,38%. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang dilaporkan sebesar 6,18% menambah kebutuhan pengawasan terhadap keseimbangan pendanaan bank. Ekspansi kredit investasi menjadi peluang penguatan kapasitas produksi, tetapi lemahnya kredit konsumsi dan tekanan harga mengindikasikan pemulihan permintaan rumah tangga belum merata.

Kebijakan fiskal daerah memperlihatkan biaya ekonomi dari realokasi anggaran yang perlu diperhitungkan secara lebih utuh. Laporan mencatat penurunan anggaran belanja daerah sekitar Rp150 triliun atau 10% pada 2026, disertai penurunan belanja modal sebesar 42,10%. Tekanan tersebut terjadi ketika sekitar 79% kabupaten/kota masih bergantung tinggi pada transfer pusat dan sekitar 70% APBD terserap untuk belanja operasional. Dalam struktur demikian, penyesuaian anggaran berisiko lebih banyak mengorbankan pembangunan dan pemeliharaan aset produktif. Efisiensi fiskal perlu diarahkan pada koreksi belanja

yang rendah manfaatnya, dengan tetap menjaga pelayanan dasar dan kemampuan daerah menopang pertumbuhan.

Danantara menawarkan peluang optimalisasi aset negara, tetapi keberhasilannya harus dibuktikan melalui tambahan investasi dan hasil pengelolaan yang terukur. Realisasi investasi nasional sebesar Rp1.931,2 triliun pada 2025 dan Rp1.010,6 triliun pada semester I 2026 tidak dapat langsung diklaim sebagai kontribusi lembaga yang baru diluncurkan pada Februari 2025. Pengalihan dividen BUMN, ekspansi pembiayaan, dan restrukturisasi perusahaan membawa biaya peluang serta risiko terhadap neraca negara. Target penyederhanaan 1.074 BUMN beserta anak usahanya menjadi sekitar 250 entitas hanya bernilai apabila diikuti perbaikan arus kas, produktivitas, dan tata kelola. Pemisahan fungsi regulator dan investor, keterbukaan transaksi afiliasi, serta pengawasan DSI menjadi prasyarat untuk mencegah konsentrasi kewenangan berkembang menjadi konsentrasi risiko dan rente.

Program Makan Bergizi Gratis memperlihatkan perluasan layanan yang besar, tetapi bukti keberhasilan pelaksanaan perlu dipisahkan dari bukti perbaikan gizi. Realisasi anggaran mencapai Rp51,5 triliun pada 2025 dan Rp153,2 triliun hingga September 2026, dengan sekitar 57 juta penerima melalui 27.486 SPPG. Skala tersebut menunjukkan kapasitas mobilisasi pelayanan sekaligus besarnya konsekuensi apabila pengawasan lemah. Persoalan keamanan pangan, mutu menu, ketepatan sasaran, dan transparansi pengadaan harus diselesaikan sebelum perluasan berikutnya. Efektivitas MBG perlu ditentukan oleh perbaikan status gizi, kesinambungan layanan, serta manfaat bagi keluarga rentan, dengan biaya per penerima yang dapat dipertanggungjawabkan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih menghadapi kesenjangan antara pembentukan kelembagaan dan kesiapan usaha. Hingga 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 koperasi telah berbadan hukum dan 60.854 memiliki NIB, sedangkan laporan Agustus 2026 menyebut sekitar 10.000 koperasi beroperasi dan 3.300 beroperasi optimal. Meskipun berbeda periode, data tersebut menegaskan perlunya menguji kesiapan operasional sebelum memperbesar investasi fisik. Ilustrasi pembiayaan maksimal Rp3 miliar untuk 80.000 unit menghasilkan potensi kebutuhan Rp240 triliun, bukan realisasi penyaluran. Tanpa pasar, manajemen, dan arus kas yang memadai, ekspansi berisiko menghasilkan aset menganggur serta mengalihkan kewajiban usaha kepada keuangan publik. Ukuran keberhasilan harus mencakup kenaikan pendapatan anggota dan tambahan aktivitas ekonomi lokal.

Swasembada pangan menunjukkan kemajuan pada produksi dan cadangan beras, tetapi keberlanjutannya bergantung pada efisiensi produksi serta distribusi. Produksi beras mencapai 34,69 juta ton pada 2025, sementara cadangan beras pemerintah tercatat 4,61 juta ton per 19 September 2026. Capaian tersebut memperkuat kemampuan stabilisasi pasokan, tetapi belum membuktikan ketahanan seluruh komoditas maupun keterjangkauan pangan di setiap wilayah. Produktivitas lahan, kualitas irigasi, kehilangan pascapanen, dan pendapatan bersih petani tetap menjadi persoalan utama. Kebijakan perlu menyeimbangkan

perlindungan harga produsen dengan kepentingan konsumen melalui penurunan biaya produksi dan logistik, agar penguatan cadangan tidak disertai pembengkakan biaya penyimpanan dan subsidi.

Kemandirian energi masih dibatasi kesenjangan produksi dan kebutuhan domestik. Lifting minyak sebesar 605,3 ribu barel per hari pada 2025 telah memenuhi target tahun tersebut, tetapi belum menghilangkan ketergantungan impor. Kebutuhan LPG sekitar 8,3 juta ton per tahun berhadapan dengan produksi domestik sekitar 1,6 juta ton, sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari luar negeri. Bauran energi terbarukan meningkat menjadi 15,75% pada 2025, tetapi transformasi pasokan masih terbatas. Pemanfaatan biodiesel sebesar 14,9 juta kiloliter memberikan peluang substitusi impor, namun manfaat bersihnya harus memperhitungkan insentif, biaya bahan baku, serta dampak pangan dan lingkungan. Prioritas perlu diarahkan pada efisiensi energi, jaringan gas, dan energi terbarukan yang kompetitif.

Transformasi industri belum sejalan dengan peningkatan investasi hilirisasi. Berdasarkan tabel dalam laporan, investasi hilirisasi naik dari Rp280,8 triliun pada semester I 2025 menjadi Rp300,1 triliun pada semester I 2026, sementara pangsa industri pengolahan terhadap PDB turun dari 18,95% menjadi 18,77% dan pertumbuhannya melambat dari 5,12% menjadi 4,78%. Perbandingan periode yang sama ini menunjukkan bahwa kenaikan investasi belum menghasilkan penguatan manufaktur secara luas. Konsentrasi pada pengolahan sumber daya, ketergantungan teknologi impor, dan lemahnya pemasok domestik membatasi manfaat ekonomi. Insentif perlu diikat pada pendalaman rantai produksi, transfer teknologi, pekerjaan produktif, dan kepatuhan lingkungan agar nilai tambah benar-benar tertahan dalam perekonomian nasional.

Kualitas infrastruktur dasar menjadi hambatan nyata bagi produktivitas dan pemerataan. Kondisi mantap jalan nasional turun dari 95% pada 2024 menjadi 93% pada 2025 dan bertahan hingga semester I 2026. Pada periode yang sama, jalan provinsi turun dari 69% menjadi 66%, sedangkan jalan kabupaten turun dari 55% menjadi 51%. Memburuknya kualitas jaringan berpotensi menaikkan biaya angkut, memperpanjang waktu distribusi, dan mengurangi akses produsen terhadap pasar. Pemerintah perlu melindungi pemeliharaan aset dan konektivitas sentra produksi, sekaligus menyeleksi proyek baru berdasarkan pemanfaatan serta biaya sepanjang umur aset. Penambahan infrastruktur harus diikuti kemampuan menjaga kualitas layanannya.

Pembangunan SDM menghadapi persoalan mutu pembelajaran dan kesesuaian keterampilan dengan pekerjaan. Tabel laporan menunjukkan rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,22 tahun pada 2024 menjadi 9,45 tahun pada 2026, tetapi perluasan pendidikan belum menjamin transisi kerja yang baik. Tingkat pengangguran lulusan SMK mencapai 8,16% pada Februari 2026, sedangkan data pekerja muda yang dikutip menunjukkan 22,36% memiliki pendidikan melebihi kebutuhan pekerjaannya dan 13% berada di bawah kebutuhan kualifikasi. Kondisi ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara pendidikan dan struktur permintaan

tenaga kerja. Pemerataan kualitas guru, penguatan kemampuan dasar, serta keterhubungan vokasi dan perguruan tinggi dengan industri harus menjadi prioritas bersama penciptaan pekerjaan produktif.

Perbaikan indikator pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan penguatan kualitas kesejahteraan. TPT sebesar 4,68% pada Februari 2026 berada dalam rentang target APBN, tetapi tambahan penduduk bekerja dalam perbandingan Februari turun dari 3,59 juta orang pada 2025 menjadi 1,90 juta orang pada 2026. Sekitar 1,16 juta atau 61% dari tambahan tersebut merupakan pekerja informal. Porsi pekerja tidak penuh juga meningkat dari 31,9% menjadi 33,2%, sementara pengangguran usia muda berada pada kisaran 16–17% dalam periode pengamatan laporan. Data ini menegaskan perlunya menilai pasar kerja melalui kecukupan jam kerja, kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan pemanfaatan keterampilan, di samping jumlah orang yang bekerja.

Penurunan kemiskinan berlangsung, tetapi belum cukup cepat untuk memenuhi sasaran pembangunan. Tingkat kemiskinan turun dari 8,50% pada Maret 2025 menjadi 8,30% pada September 2025 dan 8,07% pada Maret 2026. Penurunan sebesar 0,43 poin persentase dalam setahun merupakan kemajuan, tetapi posisi Maret 2026 masih 0,57 poin di atas batas atas target 2026 sebesar 7,50%; data tersebut belum merupakan penilaian akhir tahun. Tekanan biaya kebutuhan dasar dan keterbatasan pekerjaan produktif memperbesar kerentanan rumah tangga di sekitar garis kemiskinan. Pengurangan kemiskinan perlu menggabungkan perlindungan sosial tepat sasaran, keterjangkauan pangan, akses layanan dasar, dan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.

Agenda optimalisasi pada bab terakhir, menuntut koreksi alokasi sumber daya dan penguatan pertanggungjawaban kebijakan. Prioritas mendesak mencakup pemulihan daya beli melalui pekerjaan layak, koordinasi stabilitas moneter dan keuangan, perlindungan belanja produktif daerah, serta disiplin investasi dan tata kelola program prioritas. MBG harus memenuhi standar layanan, koperasi harus memenuhi kelayakan usaha, dan swasembada harus menghasilkan manfaat bersih setelah seluruh biaya diperhitungkan. Hilirisasi, infrastruktur, dan pendidikan perlu dihubungkan dalam strategi peningkatan produktivitas yang konsisten. Dengan demikian, setiap program harus memiliki indikator hasil (output), tenggat (timing), penanggung jawab (PIC), dan evaluasi *loop* secara terbuka yang menentukan kelanjutan pendanaan, sehingga kelemahan pelaksanaan segera dikoreksi sebelum menjadi beban fiskal permanen.

KATA PENGANTAR

Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk menelaah arah kebijakan ekonomi, menilai capaian pembangunan, dan mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan pembenahan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya negara menghasilkan peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja yang layak, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Buku *Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo* disusun sebagai kontribusi INDEF dalam menghadirkan kajian yang independen, kritis, dan berbasis data. Pembahasan meliputi perkembangan makroekonomi, kondisi moneter dan fiskal daerah, pelaksanaan program prioritas, transformasi ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Temuan dari setiap pembahasan menjadi landasan untuk merumuskan agenda kebijakan yang perlu segera dilaksanakan.

Perhatian utama buku ini terletak pada hubungan antara capaian ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat. Pertumbuhan investasi perlu disertai penguatan industri domestik, peningkatan produktivitas, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Perluasan program pemerintah juga harus ditopang oleh ketepatan sasaran, mutu pelayanan, dan akuntabilitas anggaran. Dengan demikian, kemajuan pembangunan dapat dinilai dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Penilaian dalam buku ini mempertimbangkan capaian dan kelemahan kebijakan secara proporsional. Perkembangan ekonomi selama dua tahun pemerintahan turut dipengaruhi oleh kebijakan periode sebelumnya, dinamika global, dan persoalan struktural domestik. Oleh karena itu, analisis memperhatikan perbedaan periode dan cakupan data serta membedakan target, realisasi, dan proyeksi. Ketelitian tersebut menjadi dasar untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui buku ini, INDEF mendorong perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas belanja, dan penajaman prioritas pembangunan. Kritik dan rekomendasi disampaikan untuk memperkuat kualitas kebijakan di tengah keterbatasan fiskal dan kapasitas kelembagaan. Setiap kebijakan perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan ekonomi, mengurangi kerentanan, dan memastikan manfaat pembangunan terdistribusi secara lebih adil.

Evaluasi ini juga diharapkan memperkuat budaya pengambilan keputusan yang terbuka terhadap bukti dan koreksi. Pemerintah perlu menindaklanjuti temuan melalui langkah perbaikan yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pengawasan yang konsisten. Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut penting untuk memastikan bahwa program yang efektif diperkuat, kelemahan segera dibenahi, dan penggunaan sumber daya publik tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Kami menyampaikan terima kasih kepada tim penulis dan seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa keterbatasan data dan perubahan kebijakan membuka ruang bagi penyempurnaan kajian. Semoga buku ini bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memperkaya dialog kebijakan serta mendorong perbaikan kinerja ekonomi Indonesia ke depan.

Jakarta, Oktober 2026
Tim Penyusun

Center of Macroeconomics and Finance (MACFIN)
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 3
KATA PENGANTAR 7
DAFTAR ISI 9
DAFTAR GAMBAR 12
DAFTAR TABEL 14

BAB 1 MAKRO DAN STABILITAS EKONOMI 16
1.1 Pertumbuhan Ekonomi 16
1.1.1 Pertumbuhan di Mode Bertahan 17
1.1.2 Andil PMTB dan Ekspor Meningkat tetapi Pertumbuhan Melambat 18
1.1.3 Struktur Produksi Tidak Menguat dan PDB Tetap Terpusat di Jawa 20
1.1.4 Efisiensi Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja Melemah 22
1.1.5 Memisahkan Capaian Pemerintah dari Pengaruh Faktor Lain 24
1.1.6 Target 2026 Menuntut Penguatan pada Semester Kedua 24
1.2 Kinerja Moneter-Perbankan 26
1.2.1 Rupiah Melemah, IHSG Memerah 26
1.2.2 Tekanan Inflasi Meningkat 30
1.2.3 Laju Kredit Perbankan Menguat 31
1.3 Fiskal Daerah Melemah 32

BAB 2 PROGRAM PRIORITAS 36
2.1 Kinerja Danantara 36
2.1.1 Tren dan Komposisi Realisasi Investasi 37
2.1.2 Isu-Isu Terkait Realisasi Investasi dan Hilirisasi 39
2.1.3 Isu-Isu Strategis Danantara Selama Pemerintahan Presiden Prabowo 40
2.2 Kinerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 42
2.2.1 Capaian Pelaksanaan Program 43
2.2.2 Efektifitas Penyerapan Anggaran 45

2.2.3 Kualitas Layanan dan Perbaikan Tata Kelola 46
2.2.4 Isu-Isu Strategis Program MBG Selama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo .49
2.3 Kinerja Program Koperasi Desa/Kota Merah Putih (KDKMP).....51
2.3.1 Capaian Pembentukan KDKMP.....51
2.3.2 Hambatan Operasionalsasi KDKMP 53
2.3.3 Kinerja Pembiayaan dan Dampak Ekonomi KDKMP 54
2.3.4 Isu-Isu Strategis Program KDKMP Dua Tahun Pemerintahan Prabowo.....57
2.4 Kinerja Program Swasembada Pangan dan Energi 59
2.4.1 Capaian Produksi dan Kemandirian Pangan Nasional 60
2.4.2 Efektivitas Kebijakan Produksi, Harga, dan Cadangan Pangan 61
2.4.3 Ketahanan Pangan, Diversifikasi, dan Kesejahteraan Petani 62
2.4.4 Kinerja Produksi Migas dan Ketergantungan Impor Energi 63
2.4.5 Efektivitas Biodiesel, Energi Terbarukan, dan Hilirisasi Energi 65
2.4.6 Risiko Fiskal, Investasi, dan Keberlanjutan Swasembada 67
2.4.7 Evaluasi Keseluruhan dan Rekomendasi Kebijakan.....68

BAB 3 TRANSFORMASI EKONOMI 71
3.1 Kerangka Pembangunan 2025-2029.....71
3.2 Infrastruktur: Konektivitas Jalan Masih Menjadi Tantangan 74
3.2.1 Kondisi Mantap Jalan Nasional Menurun 74
3.2.2 Kondisi Mantap Jalan Provinsi dan Kabupaten Terdampak Efisiensi? 75
3.3 Anggaran Pendidikan dan Kualitas Pendidikan 76
3.3.1 Anggaran Pendidikan Tinggi, Kualitas Pendidikan Masih Ketinggalan 76
3.3.2 Pendidikan Tinggi Belum Menjamin Pendapatan Yang Tinggi di Indonesia 79
3.4 Hilirisasi Belum Mendorong Industrialisasi.....82
3.4.1 Investasi Tinggi Belum Mendongkrak Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan Pada PDB.....82

BAB 4 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 87

4.1 Lapangan Kerja 87
4.1.1 Penciptaan lapangan kerja menurun drastis 87
4.1.2 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja 89
4.1.3 Kesejahteraan pekerja Cenderung Tertekan 92
4.1.4 Pengangguran Usia Muda dan Pendidikan Tinggi 94
4.1.5 Produktivitas Tenaga Kerja Tumbuh Lambat 96
4.2 Kemiskinan 97
4.2.1 Elastisitas Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 97
4.2.2 Kemiskinan Berdasarkan Desa Kota 99
4.2.3 Garis Kemiskinan Indonesia 100
4.2.4 Persoalan Garis Kemiskinan Upah Riil 101

BAB 5 AGENDA OPTIMALISASI KINERJA 103

DAFTAR PUSTAKA 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2018 Sampai Semester I 2026 18
Gambar 2. Pangsa Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia Tahun 2015-TW II 2026 ...21
Gambar 3. Perkembangan ICOR Indonesia Tahun 2016 sampai 2025 22
Gambar 4. Perkembangan Kurs Rupiah, Inflasi, IHSG 27
Gambar 5. Tren Indeks Risiko Geopolitik dan Kurs Rupiah terhadap US$ 28
Gambar 6. Perkembangan Kategori Penyumbang Inflasi 30
Gambar 7. Perkembangan Laju Kredit Perbankan 31
Gambar 8. Komposisi Kab/Kota Berdasarkan Ketergantungan Pada Dana Pusat, 2026 33
Gambar 9. Tren Capaian Realisasi Investasi Periode Q4 2024-Q2 2026.....37
Gambar 10. Komposisi Realisasi Investasi Triwulanan Indonesia Q4-2025 – Q2-2026 (Triliun Rupiah) 38
Gambar 11. Realisasi Investasi Sektor Hilirisasi Q2-2026 (Triliun Rupiah) 39
Gambar 12. Penerima Manfaat MBG (Juta Orang) dan Jumlah Unit SPPG 2025-2026 44
Gambar 13. Total Realisasi Anggaran (Triliun Rupiah) dan Serapan Pagu (Persen) MBG 2025 – September 2026.....45
Gambar 14. SPPG Menurut Pemenuhan Standar Higiene Sanitasi Januari 2026 ...46
Gambar 15. Perbandingan Skema Insentif SPPG 6 Juta/Hari dan Rp 2.000 /Porsi ..47
Gambar 16. Komposisi Pengunaan Dana MBG (%) 48
Gambar 17. Jumlah Titik Pembangunan Fisik KDMP Sepanjang 2026 (Titik) 52
Gambar 18. Simulasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Jumlah Unit (Triliun Rupiah) 54
Gambar 19. Titik Pembangunan Fisik KDMP Per 14 Oktober 2026 55
Gambar 20. Koperasi Berbadan Hukum, Beroperasi, dan Optimal.....58
Gambar 21. Indikator Capaian Pangan (Juta Ton).....61
Gambar 22. Lifting Minyak Bumi Realisasi 2025 dan Target 2026 (Ribu Barel/Hari) 63

Gambar 23. Pemanfaatan Gas Bumi Domestik dan Ekspor 2025 65
Gambar 24. Realisasi Pemanfaatan Biodiesel (Juta kL) 65
Gambar 25. Realisasi dan Bauran Energi Terbarukan (%) 66
Gambar 26. Program Pemerintah 2025-2029 72
Gambar 27. Anggaran Pendidikan dan Realisasinya terhadap Total Belanja 78
Gambar 28. Hasil Nilai PISA Indonesia 78
Gambar 29. Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Bulanan Menurut Tingkat Pendidikan, 2023-2026 80
Gambar 30. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2026 81
Gambar 31. Kontribusi Industri Pengolahan dan Pertumbuhan Industri Pengolahan 83
Gambar 32. Grafik Penciptaan Lapangan Kerja 88
Gambar 33. Pekerja Penuh dan Tidak Penuh 89
Gambar 34. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi 90
Gambar 35. Kemampuan Penciptaan Lapngan Kerja Setiap 1 Persen Pertumbuhan Ekonomi.....91
Gambar 36. Penyerapan Tenaga Kerja Untuk 1 Persen Pertumbuhan Lapangan Usaha (Data Februari) 92
Gambar 37. Pertumbuhan Upah Riil 93
Gambar 38. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Usia 95
Gambar 39. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan 96
Gambar 40. Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.....98
Gambar 41. Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Kemiskinan.....99
Gambar 42. Tingkat Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Indonesia dalam Perspektif Historis.....17
Tabel 2. Komponen Utama PDB Dari Sisi Pengeluaran 19
Tabel 3. Kontribusi Komponen Pengeluaran Terhadap Pertumbuhan (%) 20
Tabel 4. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan 21
Tabel 5. Indikator Efisiensi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja 23
Tabel 6. Ringkasan Penilaian Kinerja Pertumbuhan.....23
Tabel 7. Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026.....25
Tabel 8. Realisasi dan Kondisi Pelaksanaan Program MBG 43
Tabel 9. Capaian Pembentukan dan Operasional KDKMP 51
Tabel 10. Indikator Capaian Kinerja Ekonomi Nasional 64
Tabel 11. Matriks evaluasi kinerja swasembada pangan dan energi 68
Tabel 12. Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025 - 2029 73
Tabel 13. Capaian Infrastruktur Konektivitas dan Layanan Transportasi Periode 2024 - 2026 75
Tabel 14. Transfer ke Daerah 2022 - 2027 (Milyar Rupiah) 76
Tabel 15. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2022 - 2026.....77
Tabel 16. Hasil PISA 2025 Negara-negara di ASEAN 79
Tabel 17. Perkembangan Investasi 82
Tabel 18. Capaian Pembangunan Industri dan Hilirisasi Tahun 2024-Semester I 2026 84
Tabel 19. Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbukan (%) 87
Tabel 20. Penciptaan Lapangan Kerja Menurut Kegiatan Data Februari 88
Tabel 21. Pertumbuhan Upah Riil Menurut Lapangan Usaha Data Februari 94
Tabel 22. Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha.....96
Tabel 23. Target dan Data Tingkat Kemiskinan 97
Tabel 24. Garis Kemiskinan BPS dan Bank Dunia.....100

BAB 1
MAKRO DAN STABILITAS EKONOMI:
Pertumbuhan Ekonomi, Moneter dan Fiskal Daerah

BAB 1
MAKRO DAN STABILITAS EKONOMI:
Pertumbuhan Ekonomi, Moneter dan Fiskal Daerah

Dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo memperlihatkan kerentanan ekonomi multidimensi, di mana pertumbuhan tertahan di kisaran 5% tanpa percepatan struktural menuju target 8%, dibayangi rendahnya efisiensi modal (ICOR di atas 6) serta anjloknya elastisitas penyerapan tenaga kerja hingga 62%. Kerapuhan makro tersebut kian diperparah oleh instabilitas moneter akibat depresiasi Rupiah hingga Rp18.046 per USD, kenaikan inflasi, anjloknya IHSG, serta perlambatan DPK dan kredit konsumsi yang mencerminkan tergerusnya daya beli sekaligus ancaman pengetatan likuiditas perbankan. Pada saat yang sama, ketahanan fiskal daerah terpukul parah akibat pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp150 triliun yang memangkas belanja modal hingga 42,10%, melumpuhkan mesin pertumbuhan lokal bagi 79% daerah yang masih bergantung pada dana pusat di tengah beban APBD yang 70% sudah terkunci untuk operasional rutin birokrasi.

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mempertahankan pertumbuhan di sekitar 5%, tetapi tidak membentuk percepatan menuju sasaran 8%. Ekonomi tumbuh 5,11% pada 2025, hanya 0,08 poin persentase di atas 2024 dan 0,09 poin di bawah target APBN. Pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45%, tetapi laju tahunan turun dari 5,61% pada triwulan I menjadi 5,29% pada triwulan II. Capaian tersebut menunjukkan stabilitas pertumbuhan, bukan perubahan lintasan. Capaian juga hanya mempertahankan pola pertumbuhan lama dan tidak mempersempit jarak menuju sasaran pemerintah secara berarti (BPS, 2025a, 2026a; Kementerian Keuangan, 2024, 2025).

Pada triwulan II 2026, kenaikan andil PMTB dan ekspor masing masing sebesar 0,27 dan 0,78 poin persentase tidak menghasilkan percepatan. Pertumbuhan tahunan justru turun 0,32 poin. Andil gabungan komponen lain, termasuk impor, inventori, dan diskrepansi statistik, menurun sekitar 0,90 poin sehingga mengimbangi kenaikan andil PMTB serta ekspor (BPS, 2026d; perhitungan penulis).

Peningkatan andil PMTB tidak disertai penguatan industri pengolahan. Andil industri pengolahan turun dari 1,03 poin persentase pada triwulan I menjadi 0,90 poin pada triwulan II 2026. Perekonomian juga tetap terpusat di Jawa, dengan pangsa 56,47% pada triwulan II 2026 (BPS, 2026c, 2026e).

Perbaikan efisiensi investasi masih terbatas, sedangkan daya serap tenaga kerja memburuk. ICOR turun dari 6,50 pada 2024 menjadi 6,24 pada 2025, tetapi tetap berada di atas 6. Elastisitas kesempatan kerja turun sekitar 62%, dari 0,68 pada 2024 menjadi 0,26 pada 2025 (Kementerian Ketenagakerjaan, 2026; BPS, 2023b, 2024b, 2025b; perhitungan penulis). Dua tahun pertama menghasilkan stabilitas pertumbuhan tanpa percepatan struktural. Andil industri pengolahan melemah, efisiensi modal tetap rendah, konsentrasi ekonomi di Jawa masih tinggi, dan pertumbuhan menyerap lebih sedikit tenaga kerja.

1.1.1 Pertumbuhan di Mode Bertahan

Ekonomi tumbuh 5,17% pada 2018 dan 5,02% pada 2019. Setelah kontraksi pada 2020 dan pemulihan pada 2021, pertumbuhan mencapai 5,31% pada 2022, kemudian turun menjadi 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024. Pertumbuhan 5,11% pada 2025 merupakan kenaikan tipis dan tetap di bawah puncak 5,17% sebelum pandemi (BPS, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023a, 2024a, 2025a, 2026a).

APBN 2025 menetapkan target pertumbuhan 5,2%, sedangkan realisasinya 5,11%. Selisih terhadap target tahunan hanya 0,09 poin persentase, tetapi jarak terhadap sasaran jangka menengah 8% mencapai 2,89 poin. Jarak tersebut jauh melampaui kenaikan 0,08 poin dari 2024. Capaian 2025 hampir memenuhi target tahunan, tetapi tidak mengubah lintasan pertumbuhan menuju 8%. PDB per kapita naik dari Rp78,6 juta pada 2024 menjadi Rp83,7 juta pada 2025. Kenaikan nominal tersebut tidak langsung mencerminkan penguatan daya beli atau perbaikan distribusi pendapatan karena menggunakan nilai harga berlaku dan tidak menunjukkan sebaran pendapatan (Kementerian Keuangan, 2024, 2025; BPS, 2025a, 2026a).

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Indonesia dalam Perspektif Historis

Periode	Pertumbuhan	Keterangan
2018	5,17%	Sebelum pandemi
2019	5,02%	Sebelum pandemi
2020	kontraksi 2,07%	Kontraksi pandemi
2021	3,69%	Pemulihan awal
2022	5,31%	Pemulihan setelah pembatasan kegiatan dicabut
2023	5,05%	Normalisasi
2024	5,03%	Kondisi awal pemerintahan
2025	5,11%	Naik 0,08 poin dari 2024 dan 0,09 poin di bawah target APBN 2025

Periode	Pertumbuhan	Keterangan
Semester I 2026	5,45%	Data kumulatif sampai Juni dan bukan capaian tahunan

Sumber: BPS (2019, 2020, 2021, 2022, 2023a, 2024a, 2025a, 2026a, 2026c).
Catatan: Semester I 2026 merupakan pertumbuhan kumulatif, bukan capaian tahunan.

Pertumbuhan menguat pada akhir 2025 dan awal 2026. PDB triwulan IV 2025 tumbuh 5,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kemudian mencapai 5,61% pada triwulan I 2026. Secara triwulanan, PDB triwulan I 2026 turun 0,77% dari triwulan IV 2025. Perbedaan arah tersebut terjadi karena dasar perbandingan tahunan dan triwulanan tidak sama, sedangkan perubahan triwulanan juga dipengaruhi pola musiman (BPS, 2026a, 2026b). Pada triwulan II 2026, ekonomi tumbuh 5,29% secara tahunan dan 3,73% secara triwulanan. Laju tahunan turun 0,32 poin persentase dari triwulan I. Pertumbuhan kumulatif semester I sebesar 5,45% memberikan titik awal yang relatif kuat, tetapi bukan pencapaian target tahunan 5,4%. Perlambatan pada triwulan II meningkatkan tekanan terhadap kinerja semester kedua (BPS, 2026c; Kementerian Keuangan, 2025).

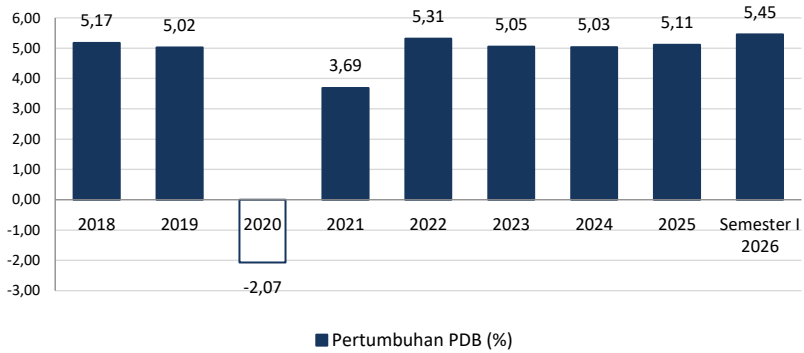

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2018 Sampai Semester I 2026

Sumber: BPS (2019, 2020, 2021, 2022, 2023a, 2024a, 2025a, 2026a, 2026c).
Catatan: Angka 2026 menunjukkan pertumbuhan kumulatif semester I.

1.1.2 Andil PMTB dan Ekspor Meningkat tetapi Pertumbuhan Melambat

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen terbesar dari sisi pengeluaran. Pada 2025, pangsanya mencapai 53,88% PDB dan kontribusinya terhadap pertumbuhan sebesar 2,62 poin persentase. Namun, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98%, lebih rendah daripada pertumbuhan PDB sebesar 5,11%.

Pertumbuhan 2025 ditopang oleh beberapa komponen permintaan dan tidak hanya oleh konsumsi rumah tangga (BPS, 2026a, 2026d).

Komposisi pertumbuhan berubah pada semester I 2026. Dari triwulan I ke triwulan II, andil konsumsi rumah tangga turun dari 2,95 menjadi 2,67 poin persentase dan andil konsumsi pemerintah turun dari 1,26 menjadi 1,07 poin. Pada saat yang sama, andil PMTB naik dari 1,79 menjadi 2,06 poin dan andil ekspor naik dari 0,21 menjadi 0,99 poin (BPS, 2026b, 2026c, 2026d). Empat komponen yang ditampilkan secara bersih menambah 0,58 poin persentase, tetapi pertumbuhan PDB turun 0,32 poin. Andil gabungan komponen lain menurun sekitar 0,90 poin dan mengimbangi kenaikan andil PMTB serta ekspor. Agregat tersebut mencakup impor, perubahan inventori, dan diskrepansi statistik, sedangkan tabel yang tersedia tidak memisahkan besarnya perubahan setiap komponen (BPS, 2026d; perhitungan penulis).

PMTB tumbuh 6,43% selama semester I 2026. Pangsanya pada triwulan II mencapai 29,36%, dibandingkan 28,77% sepanjang 2025. Selisih tersebut menunjukkan penguatan pembentukan modal pada triwulan II, bukan perubahan struktur tahunan. PMTB mencatat pembentukan modal, tetapi tidak mengukur produktivitas aset, kandungan impor, tambahan kapasitas, atau pekerjaan yang tercipta (BPS, 2026a, 2026c). Konsumsi pemerintah tumbuh 18,62% selama semester I 2026 dan memberi dorongan besar terhadap permintaan. Namun, andilnya turun pada triwulan II ketika andil PMTB dan ekspor meningkat. Daya tahan dorongan fiskal tetap ditentukan oleh ruang fiskal, waktu pencairan, komposisi, dan mutu belanja (BPS, 2026b, 2026c, 2026d).

Tabel 2. Komponen Utama PDB Dari Sisi Pengeluaran

Indikator	2025	Triwulan II 2026	Semester I 2026
Konsumsi rumah tangga	4,98%, tahunan	5,06%, tahunan	5,28%, kumulatif
PMTB	5,09%, tahunan	6,87%, tahunan	6,43%, kumulatif
Konsumsi pemerintah	Tidak ditampilkan	15,97%, tahunan	18,62%, kumulatif
Ekspor barang dan jasa	7,03%, tahunan	4,13%, tahunan	Tidak ditampilkan
Pangsa konsumsi rumah tangga	53,88%	53,32%	Tidak ditampilkan
Pangsa PMTB	28,77%	29,36%	Tidak ditampilkan

Sumber: BPS (2026a, 2026b, 2026c).

Sumber pertumbuhan pada semester I 2026 menjadi lebih beragam, tetapi laju pertumbuhan tidak meningkat. Kenaikan andil PMTB dan ekspor pada triwulan II diimbangi oleh penurunan andil komponen lain, sementara andil konsumsi rumah tangga dan pemerintah juga menurun. Perubahan yang terjadi baru berupa pergeseran komposisi permintaan, bukan penguatan kualitas pertumbuhan (BPS, 2026c, 2026d).

Tabel 3. Kontribusi Komponen Pengeluaran Terhadap Pertumbuhan (%)

Komponen	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Perubahan
Konsumsi rumah tangga	2,95	2,67	turun 0,28
PMTB	1,79	2,06	naik 0,27
Konsumsi pemerintah	1,26	1,07	turun 0,19
Ekspor barang dan jasa	0,21	0,99	naik 0,78

Sumber: BPS (2026d).

1.1.3 Struktur Produksi Tidak Menguat dan PDB Tetap Terpusat di Jawa

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berubah pada setiap periode. Jasa lainnya tumbuh paling cepat pada 2025, akomodasi dan makan minum pada triwulan I 2026, serta listrik dan gas pada triwulan II. Perubahan tersebut terutama menggambarkan dinamika jangka pendek. Sektor dengan laju tertinggi tidak selalu memiliki ukuran dan andil terbesar terhadap pertumbuhan (BPS, 2026a, 2026b, 2026c).

Andil lapangan usaha memberi gambaran yang lebih tepat mengenai struktur pertumbuhan. Di antara sektor yang diamati, industri pengolahan tetap memberi andil terbesar, tetapi nilainya turun dari 1,03 menjadi 0,90 poin persentase. Andil pertanian turun 0,09 poin dan informasi serta komunikasi turun 0,02 poin. Perdagangan naik 0,01 poin, sedangkan konstruksi naik 0,09 poin. Kenaikan PMTB dan konstruksi tidak disertai penguatan andil industri pengolahan (BPS, 2026e). Secara gabungan, andil lima sektor yang ditampilkan turun sekitar 0,14 poin persentase dari triwulan I ke triwulan II dan menjelaskan hampir separuh perlambatan PDB sebesar 0,32 poin. Kenaikan andil konstruksi dan perdagangan sebesar 0,10 poin dilampaui oleh penurunan industri pengolahan, pertanian, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,24 poin. Dengan komposisi tersebut, peningkatan konstruksi bersifat parsial dan tidak mengubah arah struktur produksi (BPS, 2026c, 2026e; perhitungan penulis).

Kegiatan ekonomi tetap terpusat di Jawa, meskipun konsentrasinya menurun selama periode pengamatan. Pangsa Jawa naik dari 58,29% pada 2015 menjadi 59,00% pada 2019, kemudian turun menjadi 58,75% pada 2020, 56,48% pada 2022, 56,93% pada 2025, dan 56,47% pada triwulan II 2026. Penurunan 1,82 poin persentase dari 2015 menunjukkan pergeseran terbatas ke luar Jawa, tetapi 56,47% PDB nasional masih dihasilkan di satu wilayah. Data pangsa ini mengukur lokasi kegiatan ekonomi dan tidak menggambarkan kesenjangan pendapatan per kapita, produktivitas, atau mutu pekerjaan antardaerah (BPS, 2016, 2020, 2021, 2023a, 2026a, 2026c).

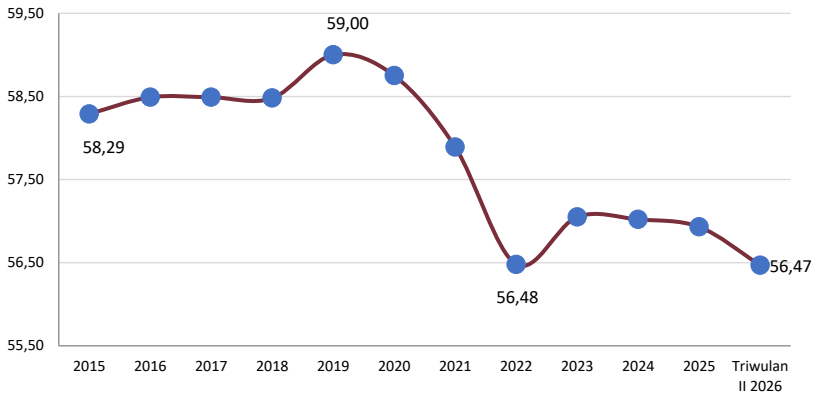

Gambar 2. Pangsa Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia Tahun 2015-TW II 2026
Sumber: BPS (2016, 2020, 2021, 2023a, 2026a, 2026c).
Catatan: Data 2015 sampai 2025 tahunan; angka 2026 merupakan posisi triwulan II.

Tabel 4. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan

Lapangan usaha	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Perubahan
Industri pengolahan	1,03	0,90	turun 0,13
Perdagangan	0,82	0,83	naik 0,01
Konstruksi	0,53	0,62	naik 0,09
Informasi dan komunikasi	0,50	0,48	turun 0,02
Pertanian	0,55	0,46	turun 0,09

Sumber: BPS (2026e).
Catatan: Satuan poin persentase; hanya mencakup lapangan usaha terpilih.

1.1.4 Efisiensi Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja Melemah

ICOR dan elastisitas kesempatan kerja menunjukkan dua kelemahan kualitas pertumbuhan. ICOR membaik 0,26 poin pada 2025, tetapi tetap di atas 6, sementara elastisitas kesempatan kerja turun 0,42 poin atau 61,8%. Tambahan nilai tambah masih membutuhkan modal besar dan pertumbuhan menyerap lebih sedikit tenaga kerja (BPS, 2023b, 2024b, 2025b; Kemnaker, 2026).

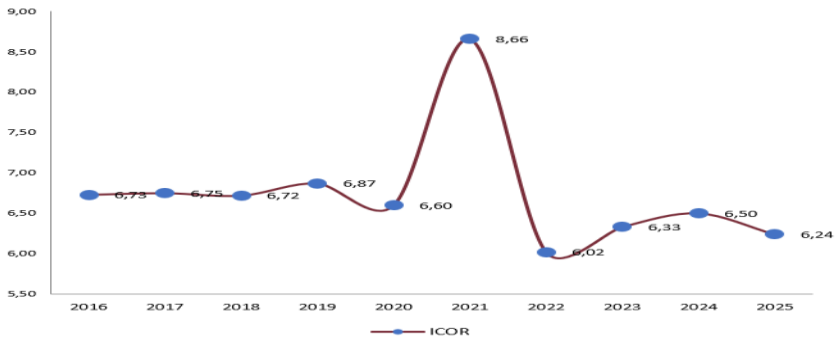

Gambar 3. Perkembangan ICOR Indonesia Tahun 2016 sampai 2025

Sumber: Satudata Kemnaker (diolah).

ICOR atau incremental capital output ratio menunjukkan kebutuhan modal untuk menghasilkan tambahan nilai tambah. Nilai ICOR Indonesia berkisar 6,02 sampai 8,66 pada 2016 - 2025. Setelah mencapai 8,66 pada 2021, ICOR turun menjadi 6,02 pada 2022, lalu meningkat menjadi 6,50 pada 2024. Penurunan menjadi 6,24 pada 2025 memperbaiki posisi tahun sebelumnya, tetapi nilainya masih lebih tinggi daripada 2022 dan tetap di atas 6. Tambahan nilai tambah masih membutuhkan modal yang relatif besar (Kementerian Ketenagakerjaan, 2026).

Daya serap tenaga kerja melemah pada 2025. Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang pada Agustus 2023 dan 4,79 juta orang pada Agustus 2024, tetapi kenaikannya hanya 1,90 juta orang pada Agustus 2025. Elastisitas kesempatan kerja, yang dihitung dari pertumbuhan jumlah pekerja Agustus ke Agustus dibandingkan dengan pertumbuhan PDB tahunan, turun dari 0,68 pada 2024 menjadi 0,26 pada 2025 atau sekitar 62%. Setiap 1% pertumbuhan PDB pada 2025 berkaitan dengan pertumbuhan jumlah pekerja yang jauh lebih kecil dibandingkan dua tahun sebelumnya. Angka ini mengukur hubungan antardua indikator dan bukan pengaruh sebab akibat (BPS, 2023b, 2024b, 2025b; perhitungan penulis). Elastisitas tersebut mengukur jumlah pekerja dan tidak menilai status pekerjaan, jam kerja, upah, atau produktivitas. Penurunannya menunjukkan pelemahan daya serap tenaga kerja, sedangkan mutu pekerjaan dibahas dalam bab ketenagakerjaan.

Tabel 5. Indikator Efisiensi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Dimensi	Indikator	2024	2025	Perubahan dan penilaian
Efisiensi investasi	ICOR	6,50	6,24	Membaik 0,26 poin, tetapi ICOR tetap di atas 6
Penyerapan tenaga kerja	Elastisitas kesempatan kerja	0,68	0,26	Turun 0,42 poin atau 61,8% dan menunjukkan pelemahan tajam

Sumber: Satudata Kemnaker (diolah); BPS (2023b, 2024b, 2025b); perhitungan penulis. Catatan: Elastisitas dihitung dari pertumbuhan jumlah penduduk bekerja Agustus ke Agustus dibagi dengan pertumbuhan PDB tahunan.

ICOR sebesar 6,24 dan elastisitas kesempatan kerja sebesar 0,26 menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan pada 2025 tetap lemah. Efisiensi modal hanya membaik secara terbatas, sedangkan daya serap tenaga kerja turun tajam. Kenaikan PMTB pada 2026 baru akan memperkuat kapasitas ekonomi jika mampu menurunkan ICOR dan menghasilkan lebih banyak pekerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan, 2026; BPS, 2023b, 2024b, 2025b; perhitungan penulis).

Tabel 6. Ringkasan Penilaian Kinerja Pertumbuhan

Dimensi	Bukti utama	Penilaian
Laju pertumbuhan	2025: 5,11%; semester I 2026: 5,45%	Pertumbuhan stabil di sekitar 5%, tanpa percepatan menuju sasaran 8%
Komposisi permintaan	Andil PMTB dan ekspor naik; konsumsi rumah tangga dan pemerintah turun	Kenaikan andil PMTB dan ekspor diimbangi penurunan andil komponen lain; pertumbuhan melambat
Struktur produksi	Andil industri pengolahan turun 0,13 poin	Andil industri pengolahan melemah ketika andil PMTB meningkat
Sebaran wilayah	Pangsa Jawa: 58,29% (2015); 59,00% (2019); 56,93% (2025); 56,47% (triwulan II 2026)	Konsentrasi turun 1,82 poin dari 2015, tetapi 56,47% PDB masih dihasilkan di Jawa
Prospek 2026	Proyeksi lembaga 5,0% sampai 5,2%, di bawah target 5,4%	Target 5,4% berada 0,2 sampai 0,4 poin di atas proyeksi lembaga pembanding
Efisiensi investasi	ICOR: 6,50 (2024); 6,24 (2025)	Perbaikan terbatas; ICOR tetap di atas 6
Daya serap tenaga kerja	Elastisitas: 0,67 (2023); 0,68 (2024); 0,26 (2025)	Turun sekitar 62% pada 2025 dan menunjukkan pelemahan tajam daya serap tenaga kerja

Sumber: BPS (2016, 2019, 2020, 2021, 2023a, 2023b, 2024a, 2024b, 2025a, 2025b, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e), Satudata Kemnaker (diolah), Kementerian Keuangan (2024, 2025), IMF (2026), World Bank (2026), ADB (2026), dan OECD (2026); perhitungan dan penilaian penulis.

1.1.5 Memisahkan Capaian Pemerintah dari Pengaruh Faktor Lain

Data 2025 dan 2026 menggambarkan kinerja ekonomi selama pemerintahan baru, bukan semata mata akibat kebijakannya. Kerangka APBN 2025 ditetapkan sebelum pelantikan, sedangkan investasi dan produksi pada 2025 dan 2026 juga mencerminkan keputusan usaha dan proyek yang dimulai sebelumnya. Perdagangan global, harga komoditas, permintaan mitra dagang, cuaca, dan dasar perbandingan statistik turut menentukan hasil pertumbuhan (Kementerian Keuangan, 2024).

Pengaruh pemerintah dalam jangka pendek paling terlihat melalui konsumsi pemerintah, waktu pencairan anggaran, dan pelaksanaan program. Sebaliknya, perubahan struktur industri, efisiensi investasi, dan kapasitas ekspor membutuhkan waktu lebih panjang. Karena tidak menggunakan rancangan pembanding, bab ini menilai capaian selama masa pemerintahan Prabowo Gibran tanpa mengatribusikan seluruh perubahan kepada kebijakan pemerintah.

Pemisahan tersebut menentukan cara membaca konsumsi pemerintah, PMTB, dan ICOR. Belanja pemerintah dapat mendorong permintaan jangka pendek, tetapi daya tahannya bergantung pada ruang fiskal dan mutu belanja. PMTB menggabungkan investasi baru, keputusan swasta, dan penyelesaian proyek lama. Perubahan ICOR juga dipengaruhi komposisi investasi serta waktu penyelesaian proyek. Pola tersebut menunjukkan stabilitas jangka pendek, tetapi tidak disertai penguatan kapasitas pertumbuhan jangka panjang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2026).

1.1.6 Target 2026 Menuntut Penguatan pada Semester Kedua

APBN 2026 menetapkan target pertumbuhan tahunan 5,4%. Pertumbuhan semester I sebesar 5,45% menunjukkan posisi sampai pertengahan tahun, sedangkan laju tahunan turun dari 5,61% pada triwulan I menjadi 5,29% pada triwulan II. Proyeksi IMF dan World Bank sebesar 5,0%, sedangkan ADB dan OECD memperkirakan 5,2%. Target pemerintah berada 0,2 sampai 0,4 poin persentase di atas proyeksi lembaga pembanding. Selisih tersebut menempatkan target 5,4% di bawah tekanan dan menuntut penguatan pada semester kedua (BPS, 2026c; Kementerian Keuangan, 2025; IMF, 2026; World Bank, 2026; ADB, 2026; OECD, 2026).

Pencapaian angka 5,4% tidak cukup jika ditopang oleh belanja sementara atau investasi dengan ICOR tinggi. Pelemahan permintaan global dapat mengurangi dukungan ekspor, sedangkan andil konsumsi pemerintah berubah mengikuti realisasi belanja. Pertumbuhan yang lebih kuat harus disertai PMTB yang

meningkatkan efisiensi modal, penguatan industri pengolahan, dan penciptaan pekerjaan yang layak (Kementerian Keuangan, 2025; BPS, 2023b, 2024b, 2025b, 2026a, 2026c; Kementerian Ketenagakerjaan, 2026).

Tabel 7. Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

Institusi	Pertumbuhan	Tanggal rilis	Status
Pemerintah	5,4%	APBN 2026	Target
IMF	5,0%	Juli 2026	Proyeksi
World Bank	5,0%	Juni 2026	Proyeksi
ADB	5,2%	September 2026	Proyeksi
OECD	5,2%	23 September 2026	Proyeksi

Sumber: Kementerian Keuangan (2025), IMF (2026), World Bank (2026), ADB (2026), dan OECD (2026).

Pemerintah perlu menjaga daya beli melalui pertumbuhan pendapatan dan penciptaan pekerjaan. Pelaporan PMTB perlu disertai indikator jenis aset, sektor, wilayah, kandungan dalam negeri, tambahan kapasitas produksi, jumlah pekerjaan, dan perkembangan ICOR. Indikator tersebut perlu menjadi dasar evaluasi proyek dan insentif agar kenaikan investasi diukur dari kapasitas produktif yang dihasilkan, bukan hanya dari nilai nominalnya.

Evaluasi pertumbuhan perlu menempatkan andil lapangan usaha, ICOR, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi wilayah sebagai indikator utama bersama laju PDB. Pemerintah juga perlu memisahkan target, realisasi, proyeksi, dan perkiraan dampak kebijakan dalam pelaporan resmi. Dengan penyajian tersebut, sektor kecil yang tumbuh cepat tidak diperlakukan sebagai penggerak utama dan data parsial tidak dibaca sebagai capaian tahunan.

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran menghasilkan stabilitas tanpa percepatan. Pertumbuhan 2025 hanya naik 0,08 poin persentase dari 2024. Pada triwulan II 2026, kenaikan andil PMTB dan ekspor tidak mencegah perlambatan, sedangkan andil industri pengolahan menurun. PDB tetap terpusat di Jawa, ICOR bertahan > 6, dan kesempatan kerja turun sekitar 62% pada 2025.

Pemerintah mampu menjaga pertumbuhan di sekitar 5%, tetapi struktur dan kualitas pertumbuhan tidak banyak berubah. Kenaikan investasi tidak terhubung kuat dengan penguatan industri pengolahan, perbaikan efisiensi modal, dan penciptaan pekerjaan. Capaian akhir 2026 bergantung pada kinerja semester kedua. Bukti semester I menunjukkan bahwa stabilitas tidak berkembang menjadi percepatan struktural (BPS, 2016, 2021, 2023b, 2024b, 2025b, 2026a, 2026c, 2026d, 2026e; Kementerian Ketenagakerjaan, 2026; penilaian penulis).

1.2 Kinerja Moneter-Perbankan

Perkembangan sejumlah indikator moneter menggambarkan capaian kinerja yang menurun selama 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Baik faktor domestik maupun gejolak global memengaruhi perkembangan kinerja moneter. Kurs Rupiah terhadap Dollar AS cenderung melemah seiring moderatnya kinerja ekonomi domestik yang disertai dengan tensinya geopolitik dan geoekonomi global. Strategi realokasi anggaran ke program-program prioritas yang masih terus mencari bentuk kebijakan yang sesuai 'trial and error' membuat pelaku ekonomi ragu akan kuatnya keberlanjutan fiskal. Di saat yang sama meletus perang Israel & AS melawan Iran yang mendidihkan tensi geopolitik global, setelah sebelumnya ekonomi global dikejutkan dengan Tarif Trump. Fenomena kebijakan domestik dan tekanan ekonomi global tersebut akhirnya membawa kurs Rupiah terdepresiasi cukup dalam. Hal serupa juga terjadi pada indikator inflasi yang cenderung meningkat, serta pasar bursa saham Indonesia yang anjlok berkali-kali. Di Tengah situasi ini, kenaikan laju kredit perbankan khususnya dari jenis kredit investasi seperti menjadi 'oase' bagi optimisme ekonomi ke depan.

1.2.1 Rupiah Melemah, IHSG Memerah

Perjalanan perekonomian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 2 tahun ini sangat menantang. Di bidang moneter-perbankan, koordinasi kebijakan antara Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan tercapainya stabilitas sekaligus menumbuhkan perekonomian belum memuaskan. Kinerja nilai tukar Rupiah dalam tren melemah dalam 2 tahun ini. Hal yang sama juga terjadi pada indikator inflasi yang cenderung meningkat seiring kendala produksi dan terganggunya rantai suplai. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berfluktuasi dengan kecenderungan memerah dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

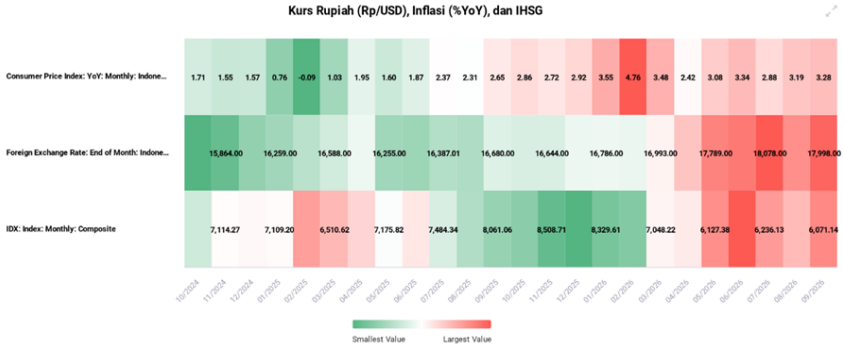

Gambar 4. Perkembangan Kurs Rupiah, Inflasi, IHSG
Sumber: CEIC, 2026

Presiden Prabowo dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024, sehari kemudian membentuk Kabinet Merah Putih. Kurs Rupiah terhadap USD pada akhir Oktober 2024 berada di Rp15.732/USD. Setahun kemudian kurs Rupiah berada di Rp16.640/USD (Oktober 2025), atau mengalami depresiasi 5,8%. Kondisi Rupiah semakin tertekan pada tahun kedua Pemerintahan Prabowo di mana pada 19 Oktober 2026 kurs berada di Rp18.046/USD, atau kembali terdepresiasi lebih dari 8,2%. Secara umum, dalam 2 tahun Pemerintahan Presiden Prabowo kurs Rupiah mengalami fluktuasi baik apresiasi maupun depresiasi, namun dengan kecenderungan depresiasi hingga 13,7 % (Oktober 2024-September 2026). Sebuah kondisi yang merepresentasikan besarnya tantangan dalam mengelola stabilitas perekonomian, seiring menjauhnya kinerja dari cita-cita. Sumber tantangan stabilitas Rupiah berasal baik dari fenomena ekonomi global maupun kondisi perekonomian domestik.

Dari sisi global, memanasnya tensi geopolitik dalam 2 tahun terakhir membuat ruang gerak untuk melakukan ekspansi moneter semakin terbatas, karena bank sentral disibukkan oleh upaya meredam dampak eskalasi geopolitik global ke perekonomian nasional. Implikasi instabilitas global ini tidak hanya berdampak ke ekonomi, namun juga menjalar ke tatanan internasional yang semakin multipolar.

Gambar 5. Tren Indeks Risiko Geopolitik dan Kurs Rupiah terhadap US$
Sumber: CEIC, 2026

Memanasnya geopolitik global sesungguhnya sudah dimulai sejak perang Rusia dan Ukraina yang tidak berkesudahan hingga saat ini, seiring sempitnya ruang kompromi diplomatik antara negara-negara yang mengalami konflik. Situasi semakin tidak mudah manakala perang Rusia-Ukraina belum reda tiba-tiba meletus perang Israel dan Amerika melawan Iran. Konflik di kawasan Timur Tengah ini menjadi salah satu 'batu sandungan' melemahnya kurs Rupiah. Hal ini mengingat ketidakpastian ekonomi global muncul setidaknya dari dua sisi, lonjakan harga minyak serta gangguan keamanan terhadap *supply chain* perdagangan di Selat Hormuz yang menguasai 20% lalu lintas perdagangan global.

Selain dinamika geopolitik, ekonomi global juga dihadapkan pada panasnya geoekonomi yang ditandai oleh menguatnya proteksionisme perdagangan sejak Presiden Trump terpilih kembali untuk kedua kalinya memimpin Amerika Serikat. Kondisi ini turut mengguncang stabilitas nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Pada April 2025 Presiden Trump melemparkan Tarif Resiprokal ke hampir semua mitra dagangnya. Kebijakan ini secara keseluruhan memperlambat pertumbuhan volume perdagangan global dan menciptakan ketidakpastian yang tinggi dalam perekonomian global. Tentu saja hal ini juga berimbas kepada kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mengingat kebijakan resiprokal tarif AS menggerus optimisme perdagangan internasional.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan internasional dan bilateral, Presiden Prabowo selalu menekankan sikap Indonesia yang berdiri di tengah 'non-blok'

dalam konflik dagang Amerika- China, Amerika-Rusia, maupun dengan negara lainnya. Berangkat dari ketidakberpihakan mutlak pada salah satu blok ini Indonesia mencoba memanfaatkan persaingan adidaya ekonomi yang terjadi untuk menarik investasi serta proyek infrastruktur di domestik. Jika berjalan optimal, strategi masuknya modal asing melalui berbagai kerjasama ekonomi ini tentu akan menguatkan kurs Rupiah.

Namun, seiring melemahnya Rupiah dalam 2 tahun Pemerintahan Prabowo, ini sekaligus menunjukkan upaya mengoptimalkan kerjasama luar negeri untuk menarik minat investasi dan meningkatkan ekspor belum berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, keluwesan diplomasi bilateral ke depan masih perlu ditingkatkan supaya Indonesia tidak menjadi pelanduk di tengah gajah-gajah yang berkelahi.

Ke depan, momentum pelemahan Rupiah belum akan terhenti. Selain karena tren kebijakan *higher for longer* kebijakan The Fed, jika kita cermati perjalanan kurs Rupiah dalam 2 tahun ini (Gambar 1), maka tampak jelas bahwa tekanan terhadap Rupiah semakin meningkat sejak April 2026. Bahkan jika kita kaitkan situasi kurs Rupiah dengan geopolitik (Gambar 2), maka terlihat jelas di mana pada saat indeks risiko geopolitik menunjukkan penurunan sekalipun nilai kurs Rupiah tetap saja melemah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa faktor global memang berperan dalam memperburuk keadaan, namun yang lebih dominan bermasalah adalah sisi domestiknya. Sehingga tanpa upaya memperbaiki kinerja sektor moneter-perbankan domestik, maka dalam kondisi tensi geopolitik melandai pun Rupiah masih akan sulit menguat.

Dari sisi domestik, tekanan terhadap kurs Rupiah terutama diakibatkan oleh besarnya kebutuhan likuiditas valuta asing untuk impor migas serta struktur pembiayaan ekonomi domestik. *Pertama*, Ketergantungan impor minyak mentah dan BBM yang tinggi telah menciptakan permintaan valas dalam jumlah besar dan terus-menerus. Dalam kondisi harga minyak global melonjak karena konflik geopolitik, maka kebutuhan Dollar AS untuk impor pun meningkat. *Kedua*, terdapat kebutuhan lonjakan permintaan valas pada saat terjadi repatriasi dividen yang terjadi secara musiman di saat perusahaan multinasional mengirimkan keuntungan investasi dan dividen ke negara asal pemodal. *Ketiga*, ekspansi belanja APBN untuk mempercepat program prioritas pemerintahan juga membuat defisit melebar pada 2025. penerbitan surat utang pemerintah pada jumlah besar memicu sentimen pasar ke arah pesimis, sehingga terjadi aksi jual oleh investor non residen di pasar obligasi dan menekan kurs Rupiah.

Ibaratnya “setali tiga uang” dengan perkembangan Rupiah, kinerja IHSG di 2 tahun Pemerintahan Prabowo juga menurun. IHSG lunglai karena mengalami tekanan dari berbagai aspek, terutama dampak *rebalancing* MSCI. Sungguh pun sempat mengalami periode beberapa bulan penguatan seiring meredanya tensi perang dagang dan pergantian Menteri Keuangan yang membawa harapan baru dalam perekonomian. Namun, badai kejatuhan IHSG kembali melanda di awal tahun 2026 seiring tuntutan transparansi dan penegakan tata kelola bursa. Meskipun, berbagai upaya reformasi pasar modal Indonesia sudah didorong oleh OJK, namun mengingat proses perbaikan kelembagaan ini memerlukan waktu, sehingga perkembangan IHSG belum bisa kembali menghijau kembali ke posisi semula.

1.2.2 Tekanan Inflasi Meningkat

Inflasi di tingkat konsumen (IHK/Indeks Harga Konsumen) pada saat Presiden Prabowo dilantik berada di level 1,71%. Setahun kemudian inflasi meningkat ke level 2,86% (Oktober 2025). Kondisi inflasi pada 2 tahun Pemerintahan Prabowo cenderung meningkat dan berada pada posisi 3,28% (September 2026). Sungguh pun dari sisi target Bank Indonesia, tingkat inflasi masih dalam kisaran sasaran yang hendak dicapai, namun tren peningkatan inflasi yang terus terjadi ini menggambarkan bahwa tekanan daya beli masyarakat semakin berat.

Gambar 6. Perkembangan Kategori Penyumbang Inflasi
Sumber: CEIC 2026

Kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, di sisi lain upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Terlebih lagi pada tahun kedua ini terdapat fenomena El Nino atau kekeringan extrem yang mengganggu sisi produksi berbagai hasil pertanian. Akibatnya, inflasi makanan (yang mencakup 23 % dari IHK Indonesia) memiliki dampak yang sangat besar terhadap inflasi lokal. Inflasi makanan sempat bisa dikendalikan pada awal Pemerintahan Prabowo, namun pada 2026 ini kendala semakin tidak mudah karena berhadapan dengan faktor alam dan terganggunya berbagai rantai suplai produk impor. Kondisi juga diperberat dengan meningkatnya inflasi di sektor transportasi akibat kenaikan harga energi global (Gambar 3).

1.2.3 Laju Kredit Perbankan Menguat

Indikator laju kredit perbankan menggambarkan tingkat ekspansi perekonomian dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Pada saat awal mulai memimpin tingkat laju kredit perbankan sebesar 10,85%. Situasi laju pertumbuhan kredit sempat melambat ke 6,9% saat satu tahun pemerintahan. Pada menuju 2 tahun pemerintahan ini kinerja laju kredit mulai menunjukkan peningkatan di mana pada posisi Juli 2026 sebesar 13,58%. Peningkatan ini ditopang oleh kuatnya laju Kredit Investasi (25,13%), terutama ditopang oleh pelaksanaan program-program strategis nasional. Sementara itu Kredit Modal Kerja meningkat ke level moderat (11,04%). Hanya saja Kredit Konsumsi terus mengalami tren penurunan hingga ke 5,38% seiring pelemahan daya beli, jauh lebih lambat dibanding saat awal Presiden Prabowo memimpin sebesar 11,04% (Oktober 2024).

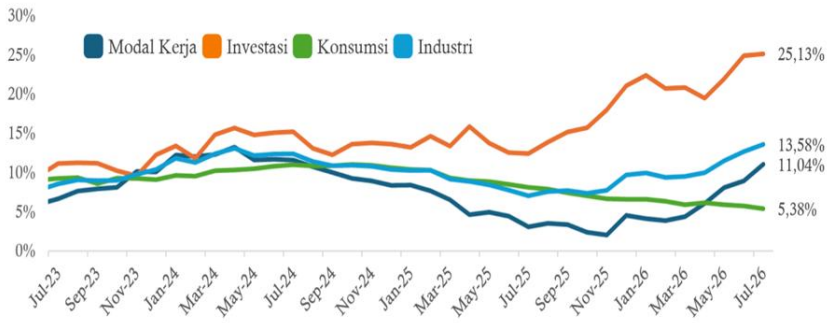

Gambar 7. Perkembangan Laju Kredit Perbankan
Sumber: OJK, 2026

Sementara itu, pada laju Dana Pihak Ketiga (DPK) justru terjadi perlambatan di mana pada saat Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024 laju DPK tumbuh sekitar 7,04%. Pada saat ini laju DPK mengalami penurunan ke 6,18%. Hal ini lagi-lagi menggambarkan bahwa terjadi indikasi pelemahan peningkatan pendapatan masyarakat yang kemudian berimplikasi kepada jumlah uang yang bisa ditabung oleh masyarakat ke sektor perbankan yang semakin menurun.

Peningkatan laju kredit yang disertai dengan penurunan laju DPK pada saat ini memang belum banyak menimbulkan persoalan kekeringan likuiditas karena masih tingginya *undisbursed loan* (Rp2.548 triliun). Namun, jika hal ini terus berlangsung maka yang terjadi adalah kekeringan likuiditas yang akan berujung pada meningkatnya tingkat bunga kredit. Implikasi selanjutnya akan semakin menyulitkan ekspansi dunia usaha dan berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi.

1.3 Fiskal Daerah Melemah

Salah satu aspek yang membedakan kebijakan pemerintahan di era Presiden Prabowo dengan kebijakan beberapa presiden sebelumnya adalah terkait dengan alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD). Seiring strategi efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintahan Prabowo, baik pada periode tahun pertama maupun tahun kedua, Pemerintah mencoba melakukan upaya efisiensi dengan mengurangi dana transfer ke daerah. Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan realokasi anggaran ke program-program prioritas nasional. Upaya ini, meskipun secara akumulasi, anggaran APBN dalam tren meningkat, namun dari sisi alokasi menjadi berubah, di mana pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan TKD.

Pada 2026, anggaran belanja Pemerintah Daerah turun sekitar Rp150 triliun atau sekitar 10%, di mana penurunan sebesar 42,10% terjadi pada belanja modal. Pemotongan belanja modal ini berkonsekuensi serius pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah. Akibatnya, bukan hanya tergerusnya 'engine of growth' akibat berkurangnya dukungan belanja modal daerah, namun Pemerintah Daerah juga lebih disibukkan dengan upaya mencukupi belanja rutin mereka. Sejumlah daerah pada akhirnya 'mengibarkan bendera putih', tidak mampu menggaji pegawai honorer dan meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk mengatasi persoalan yang muncul dari efisiensi ini.

Kebijakan memangkas Transfer Ke Daerah menimbulkan gejolak dan meningkatkan Risiko fiskal daerah mengingat sebagian besar kapasitas fiskal Pemerintah Daerah di Indonesia masih tergolong kecil. Banyak sekali daerah-daerah yang masih sangat tergantung dari dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, dipangkasnya dana transfer daerah dalam 2 tahun terakhir membuat kinerja pemerintah daerah menjadi sulit untuk maksimal. Meskipun juga disadari bahwa di sisi lain, belanja birokrasi di banyak daerah selama ini juga cenderung boros.

Sayangnya, 'shock therapy' fiskal daerah dalam wujud efisiensi ini datang di waktu yang tidak tepat.

Berbagai upaya mencoba dilakukan daerah untuk menambal terpangkasnya dana transfer, tetapi secara umum ruang gerak mereka semakin cekak, pelayanan Pemerintah Daerah pun ikut terdampak. Sekilas memang upaya yang mau dilakukan oleh pemerintah pusat atas pengelolaan dana transfer adalah memberikan sebuah pembelajaran bagi daerah untuk memastikan bahwa setiap anggaran daerah yang digunakan bersifat optimal, efisien, dan efektif. Namun demikian, secara tiba-tiba memangkas anggaran ke daerah juga bukan merupakan pilihan yang tepat mengingat tidak mudahnya daerah untuk melakukan penyesuaian.

Langkah yang perlu dilakukan, sesungguhnya adalah bagaimana memastikan bahwa ketika dana transfer memang harus dikurangi, daerah harus siap terlebih dahulu. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka hal yang lebih realistis adalah melakukan upaya untuk Memastikan bahwa setiap daerah Mengelola anggaran transfer ke daerahnya secara lebih optimal. Realokasi dilakukan di dalam APBD mereka masing-masing tanpa harus memangkas TKD. Lalu dilakukan peningkatan *monitoring* dan evaluasi agar dampak pengganda APBD ke perekonomian benar-benar terjadi.

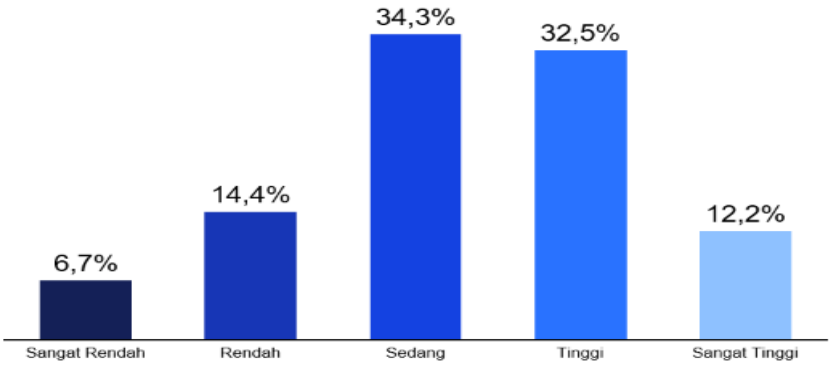

Gambar 8. Komposisi Kab/Kota Berdasarkan Ketergantungan Pada Dana Pusat, 2026

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2026 (diolah)

Pemangkasan TKD ini terjadi di tengah masih dominannya ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat (Gambar 1.8). Tercatat bahwa Hanya ada, sekitar 21% kabupaten atau kota yang memiliki tingkat ketergantungan pada pusat di level rendah dan sangat rendah. Sementara sisanya 79% masih sangat bergantung pada anggaran TKD. Melihat hal ini, maka upaya untuk bisa mengefektifkan dana transfer ke daerah sesungguhnya tidak bisa serta-merta dilakukan pemangkasan, dan kemudian realokasi pada program strategis nasional.

Harus disadari juga bahwa ketergantungan yang tinggi daerah pada anggaran pusat itu menunjukkan bahwa tidak mudahnya Pemerintah Daerah untuk bisa berkembang hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing. Terlebih lagi 70% APBD rata-rata terkunci pada belanja operasional, di mana tentu saja belanja-belanja operasional ini tidak mudah untuk dipangkas begitu saja karena menyangkut upaya Pemerintah Daerah dalam membiayai operasional rutin birokrasi mereka.

BAB 2
PROGRAM PRIORITAS:
Kinerja Danantara, Program MBG, Koperasi Desa Kota Merah Putih, dan Swasembada Pangan serta Energi

BAB 2
PROGRAM PRIORITAS:
Kinerja Danantara, Program MBG, Koperasi Desa Kota Merah Putih, dan Swasembada Pangan serta Energi

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, capaian paling nyata terlihat pada perluasan layanan MBG, peningkatan produksi beras, serta pengurangan impor solar. Namun, keberhasilan memperbesar program belum sepenuhnya diikuti bukti peningkatan kualitas layanan, produktivitas, imbal hasil investasi negara, dan kemandirian usaha desa. Persoalan utamanya adalah jarak antara besarnya mobilisasi sumber daya dan manfaat bersih yang dapat dibuktikan bagi masyarakat.

Evaluasi ini menggunakan batas informasi 16 Oktober 2026, menjelang dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026. Data 2024 dipakai sebagai pembanding awal, realisasi 2025 sebagai satu tahun penuh, dan data 2026 mengikuti periode terakhir yang tersedia. Angka sepanjang 2024 tidak seluruhnya merupakan hasil pemerintahan Prabowo, demikian pula data parsial 2026 tidak diperlakukan sebagai realisasi setahun penuh. Dalam evaluasi kinerja ini, penilaian dibedakan menjadi tiga lapis, yakni realisasi kegiatan, hasil bagi penerima manfaat, dan efisiensi serta keberlanjutannya.

2.1 Kinerja Danantara

Sejak dilantik pada Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan investasi dan hilirisasi sumber daya alam sebagai dua pilar utama strategi ekonominya. Kedua isu ini menyatu dalam target pertumbuhan ekonomi 8% yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta dalam dokumen visi "Asta Cita". Untuk mengejar target tersebut, pemerintah melanjutkan (dan bahkan mengakselerasi) kebijakan hilirisasi mineral yang dimulai sejak era Presiden Joko Widodo, sembari membentuk sejumlah instrumen kelembagaan baru, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Secara nominal, capaian investasi sepanjang 2025 memang mengesankan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Januari-Desember 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun, atau 101,3% dari target Presiden, tumbuh 12,7% secara tahunan (yoy), dengan hilirisasi disebut sebagai kontributor yang melompat 43,3% dibanding tahun sebelumnya. Namun di balik angka-angka "rekor" tersebut, muncul serangkaian pertanyaan kritis: apakah pertumbuhan investasi ini benar-benar berkualitas dan menetes ke kesejahteraan rakyat, ataukah dibangun di atas kerapuhan struktural yang dimulai dari ketergantungan berlebihan pada satu negara mitra dagang, kerusakan lingkungan yang masif, eksploitasi tenaga kerja, tata kelola kelembagaan yang belum matang, hingga gejala deindustrialisasi dini yang justru berjalan beriringan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

2.1.1 Tren dan Komposisi Realisasi Investasi

Realisasi investasi selama pemerintahan Prabowo menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp452,8 triliun pada kuartal IV 2024 menjadi Rp511,8 triliun pada kuartal II 2026, atau tumbuh sekitar 13,0%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan akselerasi investasi yang kuat dan berkelanjutan. Pertumbuhan investasi pada kuartal I 2026 hanya 0,4% secara kuartalan, sebelum meningkat 2,6% pada kuartal II 2026.

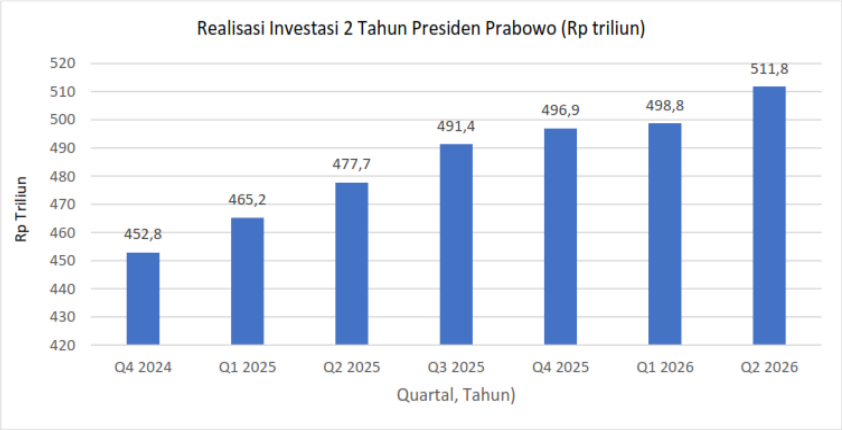

Gambar 9. Tren Capaian Realisasi Investasi Periode Q4 2024-Q2 2026
Sumber: BPKM (diolah)

Kondisi ini menunjukkan bahwa momentum investasi masih relatif fluktuatif dan belum sepenuhnya mencerminkan penguatan fundamental ekonomi. Persoalan mendasarnya bukan sekadar peningkatan nominal investasi, melainkan sejauh mana investasi mampu memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Tanpa perbaikan tersebut, peningkatan investasi berisiko hanya memperbesar akumulasi modal dengan dampak ekonomi yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Capaian di atas seyogyanya sangat berdampak lebih luas, apalagi adanya kehadiran Danantara sejak Februari 2025 seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mempercepat investasi produktif melalui optimalisasi aset dan dividen BUMN. Namun, peningkatan investasi nasional tidak dapat langsung diklaim sebagai keberhasilan Danantara karena realisasi investasi juga dipengaruhi PMA, PMDN, investasi swasta, dan kebijakan hilirisasi yang telah berjalan sebelumnya.

Keberhasilan Danantara harus diukur dari kemampuannya menciptakan tambahan investasi baru *(investment additionality),* menarik partisipasi modal swasta *(crowding-in)*, serta meningkatkan produktivitas dan imbal hasil aset negara.

Di sisi lain, pengalihan dividen BUMN untuk pembiayaan investasi juga memiliki konsekuensi terhadap ruang fiskal APBN sehingga setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan biaya peluang, risiko proyek, dan manfaat ekonominya. Tanpa tata kelola yang transparan, disiplin investasi, dan indikator kinerja yang terukur, Danantara berisiko menjadi instrumen konsolidasi aset berskala besar tanpa menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi yang sebanding.

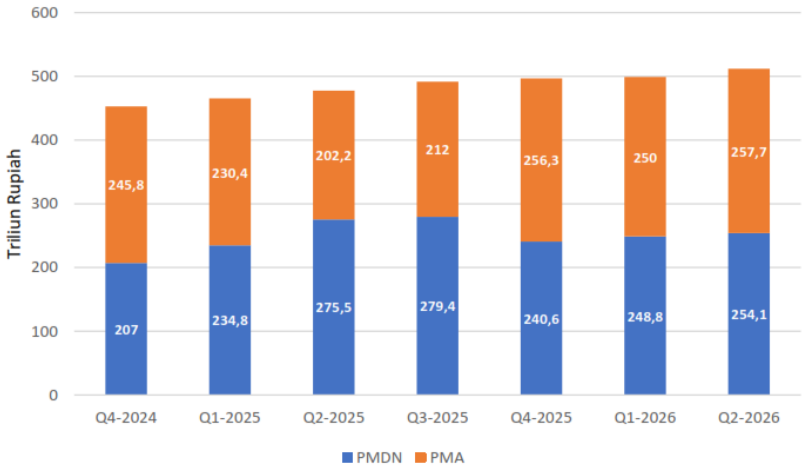

Gambar 10. Komposisi Realisasi Investasi Triwulanan Indonesia Q4-2025 – Q2-2026 (Triliun Rupiah)
Sumber: BKPM

Adapun untuk komposisi realisasi investasi pada periode awal pemerintahan Prabowo relatif berimbang, dengan PMDN sebesar 51,3% dan PMA 48,7%. Perhitungan sementara mencakup Q4 2024–Q2 2026, karena data Q3 2026 belum dirilis per 16 Oktober 2026. Terdapat selisih Rp0,2 triliun antara penjumlahan komponen yang dipublikasikan, yakni Rp3.394,4 triliun, dan penjumlahan total resmi Rp3.394,6 triliun. Selisih tersebut dipertahankan secara transparan karena angka sumber disajikan dengan pembulatan satu desimal. Komposisi ini menunjukkan modal domestik menopang sedikit lebih dari separuh investasi selama periode pengamatan.

Namun, dominasi tersebut tidak konsisten, dimana PMDN menyumbang 53,4%pada 2025, sementara pada semester I 2026 PMA kembali lebih besar dengan kontribusi 50,2%. Karena itu, penguatan investasi nasional perlu menjaga kemampuan ekspansi pelaku usaha domestik sekaligus memastikan investasi asing menghasilkan transfer teknologi, keterkaitan pemasok lokal, dan pekerjaan produktif. Angka PMDN juga tidak dapat langsung dianggap sebagai investasi Danantara karena mencakup penanaman modal dalam negeri secara keseluruhan.

2.1.2 Isu-Isu Terkait Realisasi Investasi dan Hilirisasi

Hilirisasi menjadi salah satu penggerak investasi nasional, dengan realisasi investasi hilirisasi pada kuartal II 2026 dilaporkan mencapai Rp152,7 triliun atau sekitar 29,8% dari total investasi nasional. Namun, besarnya investasi hilirisasi belum otomatis menunjukkan keberhasilan transformasi industri. Investasi masih menghadapi persoalan konsentrasi pada sektor mineral, tingginya ketergantungan terhadap teknologi dan barang modal impor, serta terbatasnya keterkaitan dengan industri domestik.

Akibatnya, nilai investasi yang besar belum tentu menghasilkan nilai tambah domestik dan efek pengganda ekonomi yang sebanding. Danantara seharusnya berperan memperdalam rantai nilai industri, bukan sekadar membiayai pembangunan smelter dan proyek pengolahan bahan mentah. Orientasi hilirisasi perlu bergeser menuju pengembangan industri manufaktur lanjutan, penguatan industri pendukung, transfer teknologi, dan peningkatan kandungan lokal yang kompetitif. Dengan demikian, hilirisasi tidak berhenti pada peningkatan nilai ekspor komoditas olahan, tetapi benar-benar menjadi fondasi industrialisasi nasional.

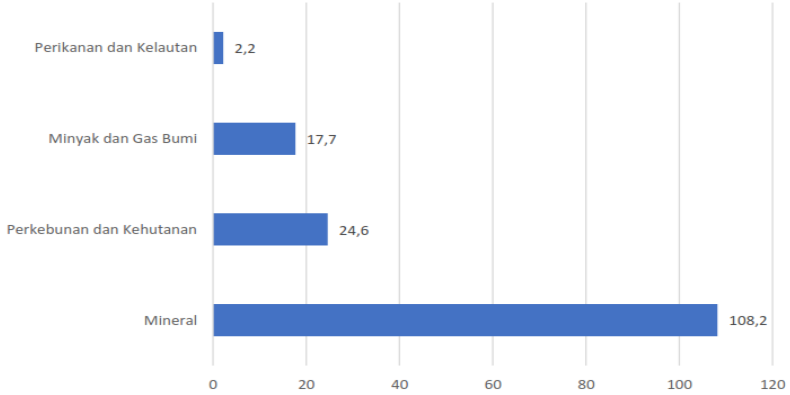

Gambar 11. Realisasi Investasi Sektor Hilirisasi Q2-2026 (Triliun Rupiah)
Sumber: BKPM

Klaim keberhasilan hilirisasi nikel yakni pertumbuhan investasi 43,3% dan kontribusi Rp150,6 triliun pada triwulan III 2025 saja perlu ditimbang bersama biaya eksternalitas yang selama ini belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam kalkulasi untung-rugi kebijakan. Deforestasi seluas 723 ribu hektare di Sulawesi Tengah, pencemaran sedimen laut yang melampaui ambang batas US EPA, ancaman terhadap ekosistem wisata Raja Ampat, hingga rentetan kecelakaan kerja fatal dan kerusuhan buruh di kawasan IMIP, adalah biaya riil yang secara akuntansi nasional tidak tercermin dalam angka pertumbuhan PDB maupun realisasi investasi, namun ditanggung langsung oleh masyarakat dan lingkungan di wilayah penghasil.

Pola ini adalah masalah desain insentif, bukan sekadar pelanggaran kepatuhan di lapangan. Sejumlah pemantau lingkungan menegaskan bahwa persoalan utama bukan absennya regulasi karena pada dasarnya Indonesia memiliki aturan yang relatif memadai soal Amdal, baku mutu limbah, dan konsultasi publik, melainkan lemahnya penegakan dan pengawasan, diperparah oleh minimnya transparansi dokumen audit lingkungan perusahaan kepada publik.

Selama biaya lingkungan dan sosial ini tidak dihitung sebagai bagian dari biaya produksi riil hilirisasi melalui mekanisme seperti pajak karbon, jaminan reklamasi yang mengikat, atau standar K3 yang ditegakkan secara konsisten, maka insentif korporasi untuk terus mengoptimalkan produksi tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang akan tetap bertahan, dan klaim "nilai tambah" hilirisasi berisiko menjadi nilai tambah yang semu apabila dihitung secara utuh dengan biaya pemulihan lingkungan dan sosial di masa depan.

Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo adalah memastikan peningkatan investasi dan ekspansi Danantara memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi investasi semester I 2026 dilaporkan mencapai Rp1.010,6 triliun atau sekitar 49,5% dari target tahunan Rp2.041,3 triliun, dengan penyerapan sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung. Namun, besarnya investasi belum tentu sebanding dengan penyerapan tenaga kerja, terutama ketika investasi terkonsentrasi pada sektor padat modal seperti pertambangan dan smelter.

Efektivitas investasi perlu dievaluasi berdasarkan produktivitas modal, tambahan output, kualitas pekerjaan, keterkaitan antarsektor, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Danantara juga harus memastikan proyek strategis tidak menimbulkan dominasi investasi negara yang justru menghambat investasi swasta. Keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya dana yang masuk atau nilai proyek yang diumumkan, tetapi dari seberapa besar investasi tersebut mampu menciptakan nilai tambah domestik, memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Isu-Isu Strategis Danantara Selama Pemerintahan Presiden Prabowo

Munculnya Danantara menghadapi persoalan mendasar berupa pemusatan aset dan kewenangan investasi yang menuntut pengawasan semakin kuat. Diluncurkan pada 24 Februari 2025 dengan potensi aset kelolaan melebihi US$900 miliar, keberhasilannya harus dibuktikan melalui peningkatan produktivitas dan keuntungan atas aset tersebut. Besarnya aset merupakan modal awal kelembagaan, sehingga tidak layak diperlakukan sebagai prestasi penciptaan nilai. Rangkap jabatan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara juga membuka risiko benturan antara fungsi pengaturan dan kepentingan investasi.

Tanpa pemisahan keputusan yang tegas, kesetaraan perlakuan terhadap pelaku usaha berpotensi terganggu. Pemeriksaan laporan keuangan konsolidasian 2025 yang dimulai BPK pada 17 September 2026 merupakan langkah penting, tetapi audit harus menghasilkan keterbukaan dan koreksi yang dapat ditelusuri publik. Semakin besar kewenangan mengalokasikan kekayaan negara, semakin ketat pula pertanggungjawaban atas pemilihan proyek, transaksi afiliasi, dan setiap risiko yang ditanggung.

Pengalihan dividen BUMN untuk investasi Danantara membawa konsekuensi fiskal yang tidak boleh disamarkan oleh narasi manfaat jangka panjang. Pernyataan Menteri Keuangan pada 8 Oktober 2026 bahwa Danantara tidak menyetor dividen kepada APBN pada 2026–2027 berarti penerimaan yang sebelumnya tersedia bagi belanja negara dialihkan menjadi modal investasi dengan hasil dan waktu pengembalian yang belum pasti. Kebijakan ini dapat dibenarkan apabila tambahan keuntungan dan manfaat ekonominya melampaui biaya peluang penggunaan dana tersebut. Namun, jika berkurangnya penerimaan harus diganti dengan utang untuk mempertahankan belanja, negara menghadapi biaya pendanaan yang pasti sambil menanggung risiko investasi.

Memindahkan dividen antarlembaga tidak otomatis menambah kapasitas fiskal. Karena itu, penilaian Danantara harus menggunakan neraca negara secara menyeluruh: berapa keuntungan bersih yang tercipta, berapa tambahan risiko pembiayaan, dan kapan hasilnya kembali menopang pelayanan publik. Tanpa aturan pembagian laba yang jelas, penahanan dividen berisiko menjadi pengorbanan fiskal tanpa batas waktu dan ukuran keberhasilan.

Ekspansi pembiayaan Danantara harus diuji dari kemampuan menghasilkan arus kas, sebab keberhasilan menghimpun dana baru merupakan awal dari kewajiban keuangan. Rencana Patriot Bond sebesar Rp50 triliun dengan bunga 2% dan tenor 5–7 tahun memang menawarkan pendanaan murah bagi penerbit, tetapi tetap mengandung biaya peluang bagi pembelinya; kesukarelaan pembelian dan rasionalitas keputusan perusahaan harus terbuka.

Penerbitan obligasi global US$1,5 miliar pada Juni 2026, dengan imbal hasil penawaran 5,35% dan 5,95% serta permintaan sekitar US$4,6 miliar, menunjukkan akses pasar yang kuat. Namun, besarnya permintaan belum menjamin proyek yang dibiayai mampu menghasilkan pengembalian memadai. Apabila kewajiban dolar membiayai kegiatan berpendapatan rupiah, pelemahan kurs dapat memperbesar beban pembayaran dan menggerus keuntungan. Penempatan sekitar US$3 miliar pada saham dan obligasi yang disampaikan pada Oktober 2026 juga memerlukan tolok ukur hasil setelah risiko dan biaya. Tanpa disiplin valuasi, batas eksposur, dan strategi keluar, fleksibilitas investasi dapat berubah menjadi pembenaran untuk menopang harga aset yang fundamentalnya lemah.

Restrukturisasi BUMN menjadi ujian apakah Danantara mampu memperbaiki disiplin usaha atau hanya memusatkan masalah perusahaan dalam struktur yang

lebih besar. Target penyederhanaan 1.074 BUMN beserta anak usahanya menjadi sekitar 250 entitas berpotensi mengurangi duplikasi, tetapi perubahan organisasi tidak otomatis menyelesaikan utang, inefisiensi, dan kelemahan manajemen. Penambahan modal sekitar Rp23,7 triliun kepada Garuda Indonesia harus diikuti target pemulihan arus kas, produktivitas armada, dan pembenahan biaya yang mengikat.

Dukungan tanpa konsekuensi atas kegagalan justru menciptakan insentif buruk karena perusahaan dapat mengandalkan penyelamatan berikutnya. Demikian pula, potensi investasi hilirisasi US$26 miliar yang disampaikan pada Maret 2026 harus dibuktikan melalui pencairan, penyelesaian proyek, kelayakan pasar, serta nilai tambah domestik. Kinerja Danantara semestinya diukur dari tambahan hasil yang benar-benar diciptakannya: BUMN semakin sehat, modal swasta ikut masuk, pemasok lokal berkembang, pekerjaan produktif bertambah, dan keuntungan berkelanjutan kembali kepada negara. Tanpa pembuktian itu, besarnya aset dan pembiayaan hanya memperbesar skala kelembagaan sekaligus risiko yang harus ditanggung publik.

Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pembentukan DSI ini berpotensi membawa risiko pemusatan tata niaga ekspor yang harus dikendalikan. Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI melaporkan pemantauan sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari US$14 miliar dan potensi optimalisasi US$5 miliar per tahun. Namun, nilai transaksi yang dipantau bukan tambahan devisa, sedangkan potensi optimalisasi belum menjadi penerimaan negara.

Pengawasan harga dan kontrak harus menutup manipulasi tanpa menambah biaya, memperlambat ekspor, atau membuka konflik kepentingan. Keberhasilan DSI harus diukur dari tambahan penerimaan dan devisa yang terverifikasi setelah dikurangi biaya kepatuhan. Tanpa transparansi harga, perlindungan data komersial, dan pengawasan independen, sentralisasi berisiko menambah perantara wajib serta ruang rente baru.

2.2 Kinerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga sebaga program prioritas pemerintahan Prabowo yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi, kesehatan, dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami perluasan cakupan penerima, peningkatan kapasitas pelayanan, serta dukungan anggaran yang semakin besar. Namun, percepatan implementasi tersebut juga menghadirkan tantangan terkait efektivitas belanja, kesiapan infrastruktur, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan tata kelola kelembagaan.

Dari perspektif ekonomi, MBG tidak hanya perlu dipandang sebagai program perlindungan sosial, tetapi juga sebagai investasi modal manusia (human capital

investment) yang harus menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja MBG selama dua tahun pemerintahan Prabowo perlu mencakup tiga aspek utama, yaitu capaian pelaksanaan program, efektivitas penyerapan anggaran, kualitas layanan dan perbaikan tata kelola, serta berbagai persoalan struktural dan teknis yang mempengaruhi kualitas implementasinya.

2.2.1 Capaian Pelaksanaan Program

Program MBG capaiannya memang terjadi perluasan layanan signifikan, tetapi efektivitas anggaran bergantung pada keamanan, ketepatan sasaran, dan kualitas gizi. Data terbaru memperbarui angka pada evaluasi sebelumnya. Dimana realisasi MBG sudah mencapai Rp153,2 triliun sampai akhir September 2026, dengan 57 juta penerima melalui 27.486 SPPG.

Tabel 8. Realisasi dan Kondisi Pelaksanaan Program MBG

Indikator MBG	Realisasi Atau Kondisi	Makna Evaluatif
Belanja MBG sepanjang 2025	Rp51,5 triliun	Menunjukkan besarnya mobilisasi fiskal tahun pertama
Penerima akhir 2025	53,8 juta orang	Merupakan posisi akhir tahun, bukan seluruhnya dilayani setahun penuh
Belanja Januari–September 2026	Rp153,2 triliun	Hampir tiga kali belanja sepanjang 2025; durasi dan intensitas layanan berbeda
Penerima akhir September 2026	57 juta orang	Jangkauan besar, tetapi belum mengukur frekuensi dan kontinuitas layanan
SPPG per akhir September 2026	27.486 unit	Kapasitas jaringan meningkat; mutu setiap unit harus diverifikasi
Target penerima dalam laporan BGN September	74,56 juta orang	Masih terdapat kesenjangan jangkauan sekitar 17,56 juta berdasarkan posisi Agustus

Sumber: BGN

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan kemampuan negara memperluas layanan pangan dalam skala besar. Sepanjang 2025, realisasi anggarannya mencapai Rp51,5 triliun dengan jangkauan 53,8 juta penerima pada akhir tahun. Hingga September 2026, realisasinya meningkat menjadi Rp153,2 triliun dan menjangkau sekitar 57 juta penerima melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Capaian ini menunjukkan besarnya mobilisasi anggaran dan jaringan pelayanan. Namun, keberhasilan MBG harus dinilai lebih terkait dengan makanan diterima secara rutin, aman dikonsumsi, memenuhi kebutuhan gizi, dan benar-benar membantu keluarga yang membutuhkan.

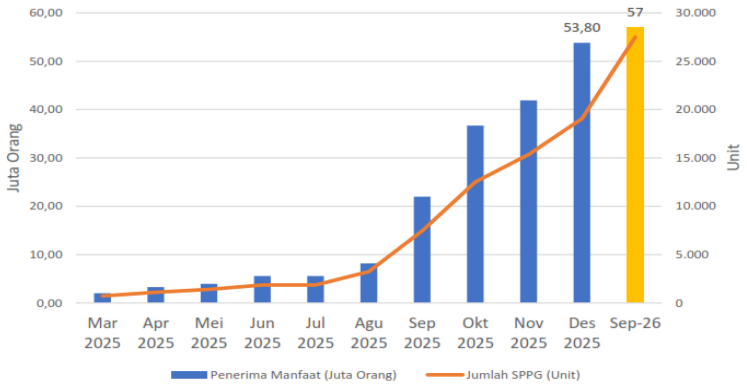

Gambar 12. Penerima Manfaat MBG (Juta Orang) dan Jumlah Unit SPPG 2025-2026
Sumber: Badan Gizi Nasional

Selain itu, ketepatan sasaran juga masih dibenahi. BGN melaporkan 56,99 juta penerima per 31 Agustus 2026, atau 76,45% dari target 74,56 juta, serta mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima dalam proses penajaman sasaran. Angka target ini perlu dibedakan dari target awal 82,9 juta penerima dalam perencanaan 2026. Perubahan sasaran dapat meningkatkan efektivitas apabila didasarkan pada kebutuhan gizi dan kerentanan ekonomi yang transparan.

Namun, perubahan target juga mengharuskan pemerintah menjelaskan siapa yang diprioritaskan, siapa yang dikeluarkan, dan bagaimana hak kelompok rentan tetap terlindungi. Capaian MBG selanjutnya harus diuji melalui perubahan kecukupan konsumsi, status gizi, dan kehadiran sekolah dengan evaluasi yang mampu memisahkan pengaruh program dari faktor lain.

Dari sisi pemerataan, perluasan layanan masih menghadapi kesenjangan sasaran. BGN sendiri melaporkan bahwa per 31 Agustus 2026, MBG menjangkau 56,99 juta orang atau 76,45% dari target 74,56 juta penerima. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta orang terhadap target tersebut. BGN juga menyampaikan penajaman sasaran, termasuk mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima.

Perubahan ini perlu dijelaskan melalui kriteria yang terbuka agar publik dapat membedakan perbaikan ketepatan sasaran dari keterbatasan pelayanan. Dalam kondisi anggaran terbatas, perluasan seharusnya memprioritaskan kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi dan kemampuan ekonomi rendah, tanpa mengabaikan daerah yang sulit dijangkau.

2.2.2 Efektifitas Penyerapan Anggaran

Dari sisi pembiayaan, belanja MBG hingga September 2026 sudah hampir tiga kali realisasi sepanjang 2025. Perbandingan ini tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan pemborosan karena pada 2025 layanan berkembang secara bertahap, sedangkan pada 2026 jaringan yang besar sudah tersedia sejak awal tahun. Jumlah penerima pada akhir periode juga tidak mencerminkan berapa hari setiap orang mendapatkan makanan. Karena itu, ukuran efisiensi yang lebih tepat adalah biaya per porsi yang benar-benar diterima, disertai pemeriksaan kandungan gizi dan mutu pelayanan. Pemerintah perlu membuka data jumlah porsi, hari pelayanan, serta biaya bahan makanan dan operasional agar kenaikan belanja dapat dinilai secara objektif.

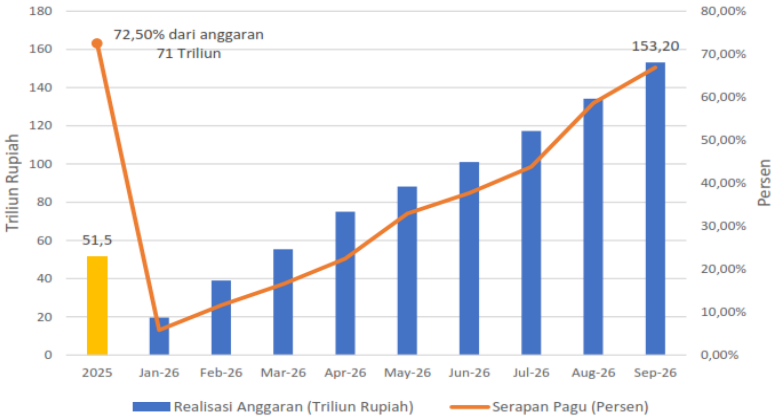

Gambar 13. Total Realisasi Anggaran (Triliun Rupiah) dan Serapan Pagu (Persen) MBG 2025 – September 2026
Sumber: Kementerian Keuangan

Pada 2025, realisasi anggaran MBG mencapai Rp51,5 triliun, atau 72,5% dari pagu Rp71 triliun, sehingga sekitar Rp19,5 triliun belum terserap. Hingga September 2026, realisasi yang dilaporkan Kementerian Keuangan mencapai Rp153,2 triliun. Dengan demikian, akumulasi belanja yang dilaporkan untuk 2025–September 2026 mencapai sekitar Rp204,7 triliun. Besarnya pengeluaran ini menuntut pembuktian manfaat yang sebanding. Penyerapan rendah tidak otomatis berarti efisien karena dapat mencerminkan keterlambatan layanan. Sebaliknya, penyerapan tinggi belum membuktikan makanan memenuhi standar atau sampai kepada penerima yang tepat.

Penilaian persentase penyerapan harus menggunakan pagu, cakupan belanja, dan tanggal yang sama. BGN melaporkan realisasi khusus MBG Rp139,77 triliun dari pagu tersedia Rp218,77 triliun, atau 63,89% per 16 September 2026. Angka tersebut

tidak dapat langsung dibandingkan dengan alokasi awal program Rp335 triliun, karena terdapat penajaman anggaran dan perbedaan cakupan. Pemerintah perlu menyajikan rekonsiliasi perubahan pagu secara terbuka agar persentase penyerapan tidak tampak membaik hanya karena penyebutnya mengecil. Ukuran efisiensi yang lebih bermakna ialah biaya per porsi yang memenuhi standar gizi dan keamanan serta benar-benar diterima. Membagi total belanja dengan jumlah penerima pada akhir periode akan menyesatkan apabila lama pelayanan setiap penerima berbeda.

2.2.3 Kualitas Layanan dan Perbaikan Tata Kelola

Keamanan pangan menjadi persoalan paling mendasar karena program perbaikan gizi harus terlebih dahulu menjamin makanan aman dikonsumsi. BGN mencatat 85 kejadian terkait keamanan pangan pada Oktober 2025, kemudian turun menjadi 40 pada November dan 12 pada Desember. Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa risiko telah terkendali. Jumlah kejadian perlu dibandingkan dengan jumlah porsi yang dibagikan, banyaknya penerima terdampak, tingkat keparahan, dan konsistensi pelaporan. Pemerintah perlu mengumumkan hasil investigasi serta tindakan perbaikan secara terbuka agar kejadian serupa tidak berulang dan kepercayaan keluarga terhadap MBG tetap terjaga.

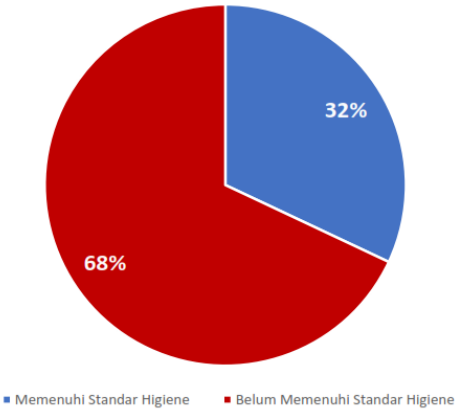

Gambar 14. SPPG Menurut Pemenuhan Standar Higiene Sanitasi Januari 2026
Sumber: Badan Gizi Nasional

Kesiapan dapur menunjukkan bahwa pertumbuhan jaringan pelayanan belum selalu diikuti kepatuhan terhadap standar dasar. Pada Januari 2026, BGN melaporkan baru sekitar 32% SPPG yang memenuhi standar higiene sanitasi. Selanjutnya, pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara

1.999 dapur yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kedua angka tersebut memiliki tanggal dan definisi berbeda sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menghitung perkembangan tingkat kepatuhan. Namun, temuan ini memperlihatkan perlunya pemeriksaan kelayakan sebelum dapur beroperasi. Air bersih, penyimpanan bahan, kebersihan pekerja, pengendalian suhu, dan waktu pengiriman harus menjadi bagian pemeriksaan rutin, bukan sekadar kelengkapan administratif.

Masalah tata kelola juga muncul dalam hubungan antara yayasan dan mitra penyelenggara. Pada 2 Oktober 2026, BGN mengungkap adanya laporan sebagian yayasan meminta potongan Rp1.500–Rp2.000 per porsi tanpa kontribusi yang sepadan terhadap pelayanan. Dibandingkan alokasi rata-rata Rp15.000 per penerima per hari yang dijelaskan BGN, potongan tersebut setara sekitar 10–13,3% dari keseluruhan biaya layanan. Angka ini merupakan ilustrasi besarnya potongan pada kasus yang dilaporkan, bukan perkiraan kebocoran nasional. Persoalannya serius karena dana yang semestinya mendukung makanan, operasional, dan fasilitas dapat berkurang sebelum manfaatnya diterima masyarakat. Hubungan kerja sama harus transparan, dengan pembayaran yang sesuai pekerjaan nyata dan mekanisme pengaduan yang melindungi pelapor.

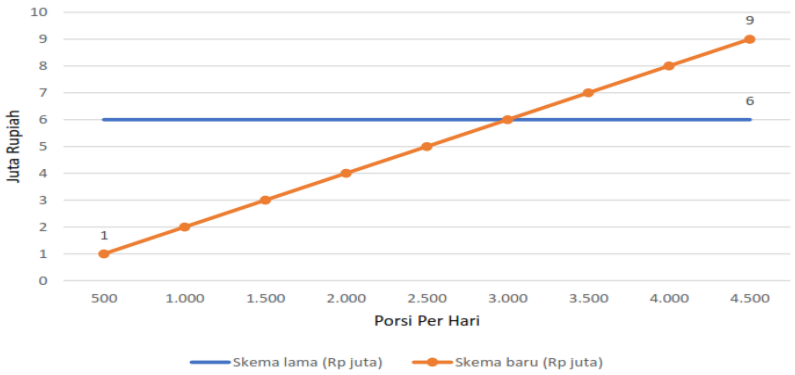

Gambar 15. Perbandingan Skema Insentif SPPG 6 Juta/Hari dan Rp 2.000 /Porsi
Sumber: Dokumentasi Penulis

Perubahan insentif SPPG dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi merupakan langkah untuk mengaitkan pembayaran dengan volume layanan. Secara sederhana, kedua skema memberikan nilai yang sama pada 3.000 porsi sehari, sedangkan pada 1.500 porsi insentif baru menjadi Rp3 juta. Perhitungan ini hanya ilustrasi, bukan besaran penghematan yang telah terealisasi. Skema tersebut berpotensi mengurangi pembayaran fasilitas yang kurang digunakan, tetapi juga menimbulkan risiko pembesaran laporan jumlah porsi apabila pengawasan lemah. Pemerintah perlu mencocokkan data produksi dengan penerimaan makanan di

sekolah atau lokasi layanan. Pada saat yang sama, dapur di wilayah terpencil perlu dinilai berdasarkan biaya pelayanan setempat agar daerah dengan penerima sedikit tidak kehilangan akses.

Dampak gizi MBG harus dibuktikan melalui perubahan kondisi penerima, bukan disimpulkan dari jumlah makanan yang dibagikan. Angka stunting nasional sebesar 19,8% yang diumumkan Kementerian Kesehatan merupakan hasil SSGI 2024, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti keberhasilan MBG yang berjalan setelah periode pengukuran tersebut. Untuk anak sekolah, evaluasi dapat mencakup keragaman konsumsi, anemia, status gizi menurut usia, dan kehadiran belajar. Untuk ibu hamil dan balita, indikator perlu disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tersebut. Pengukuran sebelum dan sesudah menerima layanan, disertai kelompok pembanding yang sepadan, diperlukan untuk memisahkan pengaruh MBG dari perubahan pendapatan keluarga, layanan kesehatan, sanitasi, dan program lain.

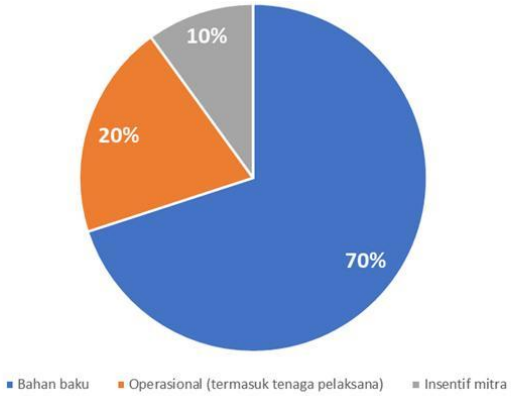

Gambar 16. Komposisi Pengunaan Dana MBG (%)
Sumber: Badan Gizi Nasional

MBG juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah melalui pembelian bahan makanan dan penciptaan pekerjaan. Pada awal 2026, BGN menjelaskan komposisi penggunaan dana sekitar 70% untuk bahan baku, 20% untuk operasional termasuk tenaga pelaksana, dan 10% untuk insentif mitra. Komposisi yang disampaikan tersebut menunjukkan potensi permintaan bagi petani, peternak, nelayan, serta usaha pangan, tetapi belum membuktikan proporsi belanja yang benar-benar diterima pemasok lokal. Manfaat ekonomi akan lebih besar apabila pengadaan terbuka, pembayaran tepat waktu, dan produsen kecil mampu memenuhi standar mutu. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan di daerah yang pasokannya terbatas agar tambahan permintaan MBG tidak justru membebani konsumen lain.

2.2.4 Isu-Isu Strategis Program MBG Selama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas nasional dengan alokasi anggaran besar dan cakupan penerima yang terus meningkat. Namun, percepatan ekspansi program belum sepenuhnya diimbangi kesiapan infrastruktur, kualitas pelayanan, efektivitas pengawasan, dan akuntabilitas anggaran. Berbagai persoalan yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara ambisi kebijakan dan kapasitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi MBG perlu diarahkan pada pembenahan delapan isu strategis yang menjadi penentu efektivitas, keberlanjutan fiskal, dan kualitas manfaat program bagi masyarakat, yakni sebagai berikut:

Keamanan pangan dan risiko keracunan. Berulangnya kasus keracunan makanan dalampelaksanaan MBG menunjukkan lemahnya pengawasan keamanan pangan, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Persoalan ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan mencerminkan kelemahan tata kelola dan pengendalian mutu program. Ekspansi penerima yang terlalu cepat tanpa kesiapan standar keamanan pangan justru meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan berlapis, audit keamanan pangan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi tidak boleh justru menimbulkan risiko kesehatan baru bagi penerimanya.

Kelayakan dapur dan kapasitas pelayanan. Penghentian operasional 1.276 SPPG terkait persyaratan higiene dan sanitasi menunjukkan ketimpangan antara percepatan ekspansi program dan kesiapan infrastruktur pelayanan. Orientasi pencapaian target jumlah dapur dan penerima masih lebih dominan dibandingkan jaminan kualitas layanan. Persoalan kapasitas produksi, tenaga terlatih, fasilitas penyimpanan, dan distribusi belum sepenuhnya terstandardisasi. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari ekspansi berbasis kuantitas menjadi pengembangan berbasis kesiapan dan kualitas pelayanan, sehingga penambahan dapur hanya dilakukan setelah seluruh persyaratan teknis terpenuhi.

Kualitas menu, kecukupan gizi, dan porsi. Persoalan mutu bahan pangan, ketidaksesuaian porsi, serta penggunaan makanan ultra-proses menunjukkan MBG masih berisiko terjebak pada pendekatan distribusi makanan, bukan pemenuhan kebutuhan gizi. Jumlah paket tidak dapat menjadi indikator keberhasilan apabila kandungan protein, kalori, dan kualitas bahan belum memenuhi kebutuhan penerima. Tekanan efisiensi biaya juga berpotensi menurunkan kualitas bahan dan mengurangi porsi demi mempertahankan keuntungan penyedia. Pemerintah perlu memperketat standar gizi berdasarkan usia, pengawasan bahan baku, dan evaluasi konsumsi aktual, sehingga keberhasilan MBG diukur dari perbaikan status gizi, bukan sekadar jumlah makanan yang didistribusikan.

Ketepatan sasaran dan pemerataan manfaat. Hingga Agustus 2026, penerima MBG mencapai 56,99 juta dari target 74,56 juta, menunjukkan masih adanya kesenjangan cakupan pelayanan. Persoalannya bukan hanya keterbatasan jumlah penerima, tetapi juga ketimpangan akses antarwilayah dan belum optimalnya

prioritas kelompok rentan. Pendekatan pemerataan administratif berisiko mengabaikan perbedaan kerentanan ekonomi, masalah gizi, dan akses pangan. Pemerintah perlu memperkuat basis data penerima dan memprioritaskan kelompok dengan risiko kekurangan gizi terbesar agar keterbatasan fiskal dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal.

Efisiensi anggaran dan pengukuran dampak. Realisasi anggaran MBG sebesar Rp51,5 triliun pada 2025 dan Rp153,2 triliun hingga September 2026 menunjukkan peningkatan belanja yang signifikan, tetapi belum otomatis mencerminkan keberhasilan program. Besarnya anggaran juga menimbulkan biaya peluang fiskal karena bersaing dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas biaya dan manfaat ekonomi secara berkala, termasuk biaya per penerima, kualitas layanan, dan perubahan status gizi. Setiap rupiah belanja MBG harus dipertanggungjawabkan berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran.

Transparansi kemitraan dan risiko kebocoran anggaran. Temuan Ombudsman mengenai ketidaktransparanan penetapan yayasan dan mitra SPPG menunjukkan kerentanan tata kelola MBG. Besarnya anggaran dan luasnya jaringan penyedia membuka risiko konflik kepentingan, transaksi afiliasi, penggelembungan biaya, hingga praktik pencarian rente. Pemerintah perlu membuka informasi kepemilikan mitra, mekanisme seleksi, struktur biaya, serta hasil audit secara berkala. MBG tidak boleh berkembang menjadi instrumen distribusi keuntungan kepada kelompok tertentu dengan menggunakan anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi perbaikan gizi masyarakat.

Desain insentif dan risiko manipulasi porsi. Perubahan insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026 berpotensi memperbaiki proporsionalitas pembayaran, tetapi juga menciptakan insentif untuk mengejar volume dibandingkan kualitas. Tanpa verifikasi yang kuat, terdapat risiko penggelembungan klaim, ketidaksesuaian jumlah penerima, dan penurunan kualitas bahan untuk meningkatkan keuntungan. Pemerintah perlu menerapkan pembayaran berbasis kinerja yang mempertimbangkan jumlah porsi, standar gizi, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi. Desain insentif harus mendorong kualitas pelayanan, bukan sekadar peningkatan produksi makanan.

Koordinasi kelembagaan dan akuntabilitas. Kompleksitas pelaksanaan MBG yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, sekolah, yayasan, dan SPPG menunjukkan masih lemahnya koordinasi dan pembagian kewenangan. Tambahan beban administrasi guru, keterlambatan pembayaran pekerja, serta lemahnya mekanisme pengaduan mencerminkan belum optimalnya pengendalian program. Fragmentasi kewenangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dan memperlambat penanganan penyimpangan. Pemerintah perlu membangun pengawasan terintegrasi, memperjelas akuntabilitas kelembagaan, dan memperkuat pengawasan independen agar besarnya anggaran MBG sejalan dengan kualitas pelayanan serta manfaat yang diterima masyarakat.

2.3 Kinerja Program Koperasi Desa/Kota Merah Putih (KDKMP)

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai agenda strategis pemerintahan Prabowo yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa, memperluas akses pembiayaan, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Secara konseptual, program ini berpotensi memperbaiki struktur ekonomi perdesaan yang selama ini menghadapi persoalan keterbatasan modal, tingginya biaya distribusi, lemahnya posisi tawar produsen, dan ketergantungan terhadap perantara perdagangan. Namun, pembentukan koperasi secara masif dalam waktu singkat juga menghadirkan risiko ketidaksiapan kelembagaan, rendahnya kelayakan usaha, serta potensi beban keuangan pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja KDKMP perlu diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu capaian pembentukan dan operasional, efektivitas pembiayaan dan dampak ekonomi, serta tata kelola dan keberlanjutan usaha.

2.3.1 Capaian Pembentukan KDKMP

Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menunjukkan capaian administratif yang signifikan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan operasional. Hingga 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 koperasi dilaporkan telah berbadan hukum, sementara 60.854 koperasi atau sekitar 73,0% telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Capaian tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah melakukan mobilisasi kelembagaan ekonomi desa secara masif dalam waktu relatif singkat.

Tabel 9. Capaian Pembentukan dan Operasional KDKMP

Indikator	Realisasi Per Oktober 2026
Koperasi berbadan hukum	83.363
Memiliki akun SIMKOPDES	79.733
Memiliki NIB	60.854
Koperasi beroperasi	10.000
Beroperasi optimal	3.300
Pembangunan fisik selesai (titik)	28.240
Pembangunan dalam proses (titik)	7.392

Sumber: Kemenko Pangan

Namun, masih terdapat sekitar 22.509 koperasi yang belum memiliki NIB, sehingga kesiapan legalitas usaha belum sepenuhnya mengikuti percepatan pembentukan kelembagaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan

program masih lebih dominan pada aspek administratif dibandingkan pengembangan aktivitas ekonomi produktif. Pembentukan koperasi seharusnya menjadi tahap awal penguatan ekonomi desa, bukan indikator akhir keberhasilan kebijakan.

Kesenjangan antara jumlah koperasi terbentuk dan koperasi yang beroperasi menunjukkan persoalan serius dalam kesiapan implementasi. Berdasarkan laporan pemerintah pada Agustus 2026, sekitar 10.000 koperasi telah beroperasi, tetapi hanya 3.300 koperasi yang dinyatakan beroperasi secara optimal. Artinya, sekitar 33% dari koperasi yang dilaporkan beroperasi telah mencapai kategori optimal menurut pelaporan tersebut, sementara sebagian besar masih menghadapi keterbatasan kapasitas usaha.

Meskipun data operasional tersebut berasal dari periode berbeda dengan data pembentukan Oktober 2026, kesenjangan ini mengindikasikan bahwa percepatan legalisasi belum sepenuhnya diikuti kesiapan modal kerja, manajemen, jaringan pemasok, dan akses pasar. Pemerintah perlu memperjelas indikator koperasi aktif dan beroperasi optimal agar capaian program tidak hanya didasarkan pada status kelembagaan, tetapi juga aktivitas transaksi, pendapatan usaha, serta manfaat ekonomi bagi anggota.

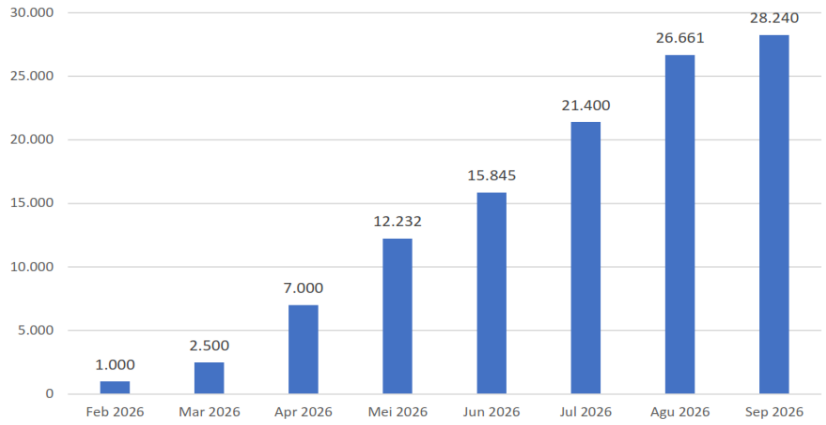

Gambar 17. Jumlah Titik Pembangunan Fisik KDMP Sepanjang 2026 (Titik)
Sumber: Kemenkop

Percepatan pembangunan infrastruktur koperasi belum menjamin terbentuknya kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Hingga 14 Oktober 2026, pemerintah melaporkan 28.240 titik pembangunan fisik KDKMP telah selesai, sedangkan 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Namun, pembangunan gerai, gudang, dan fasilitas usaha tidak otomatis menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi apabila tidak didukung permintaan pasar, ketersediaan pasokan, dan kemampuan pengelolaan usaha. Pendekatan

pembangunan fisik yang terlalu berorientasi pada pencapaian target berisiko menciptakan aset menganggur, biaya pemeliharaan tinggi, dan rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas. Persoalan ini semakin penting karena karakteristik ekonomi setiap desa berbeda, baik dari sisi komoditas unggulan, daya beli, kepadatan penduduk, maupun akses distribusi. Karena itu, pembangunan infrastruktur koperasi harus didasarkan pada studi kelayakan ekonomi dan kebutuhan pasar, bukan sekadar pemerataan bangunan secara administratif.

2.3.2. Hambatan Operasionalsasi KDKMP

Keseragaman model bisnis KDKMP berpotensi mengabaikan perbedaan struktur ekonomi dan keunggulan komparatif antarwilayah. Desa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan memiliki kebutuhan usaha, struktur biaya, serta potensi pasar yang berbeda sehingga tidak seluruhnya sesuai dengan model pelayanan koperasi yang seragam. Koperasi di sentra pertanian, misalnya, lebih membutuhkan fasilitas pengadaan sarana produksi, pergudangan, pengolahan hasil, dan akses pemasaran, sedangkan wilayah perkotaan cenderung membutuhkan layanan distribusi, perdagangan, dan pembiayaan usaha.

Tanpa pemetaan potensi ekonomi lokal, investasi koperasi berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan anggota dan menghasilkan tingkat pengembalian usaha yang rendah. Pemerintah perlu mengembangkan model bisnis berbasis potensi wilayah agar KDKMP mampu memperkuat rantai nilai ekonomi lokal, bukan sekadar menjadi jaringan gerai distribusi barang yang bergantung pada pasokan dan penugasan pemerintah.

Kesiapan sumber daya manusia dan kualitas tata kelola menjadi faktor penentu yang belum sepenuhnya sejalan dengan percepatan pembentukan koperasi. Pengelolaan koperasi membutuhkan kompetensi manajemen keuangan, pengadaan barang, pengendalian persediaan, pemasaran, serta pengelolaan risiko usaha yang tidak dapat dibangun secara instan. Pembentukan kelembagaan secara masif berpotensi menghasilkan koperasi dengan pengurus yang belum memiliki pengalaman bisnis memadai, sehingga meningkatkan risiko inefisiensi operasional, kesalahan pengelolaan keuangan, dan lemahnya akuntabilitas.

Persoalan tersebut semakin kompleks apabila penetapan pengurus lebih dipengaruhi pendekatan administratif dibandingkan kompetensi profesional dan partisipasi anggota. Karena itu, pemerintah perlu memastikan penguatan kapasitas manajemen, pendampingan usaha, sistem akuntansi digital, serta pengawasan berbasis kinerja menjadi bagian integral dari operasionalisasi KDKMP. Koperasi harus dibangun sebagai entitas bisnis yang profesional dan demokratis, bukan sekadar perpanjangan tangan pelaksanaan program pemerintah.

Keberhasilan operasional KDKMP harus diukur dari kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan semata-mata jumlah koperasi yang terbentuk. Indikator evaluasi perlu mencakup jumlah koperasi yang benar-benar aktif, volume transaksi, pertumbuhan omzet, partisipasi anggota, pemanfaatan aset, serta kemampuan menghasilkan surplus usaha yang

berkelanjutan. Selain itu, perlu diukur kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan petani dan nelayan, perluasan akses pasar UMKM, penurunan biaya distribusi, serta penciptaan lapangan kerja produktif.

Tanpa indikator tersebut, pemerintah berisiko menghadapi kesenjangan antara keberhasilan administratif dan dampak ekonomi yang sesungguhnya. Tantangan utama KDKMP bukan lagi sekadar memperbanyak jumlah koperasi, tetapi memastikan koperasi yang telah dibentuk mampu beroperasi secara mandiri, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

2.3.3 Kinerja Pembiayaan dan Dampak Ekonomi KDKMP

Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu aspek paling krusial dalam menentukan keberhasilan program karena melibatkan kebutuhan modal besar, dukungan perbankan, dan potensi risiko terhadap keuangan negara. Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2026, skema pembiayaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan menetapkan plafon maksimal Rp3 miliar per unit, dengan bunga 6% per tahun dan tenor 72 bulan.

Secara ilustratif, apabila 80.000 unit memperoleh pembiayaan maksimal Rp3 miliar, kebutuhan pendanaan dapat mencapai Rp240 triliun, belum termasuk kebutuhan modal kerja dan biaya operasional. Angka tersebut merupakan simulasi potensi pembiayaan, bukan realisasi penyaluran. Skala kebutuhan modal yang besar ini menuntut disiplin investasi dan pengujian kelayakan usaha agar pembangunan koperasi tidak justru menghasilkan aset yang kurang produktif serta kewajiban keuangan yang sulit dipenuhi.

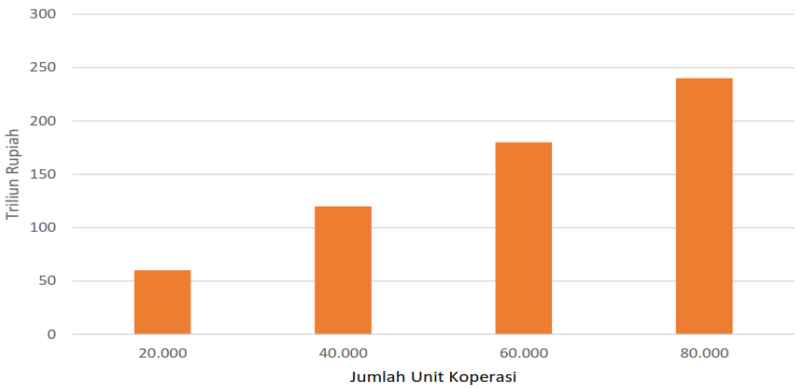

Gambar 18. Simulasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Jumlah Unit (Triliun Rupiah)
Sumber: Dokumentasi Penulis

Persoalan mendasar dalam pembiayaan KDKMP adalah ketidakseimbangan antara percepatan pembangunan infrastruktur dan kemampuan koperasi menghasilkan pendapatan. Hingga 14 Oktober 2026, pemerintah melaporkan 28.240 titik pembangunan fisik telah selesai dan 7.392 titik masih dalam proses pembangunan. Namun, penyelesaian fasilitas fisik belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan investasi apabila koperasi belum memiliki transaksi usaha, jaringan pemasok, dan permintaan pasar yang memadai. Investasi pada bangunan, gudang, dan fasilitas distribusi berpotensi menciptakan biaya tetap yang tinggi, sementara pendapatan koperasi belum tentu mampu menutup biaya operasional dan kewajiban pembiayaan.

Tanpa studi kelayakan yang mempertimbangkan potensi pasar, proyeksi arus kas, dan titik impas usaha, ekspansi KDKMP berisiko menciptakan kapasitas berlebih dan aset menganggur. Pemerintah perlu memastikan setiap investasi fisik memiliki dasar kelayakan ekonomi yang terukur, bukan semata-mata didorong oleh target pembangunan.

Keterlibatan perbankan BUMN dalam pembiayaan KDKMP juga perlu dicermati karena berpotensi meningkatkan risiko kredit apabila keputusan pembiayaan lebih didasarkan pada penugasan program dibandingkan kelayakan usaha. Skema pembayaran yang melibatkan DAU, DBH, maupun Dana Desa sesuai ketentuan dapat memberikan kepastian pembayaran kepada kreditur, tetapi sekaligus menimbulkan risiko pengalihan beban ketika kinerja usaha koperasi tidak sesuai proyeksi.

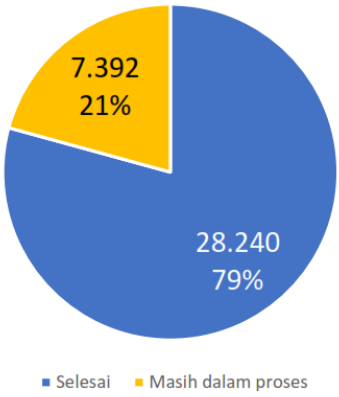

Gambar 19. Titik Pembangunan Fisik KDMP Per 14 Oktober 2026
Sumber: Kemenkop

Kondisi ini berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal daerah dan desa untuk membiayai pelayanan publik serta kebutuhan pembangunan lainnya. Karena itu, pemerintah perlu memisahkan secara transparan pembiayaan pembangunan fisik,

modal kerja, dan dukungan fiskal agar eksposur risiko masing-masing dapat diukur. Pengawasan juga harus memastikan risiko usaha tidak secara sistematis dialihkan kepada keuangan publik, sementara manfaat ekonominya belum terbukti.

Dampak ekonomi KDKMP terhadap penguatan rantai pasok pangan mulai terlihat, tetapi kontribusinya masih relatif terbatas. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, hingga 19 Juli 2026 penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara nasional mencapai 493.800 ton, dengan 9.440 ton disalurkan melalui KDKMP atau sekitar 1,91% dari total distribusi. Angka tersebut menunjukkan koperasi mulai berperan sebagai saluran distribusi pangan, tetapi belum cukup untuk membuktikan peningkatan efisiensi pasar secara signifikan.

Pengembangan KDKMP seharusnya diarahkan untuk memperkuat posisi tawar petani, mengurangi biaya transaksi, memperpendek rantai pemasaran, serta meningkatkan harga yang diterima produsen tanpa membebani konsumen. Tanpa penguatan fungsi produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pemasaran, koperasi berisiko hanya menjadi perantara distribusi tambahan yang belum tentu lebih efisien dibandingkan jaringan perdagangan yang sudah ada.

Dari sisi ekonomi lokal, KDKMP berpotensi menciptakan efek pengganda melalui peningkatan permintaan produk desa, perluasan pasar UMKM, dan penciptaan kesempatan kerja. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kemampuan koperasi mengintegrasikan pelaku usaha lokal ke dalam rantai pasok, bukan sekadar menjual produk yang berasal dari pemasok besar di luar wilayah. Apabila sebagian besar barang dagangan diperoleh dari luar desa, peningkatan omzet koperasi belum tentu menghasilkan peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat setempat.

Selain itu, dukungan pembiayaan dan fasilitas pemerintah yang tidak proporsional berpotensi menciptakan persaingan tidak seimbang dengan warung tradisional, BUMDes, dan koperasi yang telah beroperasi. Karena itu, evaluasi dampak ekonomi harus mencakup peningkatan pendapatan anggota, proporsi pengadaan produk lokal, penciptaan lapangan kerja bersih, serta perubahan biaya distribusi dan harga pangan. KDKMP seharusnya memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar memindahkan transaksi dari pelaku usaha yang ada.

Keberlanjutan pembiayaan dan dampak ekonomi KDKMP pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi membangun usaha yang layak secara komersial dan memberikan manfaat ekonomi yang terukur. Pemerintah perlu menerapkan evaluasi berbasis debt service coverage ratio (DSCR), arus kas operasional, tingkat pemanfaatan aset, pertumbuhan transaksi anggota, dan kemampuan menghasilkan surplus usaha.

Pengawasan juga perlu membedakan keberhasilan pembangunan fisik, kinerja pembiayaan, dan dampak ekonomi agar peningkatan jumlah gerai tidak disalahartikan sebagai peningkatan kesejahteraan. Hingga saat ini, data nasional yang memadai mengenai omzet, laba usaha, kredit bermasalah, dan peningkatan pendapatan anggota KDKMP masih perlu dipublikasikan secara lebih terbuka untuk memungkinkan evaluasi yang objektif.

2.3.4 Isu-Isu Strategis Program KDKMP Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Persoalan mendasar KDKMP bukan terletak pada ambisi pembentukan puluhan ribu koperasi, melainkan pada kesenjangan antara percepatan kelembagaan, kesiapan operasional, dan kelayakan ekonomi. Pemerintah perlu menghindari pendekatan yang menempatkan pembangunan fisik dan penyaluran pembiayaan sebagai indikator utama keberhasilan.

Tanpa model bisnis yang layak, tata kelola profesional, serta keterlibatan aktif anggota, KDKMP berisiko menjadi beban fiskal jangka panjang dan menciptakan aset ekonomi yang tidak produktif. Keberhasilan program harus diukur dari kemampuannya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, memperkuat UMKM, menurunkan biaya distribusi, serta membangun koperasi yang mampu bertahan tanpa ketergantungan permanen terhadap dukungan pemerintah. Beberapa isu strategis Program KDKMP selama 2 tahun pemerintahan Prabowo.

Tata kelola kelembagaan menjadi tantangan mendasar dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini terkait pembentukan koperasi dilakukan secara masif dalam waktu relatif singkat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 83.363 koperasi dilaporkan telah berbadan hukum, tetapi percepatan tersebut belum sepenuhnya diikuti kesiapan kelembagaan, profesionalisme pengurus, dan sistem pengawasan yang memadai.

Pembentukan koperasi melalui pendekatan administratif yang dominan berisiko melemahkan prinsip dasar koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis kepemilikan dan partisipasi anggota. Persoalan semakin kompleks apabila penetapan pengurus lebih dipengaruhi kepentingan birokrasi maupun politik lokal dibandingkan kompetensi manajerial dan kebutuhan usaha. Pemerintah perlu memastikan tata kelola KDKMP berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar koperasi tidak berkembang menjadi perpanjangan tangan birokrasi yang kehilangan kemandirian usaha.

Besarnya kebutuhan pembiayaan dan pembangunan infrastruktur KDKMP. Kuantitas pembiayaan meningkatkan risiko konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan inefisiensi pengadaan. Skema pembiayaan pembangunan fisik dengan plafon maksimal Rp3 miliar per unit berpotensi melibatkan transaksi bernilai sangat besar, sehingga memerlukan pengawasan ketat terhadap proses penetapan lokasi, pemilihan kontraktor, kualitas bangunan, dan penggunaan anggaran.

Keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara dalam pembangunan fasilitas KDKMP, yang berada dalam ekosistem Danantara, menuntut transparansi lebih kuat untuk memastikan pengelolaan investasi negara tidak menimbulkan konsentrasi kewenangan dan risiko moral hazard. Tanpa keterbukaan kontrak, audit independen, dan mekanisme pengawasan publik, percepatan pembangunan koperasi berisiko lebih menguntungkan pelaksana proyek dibandingkan masyarakat desa sebagai penerima manfaat. Keberhasilan program harus dinilai dari produktivitas aset dan manfaat ekonomi yang dihasilkan, bukan besarnya nilai pengadaan maupun jumlah fasilitas yang dibangun.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi persoalan struktural yang dapat menghambat keberlanjutan operasional KDKMP. Berdasarkan laporan pemerintah pada Agustus 2026, sekitar 10.000 koperasi telah beroperasi, tetapi hanya 3.300 yang dikategorikan beroperasi optimal, menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan kelembagaan dan kemampuan menjalankan kegiatan usaha. Pengelolaan koperasi membutuhkan kompetensi dalam manajemen keuangan, pengendalian persediaan, pemasaran, pengelolaan risiko, dan penyusunan model bisnis yang tidak dapat dibangun secara instan.

Tanpa pendampingan profesional, koperasi berisiko menghadapi rendahnya produktivitas, lemahnya pengendalian biaya, serta ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembiayaan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pelatihan dan pendampingan berbasis kebutuhan usaha, disertai evaluasi kinerja pengurus secara berkala agar koperasi mampu berkembang menjadi entitas ekonomi yang mandiri dan kompetitif.

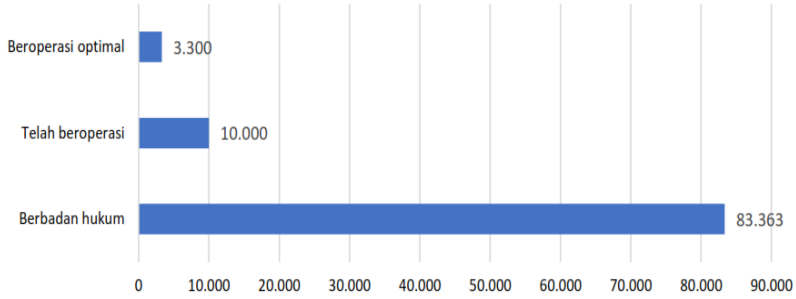

Gambar 20. Koperasi Berbadan Hukum, Beroperasi, dan Optimal
Sumber: Kemenkop

Risiko distorsi pasar dan persaingan usaha tidak sehat juga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan KDKMP. Dukungan pembiayaan, fasilitas usaha, dan akses distribusi dari pemerintah berpotensi menciptakan keunggulan yang tidak seimbang dibandingkan warung tradisional, UMKM, BUMDes, dan koperasi yang telah beroperasi. Apabila KDKMP hanya mengambil alih aktivitas perdagangan yang sebelumnya dijalankan pelaku usaha lokal, peningkatan omzet koperasi tidak otomatis mencerminkan tambahan aktivitas ekonomi maupun penciptaan nilai tambah baru.

Kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan efek penggeseran usaha (crowding-out) dan melemahkan ekosistem ekonomi desa. Karena itu, pengembangan KDKMP perlu diarahkan pada penguatan kemitraan dengan pelaku usaha eksisting, integrasi rantai pasok lokal, serta penyediaan layanan ekonomi yang belum mampu dipenuhi pasar. Koperasi seharusnya menjadi instrumen perluasan kesempatan usaha dan peningkatan efisiensi ekonomi, bukan menciptakan persaingan yang menggeser sumber pendapatan masyarakat desa.

Keberlanjutan usaha KDKMP juga menghadapi risiko ketergantungan terhadap pembiayaan, fasilitas, dan penugasan pemerintah. Model bisnis yang bertumpu pada distribusi barang bersubsidi atau program pemerintah berpotensi menciptakan pendapatan yang tidak stabil ketika terjadi perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, maupun penyesuaian skema penyaluran. Persoalan ini semakin serius apabila koperasi memiliki kewajiban pembiayaan jangka panjang, sementara kemampuan menghasilkan arus kas operasional masih terbatas.

Ketergantungan tersebut dapat menimbulkan risiko moral hazard ketika pengelola mengasumsikan pemerintah akan selalu menanggung kerugian atau memberikan dukungan tambahan. Pemerintah perlu memastikan setiap koperasi memiliki model bisnis yang layak, diversifikasi sumber pendapatan, partisipasi modal anggota, serta kemampuan memenuhi kewajiban keuangan secara mandiri. Tanpa fondasi tersebut, KDKMP berisiko menjadi beban fiskal berulang dan kehilangan karakter dasarnya sebagai lembaga ekonomi milik anggota.

Koordinasi kelembagaan dan sistem evaluasi menjadi faktor penentu keberhasilan KDKMP dalam jangka panjang. Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan BUMN, PT Agrinas, dan berbagai kementerian dan lembaga berpotensi menimbulkan fragmentasi kewenangan apabila tidak disertai pembagian tanggung jawab dan mekanisme pengawasan yang jelas. Pemerintah perlu membangun sistem pemantauan terintegrasi yang mencakup legalitas, kinerja operasional, realisasi pembiayaan, kesehatan keuangan, partisipasi anggota, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat desa.

Evaluasi juga harus dilakukan secara independen dengan indikator yang terukur, seperti pertumbuhan omzet, surplus hasil usaha, kemampuan pembayaran pinjaman, peningkatan pendapatan anggota, dan penciptaan lapangan kerja bersih. Keberhasilan KDKMP tidak boleh berhenti pada pembentukan puluhan ribu koperasi dan pembangunan fasilitas fisik, tetapi harus dibuktikan melalui kemampuan menciptakan nilai tambah ekonomi, memperkuat kelembagaan usaha masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan desa tanpa menimbulkan ketergantungan fiskal yang berkepanjangan.

2.4 Kinerja Program Swasembada Pangan dan Energi

Swasembada pangan dan energi merupakan dua agenda strategis pemerintahan Prabowo yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan impor, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap gejolak ekonomi global. Kedua agenda tersebut memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas makroekonomi, neraca perdagangan, ketahanan fiskal, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pencapaian swasembada tidak cukup dinilai dari peningkatan produksi domestik atau penurunan impor dalam jangka pendek, melainkan harus mempertimbangkan

produktivitas, efisiensi biaya, keberlanjutan sumber daya, serta kemampuan memenuhi kebutuhan nasional secara konsisten.

Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo, terdapat perbedaan mendasar antara kemajuan program dan pencapaian swasembada yang sesungguhnya. Oleh karena itu, evaluasi perlu membedakan capaian produksi, efektivitas kebijakan, ketergantungan impor, risiko fiskal, serta dampak ekonomi dan lingkungan. Evaluasi ini difokuskan pada enam aspek utama, capaian produksi dan kemandirian pangan, efektivitas intervensi pemerintah di sektor pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, kinerja produksi serta ketergantungan impor energi, efektivitas hilirisasi dan transisi energi, serta persoalan struktural dan keberlanjutan kedua program.

2.4.1 Capaian Produksi dan Kemandirian Pangan Nasional

Kinerja swasembada pangan menunjukkan perkembangan positif, terutama pada komoditas beras yang menjadi prioritas pemerintah. Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, sementara pemerintah melaporkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4,61 juta ton per 19 September 2026.

Peningkatan produksi dan penguatan cadangan tersebut merupakan capaian penting dalam menjaga ketersediaan pangan domestik dan mengurangi kebutuhan impor beras. Namun, keberhasilan swasembada tidak dapat disimpulkan hanya dari produksi satu tahun atau besarnya cadangan pemerintah. Produksi harus mampu memenuhi konsumsi nasional secara konsisten, termasuk ketika terjadi gangguan iklim, penurunan luas panen, dan perubahan harga input pertanian.

Data BPS memperlihatkan bahwa produksi padi pada Januari–Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling (GKG), sedangkan produksi jagung pipilan kering berkadar air 14% mencapai 11,86 juta ton. Angka ini menunjukkan kapasitas produksi pangan domestik yang besar, tetapi belum cukup untuk menilai keberhasilan swasembada secara menyeluruh.

Produksi padi harus dikonversi menjadi beras dengan faktor konversi yang sesuai, sementara kebutuhan jagung harus memperhitungkan konsumsi pangan, pakan ternak, dan industri. Ketersediaan pangan juga harus memperhitungkan stok awal, kehilangan pascapanen, kebutuhan benih, serta distribusi antarwilayah. Dengan demikian, surplus produksi nasional belum tentu berarti seluruh daerah memiliki akses pangan yang memadai.

Persoalan struktural sektor pangan tetap terletak pada produktivitas lahan, fragmentasi penguasaan lahan pertanian, kualitas irigasi, keterbatasan mekanisasi, dan tingginya biaya produksi. Peningkatan produksi yang terutama ditopang perluasan areal tanam dan intensifikasi penggunaan input belum tentu mencerminkan perbaikan produktivitas faktor total (total factor productivity).

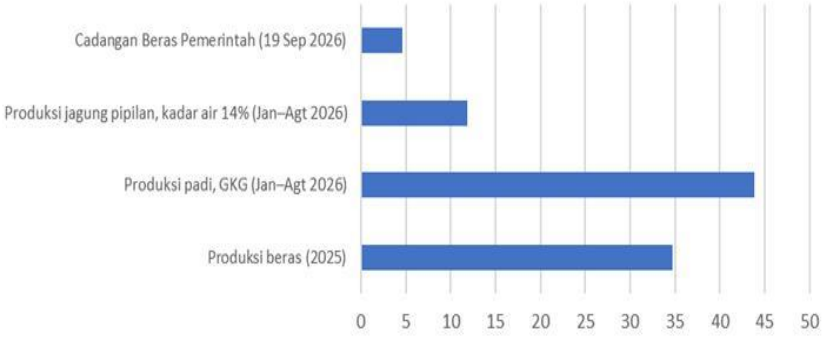

Gambar 21. Indikator Capaian Pangan (Juta Ton)
Sumber: BPS dan Sekretariat Negara. Data produksi 2026 bersifat kumulatif Januari–Agustus, bukan angka setahun penuh.

Ketergantungan pada pupuk bersubsidi dan dukungan harga juga berpotensi menimbulkan inefisiensi apabila tidak diikuti inovasi teknologi dan peningkatan hasil per hektare. Pemerintah perlu menggeser strategi dari sekadar mengejar volume produksi menuju peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan air dan pupuk, serta pengurangan kehilangan hasil panen. Swasembada yang berkelanjutan harus dibangun melalui penguatan daya saing produksi, bukan ketergantungan permanen terhadap intervensi anggaran.

2.4.2 Efektivitas Kebijakan Produksi, Harga, dan Cadangan Pangan

Kebijakan penguatan produksi dan cadangan pangan menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan domestik. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah memperkuat koordinasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah untuk periode 2026–2029. Kebijakan ini dapat memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memperbesar kemampuan pemerintah melakukan stabilisasi harga.

Namun, efektivitas pengadaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume pembelian, tetapi juga oleh ketepatan waktu penyerapan, kualitas gabah, biaya penyimpanan, dan kemampuan mendistribusikan beras ketika terjadi tekanan harga. Pengadaan yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan kapasitas penyimpanan dan kebutuhan pasar berpotensi meningkatkan biaya logistik, risiko penurunan mutu, serta beban pembiayaan Bulog.

Terdapat dilema kebijakan antara menjaga harga gabah yang menguntungkan petani dan mempertahankan harga beras yang terjangkau bagi konsumen. Harga pembelian pemerintah yang lebih tinggi dapat meningkatkan insentif produksi dan

pendapatan petani, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya pengadaan dan harga beras apabila tidak diikuti peningkatan produktivitas. Sebaliknya, kebijakan stabilisasi harga yang terlalu menekan harga produsen dapat melemahkan insentif investasi pertanian.

Untuk itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kedua kepentingan melalui peningkatan efisiensi rantai pasok, penguatan penggilingan, penyimpanan modern, dan penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana menurunkan biaya produksi dan distribusi, bukan hanya mengendalikan harga melalui intervensi pasar.

Keberhasilan kebijakan pangan juga perlu diukur dari efektivitas penggunaan anggaran. Belanja pupuk bersubsidi, pembangunan irigasi, mekanisasi, pengadaan cadangan, dan bantuan pangan harus dievaluasi berdasarkan tambahan produksi serta manfaat yang dihasilkan. Indikator yang diperlukan mencakup biaya subsidi per ton tambahan produksi, perubahan produktivitas per hektare, penurunan kehilangan pascapanen, serta perubahan pendapatan riil petani. Tanpa pengukuran tersebut, peningkatan anggaran berisiko hanya memperbesar biaya intervensi pemerintah tanpa menghasilkan perbaikan efisiensi sektor pertanian secara berkelanjutan.

2.4.3 Ketahanan Pangan, Diversifikasi, dan Kesejahteraan Petani

Capaian swasembada beras belum dapat disamakan dengan swasembada seluruh komoditas pangan strategis. Ketahanan pangan nasional juga ditentukan oleh ketersediaan kedelai, gula, daging, susu, dan komoditas lain yang memiliki struktur produksi serta tingkat ketergantungan impor berbeda. Ketika kebijakan terlalu terkonsentrasi pada beras, terdapat risiko ketidakseimbangan alokasi sumber daya pertanian dan kurangnya perhatian terhadap diversifikasi konsumsi serta produksi pangan. Pemerintah perlu membangun strategi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing komoditas, termasuk menilai apakah produksi domestik lebih efisien dibandingkan impor yang terkelola dengan baik.

Dari sisi kesejahteraan, peningkatan produksi pangan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani. Kenaikan produksi dapat menekan harga di tingkat produsen ketika panen melimpah, sementara biaya pupuk, tenaga kerja, sewa lahan, dan distribusi tetap tinggi.

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) perlu dilengkapi dengan pendapatan bersih usaha tani, produktivitas tenaga kerja, dan keuntungan per hektare. Kesejahteraan petani tidak cukup dinilai dari harga gabah yang meningkat apabila kenaikan tersebut juga disertai lonjakan biaya produksi. Reformasi rantai pasok, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan akses pengolahan dan pemasaran menjadi

faktor penting untuk memastikan manfaat swasembada benar-benar diterima produsen.

Ketahanan pangan juga semakin menghadapi risiko perubahan iklim, kekeringan, banjir, serta gangguan produksi akibat cuaca ekstrem. Ketergantungan pada beberapa wilayah sentra produksi menciptakan kerentanan ketika terjadi gangguan panen secara bersamaan. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur irigasi, sistem informasi iklim, asuransi pertanian, cadangan pangan regional, dan diversifikasi produksi. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan surplus dalam kondisi normal, tetapi juga dari kapasitas sistem pangan bertahan dan pulih ketika menghadapi guncangan.

2.4.4 Kinerja Produksi Migas dan Ketergantungan Impor Energi

Kinerja swasembada energi menunjukkan perbaikan pada produksi minyak, tetapi Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar antara kapasitas produksi domestik dan kebutuhan konsumsi nasional. Berdasarkan Kementerian ESDM, lifting minyak bumi pada 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari atau sekitar 100,05% dari target APBN. Capaian tersebut penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah menahan penurunan produksi dan memenuhi target lifting setelah periode panjang tekanan produksi.

Namun, pencapaian target APBN tidak dapat disamakan dengan swasembada minyak karena kebutuhan minyak dan BBM domestik masih jauh lebih besar daripada lifting minyak nasional. Pemerintah menargetkan lifting sebesar 610 ribu barel per hari pada 2026, meningkat sekitar 0,8% dari realisasi 2025. Kenaikan yang relatif terbatas tersebut menunjukkan bahwa percepatan produksi migas masih menghadapi persoalan struktural, terutama penurunan alamiah produksi lapangan tua, keterbatasan eksplorasi, serta kebutuhan investasi teknologi dan infrastruktur hulu migas.

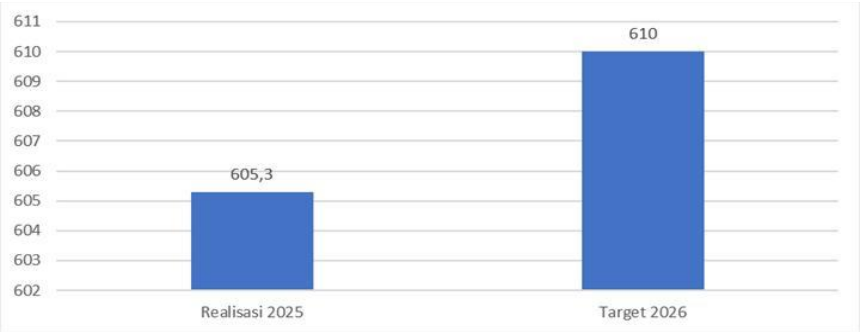

Gambar 22. Lifting Minyak Bumi Realisasi 2025 dan Target 2026 (Ribu Barel/Hari)
Sumber: Kementerian ESDM

Ketergantungan impor energi masih menjadi persoalan mendasar yang membatasi pencapaian swasembada. Kementerian ESDM menyebut kebutuhan LPG nasional sekitar 8,3 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 1,6 juta ton, sehingga kebutuhan impor berada di kisaran 7 juta ton. Berdasarkan perbandingan kebutuhan dan produksi tersebut, ketergantungan impor LPG mencapai sekitar 80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa swasembada energi tidak dapat hanya difokuskan pada peningkatan lifting minyak atau pengembangan biodiesel, tetapi harus mencakup diversifikasi energi rumah tangga, perluasan jaringan gas, penguatan industri pengolahan gas, serta efisiensi konsumsi energi. Ketergantungan impor yang tinggi membuat perekonomian rentan terhadap kenaikan harga energi global, pelemahan rupiah, dan gangguan pasokan internasional.

Tabel 10. Indikator Capaian Kinerja Ekonomi Nasional

Indikator	Realisasi/target	Periode
Lifting minyak	605,3 ribu barel/hari	Realisasi 2025
Target lifting minyak	610 ribu barel/hari	Target 2026
Lifting gas	951,8 ribu BOE/hari	Realisasi 2025
Kebutuhan LPG	±8,3 juta ton/tahun	Pernyataan ESDM 2026
Produksi LPG domestik	±1,6 juta ton/tahun	Pernyataan ESDM 2026
Bauran EBT	15,75%	Realisasi 2025

Sumber: Kementerian ESDM. BOE adalah barel setara minyak. Angka lifting minyak dan gas menggunakan satuan serta cakupan yang berbeda.

Di sisi lain, gas bumi memiliki posisi yang relatif lebih kuat karena produksi domestik masih mampu memenuhi kebutuhan gas nasional menurut laporan ESDM tahun 2025. Dari total pemanfaatan sekitar 5.600 BBTUD, sebanyak 3.908 BBTUD atau 69% digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan sekitar 30% diekspor. Namun, kecukupan gas secara agregat tidak otomatis berarti seluruh industri dan rumah tangga memiliki akses gas yang memadai. Keterbatasan jaringan transmisi, distribusi, dan infrastruktur penyimpanan masih berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara lokasi produksi dan pusat konsumsi. Karena itu, pengembangan infrastruktur gas perlu menjadi prioritas agar sumber daya domestik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing industri, menggantikan sebagian penggunaan LPG, dan menurunkan biaya energi.

Gambar 23. Pemanfaatan Gas Bumi Domestik dan Ekspor 2025
Sumber: Kementerian ESDM

2.4.5 Efektivitas Biodiesel, Energi Terbarukan, dan Hilirisasi Energi

Program biodiesel menjadi salah satu capaian penting dalam upaya mengurangi ketergantungan impor solar. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal EBTKE, realisasi pemanfaatan biodiesel pada 2025 mencapai 14,9 juta kiloliter melalui kebijakan B40, meningkat dari sekitar 13,2 juta kiloliter pada 2024. Pemerintah melaporkan estimasi penghematan devisa sebesar Rp132,81 triliun dan tambahan nilai pengolahan CPO sebesar Rp20,84 triliun. Namun, estimasi penghematan devisa tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai penghematan bersih perekonomian karena perlu memperhitungkan biaya insentif biodiesel, harga bahan baku sawit, dampak terhadap harga minyak goreng, serta biaya produksi dan distribusi. Evaluasi yang lebih komprehensif harus menghitung manfaat ekonomi bersih, bukan hanya nilai substitusi impor secara bruto.

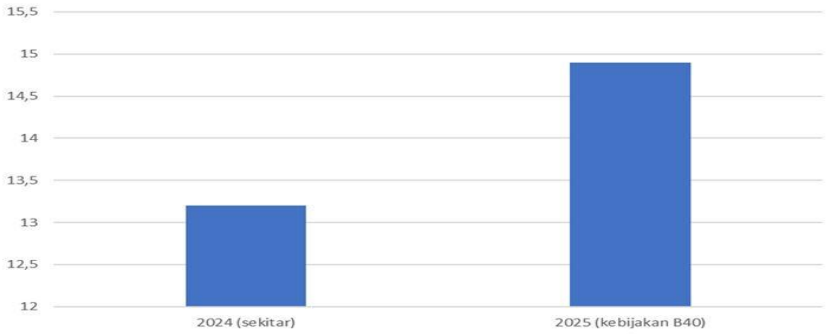

Gambar 24. Realisasi Pemanfaatan Biodiesel (Juta kL)
Sumber: Direktorat Jenderal EBTKE

Pada Juli 2026, pemerintah mulai mengimplementasikan B50 secara nasional. Pertamina Patra Niaga melaporkan pengiriman perdana B50 dari Kilang Kasim dan Kilang Plaju dengan total 12.830 kiloliter. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam diversifikasi sumber energi berbasis komoditas domestik. Namun, peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 juga meningkatkan kebutuhan bahan baku sawit dan menuntut kesiapan infrastruktur produksi, pencampuran, penyimpanan, serta distribusi. Kebijakan ini berpotensi memperkuat kemandirian energi, tetapi juga menciptakan persaingan penggunaan minyak sawit antara kebutuhan pangan, energi, dan ekspor. Pemerintah perlu memastikan peningkatan kebutuhan biodiesel ditopang produktivitas perkebunan dan efisiensi pengolahan, bukan semata-mata perluasan lahan yang meningkatkan tekanan lingkungan.

Perkembangan energi terbarukan menunjukkan kemajuan, tetapi transformasi bauran energi masih berjalan relatif lambat. Kementerian ESDM melaporkan bauran EBT pada 2025 sebesar 15,75%, meningkat dari 14,65% pada 2024, atau bertambah sekitar 1,1 poin persentase. Kapasitas terpasang EBT pada akhir 2025 mencapai 15.630 MW, terutama berasal dari tenaga air, bioenergi, dan panas bumi. Meskipun meningkat, capaian tersebut masih jauh di bawah target historis 23% pada 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penambahan kapasitas energi terbarukan belum cukup cepat untuk mengubah struktur energi nasional yang masih didominasi bahan bakar fosil. Hambatan investasi, kesiapan jaringan listrik, struktur kontrak pembelian listrik, dan kepastian regulasi masih perlu dibenahi untuk mempercepat transisi energi.

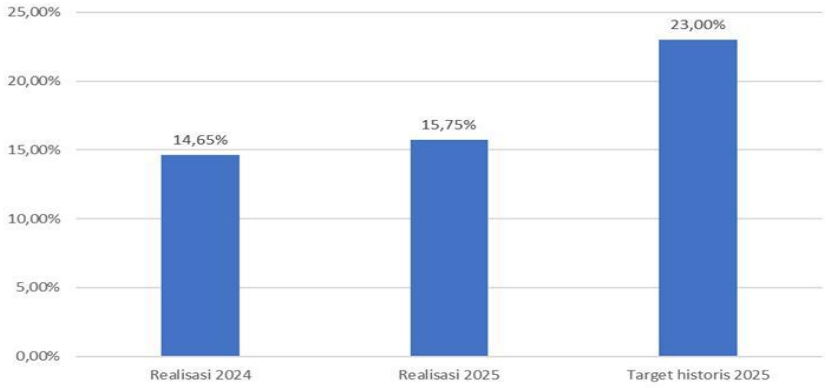

Gambar 25. Realisasi dan Bauran Energi Terbarukan (%)
Sumber: Kementerian ESDM

2.4.6 Risiko Fiskal, Investasi, dan Keberlanjutan Swasembada

Swasembada pangan dan energi memiliki konsekuensi fiskal yang besar karena memerlukan dukungan subsidi, pembangunan infrastruktur, investasi produksi, dan penguatan cadangan strategis. Pada sektor pangan, pemerintah harus membiayai penguatan irigasi, pupuk bersubsidi, pengadaan cadangan beras, serta dukungan produksi. Sementara itu, sektor energi membutuhkan investasi eksplorasi migas, kilang, infrastruktur gas, biodiesel, dan pembangkit energi terbarukan. Ketika harga minyak dunia meningkat dan rupiah melemah, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi juga berpotensi meningkat, sehingga mempersempit ruang fiskal bagi program pembangunan lainnya. Pemerintah perlu memastikan kebijakan swasembada tidak hanya memperbesar belanja negara, tetapi menghasilkan penghematan impor, peningkatan produktivitas, dan manfaat ekonomi bersih yang sebanding dengan biaya intervensinya.

Keterlibatan BUMN dan Danantara berpotensi menjadi katalis investasi pada sektor pangan dan energi, terutama dalam pembangunan infrastruktur produksi, pengolahan, pergudangan, serta pengembangan energi domestik. Namun, pengelolaan investasi melalui Danantara harus didasarkan pada kelayakan komersial, risiko proyek, dan kemampuan menarik pembiayaan swasta.

Penugasan investasi pada proyek yang memiliki tingkat pengembalian rendah berpotensi menciptakan kewajiban keuangan jangka panjang, terutama apabila risiko proyek akhirnya ditanggung negara. Karena itu, proyek swasembada perlu dibedakan antara investasi komersial yang layak dibiayai BUMN atau swasta dan proyek pelayanan publik yang memang memerlukan dukungan fiskal. Danantara seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi alokasi modal dan memperkuat kapasitas produksi nasional, bukan sekadar sumber pembiayaan alternatif bagi proyek pemerintah.

Swasembada juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Ekspansi produksi pangan melalui pembukaan lahan baru berpotensi menimbulkan biaya ekologis yang tinggi apabila mengorbankan kawasan hutan, lahan gambut, dan sumber daya air. Demikian pula, pengembangan biodiesel berbasis sawit dapat meningkatkan kebutuhan lahan serta menciptakan tekanan terhadap ekosistem apabila tidak diikuti penguatan produktivitas dan tata kelola perkebunan. Pemerintah perlu mengutamakan intensifikasi berkelanjutan, rehabilitasi lahan produktif, efisiensi energi, dan investasi teknologi rendah emisi. Swasembada yang dicapai melalui peningkatan biaya lingkungan justru dapat menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang yang lebih besar daripada manfaat jangka pendeknya.

2.4.7 Evaluasi Keseluruhan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan perkembangan selama dua tahun pemerintahan Prabowo, kinerja swasembada pangan dan energi memperlihatkan hasil yang berbeda. Sektor pangan menunjukkan kemajuan lebih nyata pada produksi dan cadangan beras, sedangkan sektor energi masih menghadapi ketergantungan impor yang besar, terutama minyak dan LPG. Keberhasilan memenuhi target produksi maupun meningkatkan kapasitas energi domestik perlu diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ketahanan ekonomi nasional telah terbentuk secara berkelanjutan.

Tabel 11. Matriks evaluasi kinerja swasembada pangan dan energi

Aspek	Capaian
Produksi beras	34,69 juta ton pada 2025
Cadangan beras	4,61 juta ton per 19 September 2026
Diversifikasi pangan	Penguatan produksi padi dan jagung
Produksi minyak	Target lifting 2025 tercapai
Kemandirian LPG	Produksi sekitar 1,6 juta ton
Biodiesel	B40 pada 2025, implementasi B50 dimulai 2026
Energi terbarukan	Bauran EBT 15,75% pada 2025
Pembiayaan	Dukungan pemerintah dan BUMN

Sumber: Kementerian ESDM

Mengutamakan produktivitas daripada ekspansi produksi semata. Pada sektor pangan, prioritas diarahkan pada produktivitas lahan, mekanisasi, irigasi, dan teknologi pertanian. Pada sektor energi, fokus diarahkan pada peningkatan perolehan minyak dari lapangan eksisting, eksplorasi, dan efisiensi penggunaan energi. Memperkuat diversifikasi pangan dan energi. Swasembada beras harus diikuti penguatan komoditas pangan strategis lainnya. Sementara itu, ketergantungan minyak dan LPG perlu dikurangi melalui elektrifikasi, pemanfaatan gas domestik, serta pengembangan energi terbarukan yang kompetitif.

Memperbaiki efektivitas subsidi dan belanja pemerintah. Subsidi pangan dan energi perlu dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, tambahan produksi, efisiensi biaya, dan manfaat ekonomi bersih agar tidak menciptakan ketergantungan fiskal yang permanen. Meningkatkan investasi produktif dan peran Danantara. Pembiayaan harus diarahkan pada proyek yang memiliki kelayakan ekonomi, efek pengganda, dan kontribusi nyata terhadap pengurangan impor. Penugasan proyek komersial perlu dipisahkan dari kewajiban pelayanan publik.

Memperkuat ketahanan rantai pasok dan distribusi. Pembangunan gudang, penggilingan, jaringan gas, fasilitas penyimpanan energi, dan sistem logistik perlu didasarkan pada kebutuhan pasar serta efisiensi biaya, bukan hanya pencapaian target infrastruktur. Membangun sistem evaluasi berbasis dampak. Pemerintah perlu memublikasikan indikator swasembada secara berkala, termasuk rasio produksi terhadap konsumsi, ketergantungan impor, biaya subsidi per unit produksi, pendapatan petani, biaya energi, dan pengurangan emisi.

Dengan demikian, selama dua tahun pemerintahan Prabowo, agenda swasembada pangan dan energi menunjukkan kemajuan, tetapi belum sepenuhnya mengatasi persoalan struktural yang selama ini membatasi kemandirian ekonomi nasional. Peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pangan, pencapaian target lifting minyak, dan pengembangan biodiesel merupakan capaian penting. Namun, tingginya ketergantungan impor energi, lambatnya transformasi energi terbarukan, persoalan produktivitas pertanian, dan besarnya kebutuhan pembiayaan menunjukkan bahwa agenda swasembada masih menghadapi tantangan mendasar.

Keberhasilan swasembada tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan mengurangi impor atau meningkatkan produksi domestik, tetapi dari kemampuan menghasilkan pangan dan energi secara efisien, kompetitif, terjangkau, dan berkelanjutan. Tanpa peningkatan produktivitas, disiplin fiskal, investasi yang tepat, dan reformasi struktural, swasembada berisiko menjadi kebijakan berbiaya tinggi yang menghasilkan kemandirian semu. Sebaliknya, apabila didukung penguatan teknologi, diversifikasi produksi, dan efisiensi rantai pasok, agenda swasembada dapat menjadi fondasi penting bagi stabilitas makroekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

BAB 3
TRANSFORMASI EKONOMI:
Hilirisasi/Industrialisasi dan Investasi, Infrastruktur, serta SDM/Pendidikan

BAB 3
TRANSFORMASI EKONOMI:
Hilirisasi/Industrialisasi dan Investasi, Infrastruktur, Serta SDM/Pendidikan

Transformasi ekonomi menuntut keterkaitan yang kuat antara hilirisasi dan industrialisasi, investasi produktif, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilannya perlu diukur dari peningkatan produktivitas, nilai tambah domestik, dan penciptaan pekerjaan berkualitas, bukan sekadar besarnya investasi atau jumlah proyek. Evaluasi kerangka pembangunan 2025–2029 menjadi pijakan untuk menilai konsistensi antara arah kebijakan, alokasi sumber daya, dan kemampuan pelaksanaan dalam mendorong perubahan struktur ekonomi yang berdaya saing dan inklusif.

3.1 Kerangka Pembangunan 2025-2029

Pembangunan 2025–2029 bertumpu pada visi dan misi Presiden melalui delapan Asta Cita, yang dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional (PN) dan didukung oleh *Program Hasil Terbaik Cepat*. Infrastruktur dan pendidikan tercakup dalam program nomor 4, 6, dan 7 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 26. Tantangan utamanya adalah memastikan agenda tersebut diterjemahkan menjadi program yang saling mendukung, memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, dan ditopang anggaran yang memadai. Percepatan pelaksanaan harus menghasilkan perbaikan layanan dan produktivitas, bukan sekadar mengejar penyelesaian kegiatan.

Infrastruktur dalam PN 3 diarahkan pada penguatan ekosistem digital, jaringan ketenagalistrikan, serta konektivitas wilayah. Intervensi pada 2026 mencakup pengembangan ekosistem digital, infrastruktur listrik dan digitalisasi, industri aplikasi dan gim, serta akses transportasi pada jalur utama, daerah tertinggal, dan perbatasan. Nilai ekonominya bergantung pada kemampuan infrastruktur tersebut menurunkan biaya logistik, menjamin pasokan energi, dan memperluas akses pasar. Tanpa keterhubungan dengan pusat produksi dan kebutuhan masyarakat, pembangunan berisiko menghasilkan aset yang mahal tetapi rendah pemanfaatannya.

Pendidikan merupakan bagian dari pengembangan SDM berkualitas dalam PN 4, bersama penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta perbaikan gizi dan kesehatan. Prioritas intervensi 2026 mencakup penguatan ekosistem makan bergizi, penyelenggaraan sekolah unggul, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta penuntasan tuberkulosis. Keterpaduan agenda ini penting, tetapi keberhasilan pendidikan tetap harus diuji melalui peningkatan hasil belajar, kualitas guru, dan pemerataan layanan. Pembangunan sekolah unggul perlu disertai perbaikan sekolah secara luas agar tidak memperlebar kesenjangan mutu pendidikan.

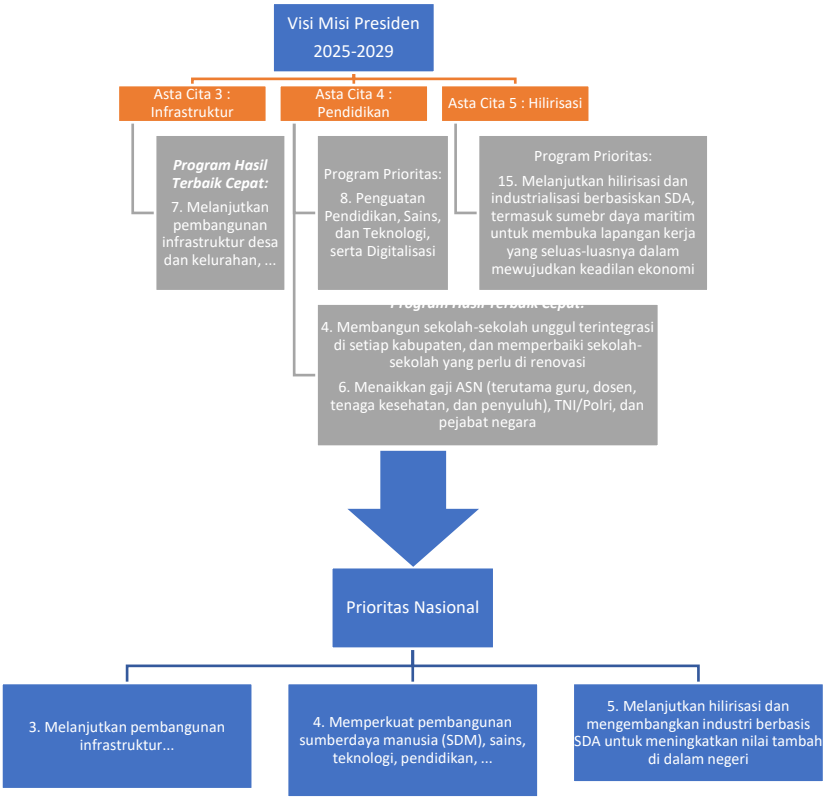

Gambar 26. Program Pemerintah 2025-2029
Sumber: RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RKP 2026

Hilirisasi dalam PN 5 mencakup pengolahan sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, industri berbasis teknologi dan inovasi, industri dasar, serta pengembangan kawasan. Fokus intervensi 2026 meliputi hilirisasi kelapa sawit, industri kimia, dan Kawasan Industri Weda Bay. Keberhasilannya harus diukur dari nilai tambah yang bertahan di dalam negeri, keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Besarnya investasi belum cukup menunjukkan transformasi apabila produksi tetap bergantung pada teknologi impor, keterkaitan industri domestik lemah, dan biaya lingkungan dibebankan kepada masyarakat.

Tabel 12. Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025 - 2029

No.	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	
35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting	
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
45	Penuntasan TBC	
46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	
48	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	
49	Investasi pelayanan kesehatan primer	
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	
51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	
52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	

No.	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Prioritas Nasional 5
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	
58	Pengembangan Hilirisasi Timah	
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	
62	Pengembangan Industri Kimia	
63	Pembangunan Industri Semikonduktor	
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	
66	Pengembangan Industri Dirgantara	
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei	
68	Pengembangan KIT Batang	
69	Pengembangan KI Weda Bay	

Sumber: RPJMN 2025-2029, RKP 2026

3.2 Infrastruktur: Konektivitas Jalan Masih Menjadi Tantangan

3.2.1 Kondisi Mantap Jalan Nasional Menurun

Infrastruktur dalam rencana pembangunan cakupannya sangat luas, namun yang menjadi highlight salahsatunya adalah konektivitas. Hal ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang jaringan konektivitasnya hingga kini masih menjadi tantangan terutama pada daerah terluar/perbatasan.

Berdasarkan isi lampiran pada laporan capaian pembangunan yang disampaikan Presiden pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa secara umum berdasarkan angka statistik telah terjadi peningkatan capaian pada infrastruktur: Teknologi Informasi dan Komunikasi; Transportasi; Energi dan Ketenagalistrikan; dan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun demikian, masih menjadi pekerjaan rumah yang berat adalah *pemerataan kualitas dan layanan pada infrastruktur tersebut* di seluruh Indonesia. Salahsatu capaian infrastruktur dasar yang masih menjadi pekerjaan rumah secara angka statistik menurut laporan

tersebut adalah penyediaan Infrastruktur Transportasi yaitu pada Konektivitas Jalan. Berdasarkan statistik capaian, terlihat bahwa dibandingkan 2024, kondisi jalan nasional yang mantap turun dari 95% ke 93% di 2025. Capaian ini masih berlanjut di semester I-2026 yang masih bertahan di 93%, belum menunjukkan perubahan. Hal serupa juga terjadi pada jalan provinsi, kabupaten, dan kota.

Tabel 13. Capaian Infrastruktur Konektivitas dan Layanan Transportasi Periode 2024 - 2026

Uraian	2024	2025	Semester I	
			2025	2026
Kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	95/69/55	93/66/51/74	93/66/51/74	93/66/51/74

Sumber: Lampiran Pidato Presiden Agustus 2026

Sepanjang semester I-2026, total belanja modal untuk konektivitas dan ketahanan pangan (pembangunan jaringan dan irigasi) adalah sebesar 19,5 triliun rupiah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Porsinya hanya sebesar 6,86% dari total belanja modal di 2026 yang mencapai 284,16 triliun rupiah. Pembangunan konektivitas jalan tersebut dalam kerangka mendukung produktivitas kawasan pangan dan distribusi energi melalui Inpres No.11/2025 dengan pembiayaan dari APBN dan APBD. Hingga Juni 2026 telah dibangun jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp5,41 triliun. Artinya, penurunan kemantapan jalan pada indikator Konektivitas Transportasi belum menjadi sasaran utama.

3.2.2 Kondisi Mantap Jalan Provinsi dan Kabupaten Terdampak Efisiensi?

Kondisi mantap adalah persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Semakin tinggi nilai, semakin banyak jalan yang dalam kondisi baik dan siap mendukung mobilitas. Kondisi jalan mantap untuk daerah provinsi dan kabupaten masih rendah. Padahal dua daerah ini harusnya menjadi perhatian agar dapat menumbuhkan ekonomi daerah dan mencapai pemerataan daerah.

Kondisi mantap jalan provinsi turun dari 69% di 2024 ke 66% di 2025 dan berlanjut hingga semester I-2026 sebesar 66%. Hal serupa juga terjadi di kondisi mantap jalan kabupaten yang turun dari 55% di 2024 menjadi 51% di 2025 dan bertahan hingga semester I-2026. Hal ini menunjukkan bahwa belum terlihatnya upaya perbaikan kondisi mantap jalan porvinsi dan kabupaten.

Jalan provinsi adalah jalan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan memiliki fungsi utama menghubungkan wilayah-wilayah dalam satu provinsi, lebih jauh lagi

fungsinya adalah: a. Menghubungkan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; b. Menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan daerah; dan Mendukung kelancaran transportasi regional. Sementara itu Jalan kabupaten adalah jalan yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang memiliki fungsi: a. Menghubungkan pusat pemerintahan kabupaten/kota dengan kecamatan; b. Menghubungkan antar kecamatan; dan Mendukung mobilitas masyarakat lokal dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Anggaran jalan provinsi dan jalan kabupaten bersumber dari APBD atau dapat dari APBN melalui dana transfer (DAU dan DAK) atau Inpres.

Kondisi mantap jalan provinsi dan kabupaten yang masih dalam posisi penurunan, belum berubah sejak 2025 dapat mengindikasikan dua hal: *pertama* adalah perbaikan jalan hingga mencapai kondisi mantap belum menjadi sasaran porioritas di daerah, *kedua*, meskipun menjadi sasaran prioritas belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Efisiensi anggaran yang dilakukan dengan pemangkasan TKD membuat banyak kesulitan dalam pembiayaan belanja daerah, karena PAD masih relatif kecil terhadap belanja total daerah. Hal ini juga berimplikasi pada penurunan belanja modal yang didalamnya terdapat belanja infrastruktur termasuk pembangunan jalan.

Tabel 14. Transfer ke Daerah 2022 - 2027 (Milyar Rupiah)

Uraian	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	LKPP 2025	Outlook 2026	RAPBN 2027
1. Dana Bagi Hasil	**168,414.1**	**205,666.6**	**153,174.6**	**168,890.5**	**61,490.4**	**63,364.4**
2. Dana Alokasi Umum	**378,000.0**	**398,029.6**	**429,210.6**	**433,292.1**	**406,952.7**	**415,000.0**
3. Dana Alokasi Khusus	**173,164.6**	**181,357.6**	**183,538.5**	**162,932.3**	**153,596.1**	**159,439.0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	54,784.0	50,334.7	50,890.1	17,610.6	4,560.1	5,000.0
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	118,380.7	128,081.9	130,441.2	145,070.6	148,706.6	150,909.5
c. Hibah kepada Daerah*	-	2,940.9	2,207.2	251.1	329.5	3,529.5

Sumber: RAPBN 2027, Kementerian Keuangan 2026

3.3 Anggaran Pendidikan dan Kualitas Pendidikan

3.3.1 Anggaran Pendidikan Tinggi, Kualitas Pendidikan Masih Ketinggalan

Indikator capaian pada sektor pendidikan masih banyak berjibaku pada akses belum pada kualitas. Pun berjibaku pada akses pendidikan, hingga saat ini belum merata terutama untuk daerah perdesaan, terluar, dan tertinggal. Bahkan di daerah yang masih dikategorikan perkotaan akses ini belum merata. Hal ini karena belum

adanya standardisasi akses baik pada infrastruktur pendidikan maupun pada sarana dan prasarana pendidikan. Sementara itu untuk kualitas, upaya yang dilakukan mesti lebih jauh lagi. Kualitas pendidikan terutama sangat timpang, dibandingkan dengan akses pendidikan. Hal ini selain dipengaruhi oleh akses yang timpang, juga dipengaruhi oleh kesungguhan/komitmen pemerintah dalam mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan, kurikulum yang adaptif dan berkelanjutan; dan kualitas guru yang merata.

Program priorotas pemerintah saat ini di bidang pendidikan terutama pada (1) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul dan (2) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas. Hal ini masih berkaitan dengan akses pendidikan, belum menyasar kualitas. Di sisi lain, pembangunan sekolah unggul ini juga berpotensi meningkatkan ketimpangan pendidikan.

Upaya meningkatkan gaji guru masih terbatas peningkatannya, dan jauh lebih lambat dan lebih sedikit anggarannya dibandingkan peningkatan gaji pejabat pemerintahan lainnya seperti yang disebutkan pada *Program Hasil Terbaik Cepat* poin 6 yaitu Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara.

Tabel 15. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2022 - 2026

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026 a)
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 1)	tahun	9.08	9.13	9.22	9.41	9.45
Harapan lama sekolah penduduk usia di atas 7 tahun 1)	tahun	13.10	13.15	13.21	13.30	13.36
Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional 2)						
(a) Literasi Membaca	nilai	56.30	60.89	63.06	62.89	63.89
(b) Numerasi	nilai	45.59	51.36	55.92	54.01	55.86
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi 3)	%	31.16	31.45	32.00	32.89	34.96
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 3)	%	10.15	10.15	10.20	11.00	11.49
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi 4)	%	69.84	66.30	68.14	67.12	68.50

Sumber: Lampiran Pidato Presiden Agustus 2026

Anggaran pendidikan di Indonesia mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, namun belum juga menunjukkan peningkatkan pada kualitas pendidikan maupun pemerataan akses pendidikan. Capaian-capaian indikator pendidikan terutama pada akses pendidikan jika di breakdown, menunjukkan capiaan yang berbeda di tiap provinsi, terutama antara daerah barat dan timur Indonesia.

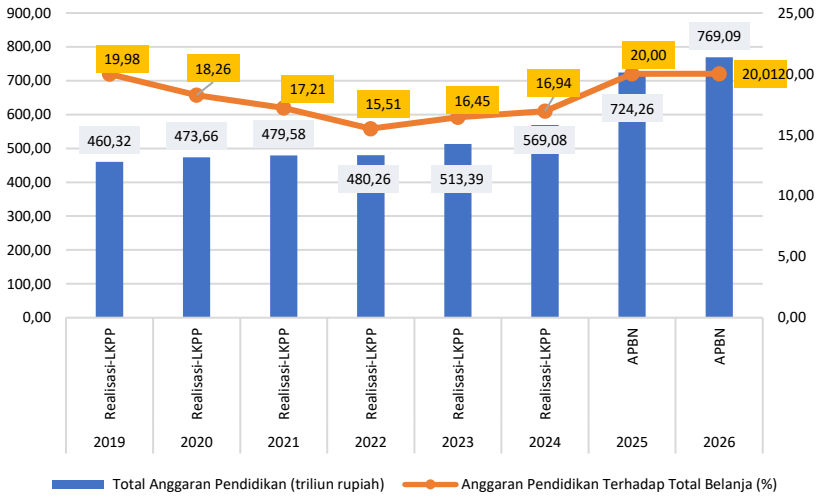

Gambar 27. Anggaran Pendidikan dan Realisasinya terhadap Total Belanja
Sumber: Kementerian Keuangan, berbagai tahun, diolah

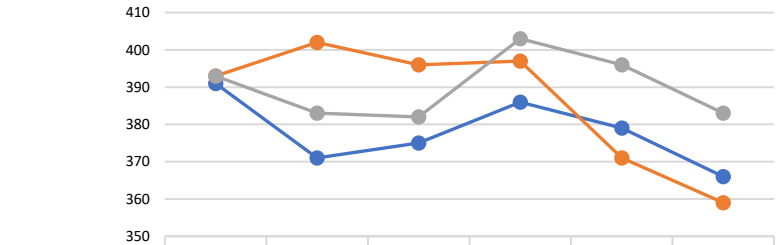

	PISA 2006	PISA 2009	PISA 2012	PISA 2015	PISA 2018	PISA 2022
Matematika	391	371	375	386	379	366
Membaca	393	402	396	397	371	359
Sains	393	383	382	403	396	383

Gambar 28. Hasil Nilai PISA Indonesia
Sumber: OECD, 2023

Hasil PISA (*Programme for International Student Assessment*) [1] 2025, menempatkan Indonesia di urutan ke ke-69 dari 81 negara di dunia, sementara hasil PISA 2025 menempatkan Indonesia di urutan ke ke-73 dari 91 negara. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berada di urutan ke-6, kalah dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand yang merupakan peers secara ekonomi.

Tabel 16. Hasil PISA 2025 Negara-negara di ASEAN

No.	Negara	Science	Reading	Mathematics	Computational Problem Solving
1	Singapore	560	535	563	563
2	Vietnam	457	392	443	461
3	Brunai Darussalam	439	426	435	496
4	Thailand	432	392	407	476
5	Malaysia	419	393	397	484
6	Indonesia	389	365	364	427
7	Cambodia	382	347	366	-
8	Philipines	373	367	371	434

Sumber: OECD, 2026

3.3.2 Pendidikan Tinggi Belum Menjamin Pendapatan Yang Tinggi di Indonesia

Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai lebih dari 190 juta orang menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun setiap tahunnya, bahkan mencapai angka 4,68% pada Februari 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja masih mampu menyerap tambahan angkatan kerja. Namun, perkembangan tersebut perlu dibaca lebih dalam lagi karena proporsi pekerja paruh waktu juga masih relatif besar dan menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya itu, sekitar 59,4% tenaga kerja yang terserap di sektor informal pada bulan Februari 2026 mencerminkan kondisi belum terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Besarnya proporsi pekerja informal mengindikasikan bahwa kemampuan pasar kerja dalam menyerap tambahan angkatan kerja masih banyak

[1] PISA adalah program evaluasi dan penilaian internasional yang diselenggarakan oleh OECD untuk mengukur kemampuan akademik serta keterampilan dasar siswa berusia 15 tahun.

berlangsung melalui pekerjaan dengan Tingkat perlindungan dan stabilitas kerja yang relative terbatas. Dengan demikian, perbaikan indikator ketenagakerjaan secara kuantitatif tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan utilisasi tenaga kerja secara optimal, khususnya bagi kelompok muda dan lulusan pendidikan tinggi. Persoalan ini menjadi semakin penting bagi kelompok muda dan lulusan pendidikan menengah-tinggi yang memasuki pasar kerja dengan ekspektasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Dalam konteks tersebut, pendidikan tinggi menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa peningkatan pendidikan dapat diterjemahkan menjadi peluang kerja yang sesuai dan memberikan imbal hasil yang memadai. Gelar sarjana tidak selalu menjadi tiket emas dan jaminan menuju kemapanan ekonomi. Lulusan baru (*fresh graduate*) terjebak dalam realitas pahit: kesulitan menembus lapangan kerja formal, tingkat upah yang tak sepadan dengan kualifikasi, hingga masa tunggu (*waiting period*) yang memanjang. Lebih miris lagi, di tengah impitan inflasi dan biaya hidup yang terus melonjak, para pencari kerja muda ini dihadapkan pada minimnya jaring pengaman sosial (*safety net*) untuk menopang ketahanan ekonomi mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam transisi dari pendidikan ke pasar kerja, yaitu sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kerja.

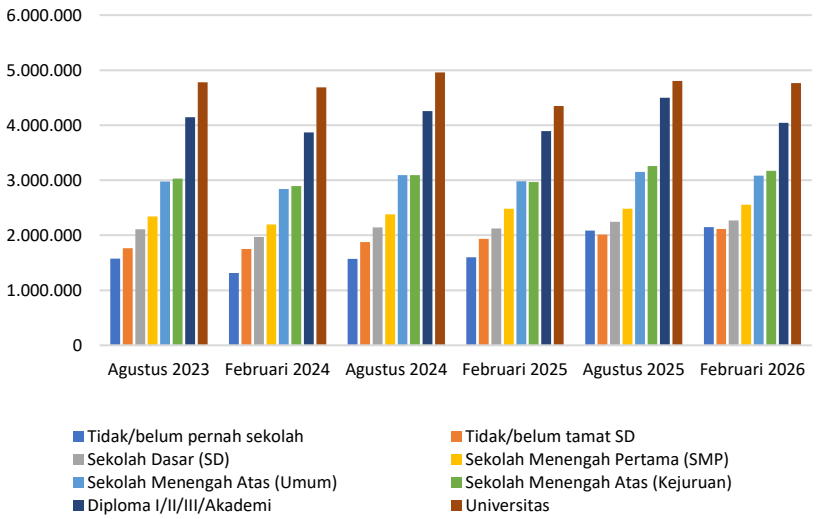

Gambar 29. Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Bulanan Menurut Tingkat Pendidikan, 2023-2026
Sumber: BPS, 2026 (diolah)

Di sisi lain, tingginya pendidikan tidak selalu menjamin kesesuaian antara kualifikasi pekerja dan pekerjaan yang diperoleh, terutama di kalangan pekerja muda. Berdasarkan data Sakernas tahun 2024, hanya sekitar 64,64% yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sementara 22,36% mengalami *overeducated,* dan 13% nya mengalami *undereducated*. Artinya, lebih dari sepertiga pekerja muda berada pada pekerjaan yang tingkat kualifikasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan fondasi pendidikan yang mereka miliki.

Kondisi ini menjadi penting karena *mismatch* tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, tetapi juga dapat memengaruhi imbal hasil pendidikan dan insentif generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan bukan semata-mata terletak pada *return* yang akan dihasilkan dari tingginya jenjang pendidikan, tetapi juga apakah kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pasar kerja.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan transisi pendidikan vokasi ke pasar kerja. Data BPS menunjukkan TPT lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok pendidikan lainnya, yaitu mencapai 8,16% pada Februari 2026. Pendidikan vokasi yang seharusnya menjadi jembatan paling langsung antara pendidikan dan pasar kerja, rupanya masih menuai tantangan yang menyebabkan lulusan SMK sulit untuk mendapatkan kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Pendidikan SMK memberikan keahlian yang lebih spesifik, sementara industri berubah sangat cepat terlebih lagi dengan semakin pesatnya digitalisasi, otomatisasi, AI, hingga perubahan proses manufaktur.

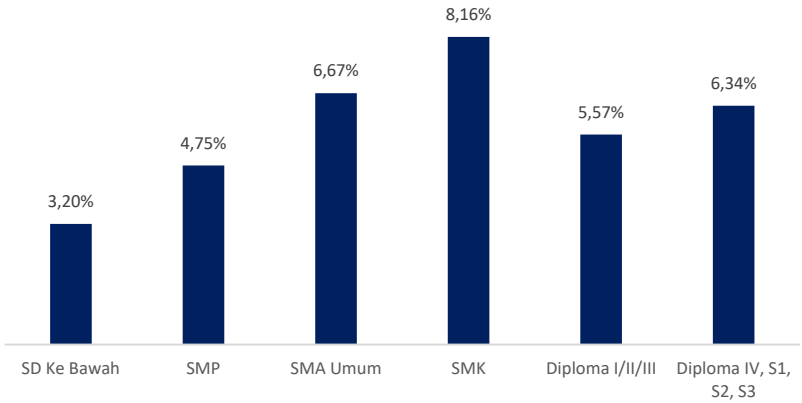

Gambar 30. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2026
Sumber: BPS, 2026 (diolah)

Selain itu, struktur pendidikan vokasi belum sepenuhnya mengikuti struktur ekonomi daerah. Dalam hal ini, peran dari pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja regional berdasarkan sektor-sektor unggulan daerah menjadi sangat penting. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah berupaya untuk memperkuat instrument *link and match,* seperti revitalisasi dan *teaching factory* SMK, perluasan sertifikasi kompetensi, *up-skilling* dan *re-skilling* melalui Kartu Prakerja, program magang, hingga pelatihan berbasis kebutuhan industri.

Akan tetapi, upaya tersebut belum serta-merta menghilangkan tantangan dalam transisi lulusan vokasi ke pasar kerja. Dengan demikian, penguatan *link and match* perlu dilihat bukan hanya dari banyaknya kerja sama antara sekolah dengan industri, tetapi dari *outcome* yang dihasilkan, terutama kecepatan transisi lulusan menuju pekerjaan, serta peningkatan upah yang layak.

3.4 Hilirisasi Belum Mendorong Industrialisasi

3.4.1 Investasi Tinggi Belum Mendongkrak Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan Pada PDB

Upaya mencapai pertumbuhan 8%, diikuti dengan upaya mendorong industrialisasi lewat hililirisasi. Hal ini menuntut tingkat investasi yang yang lebih tinggi yang dicapai baik itu lewat swasta dan pemerintah. Capaian realisasi investasi secara umum mengalami peningkatan baik itu di 2025 secara total, maupun capaian hingga semester I-2026. Nilai realisasi untuk sektor hilirisasi juga menunjukkan peningkatan. Namun demikian peningkatan investasi di sektor hilirisasi ini belum dapat mendorong lompatan kontribusi pada industri manufaktur di PDB.

Tabel 17. Perkembangan Investasi

Kategori	Satuan	2024	2025	Semester I	
				2025	2026
Nilai PMA	Rp triliun	900.2	900.9	431.9	507.6
Nilai PMDN	Rp triliun	814.0	1,030.3	510.3	503.0
Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder	Rp triliun	721.3	780.9	369.3	385.2
Nilai Realisasi Penanaman Modal Bidang Hilirisasi	Rp triliun	407.8	584.1	280.8	300.1

Sumber: Lampiran Pidato Presiden Agustus 2026

Kontribusi sektor manufaktur di PDB, secara umum mengalami volatilitas di kisaran 18-19%, dengan kecenderungan tren yang menurun. Sementara itu pertumbuhannya pun masih terbatas dengan rata-rata berada di 5%. Hal ini belum cukup untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke 8%. Sub-sektor industri

pengolahan non-migas yang kontribusinya besar pada PDB masih dipegang oleh: 1. Industri Makanan dan Minuman; 2. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; 3. Industri Logam Dasar; 4. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; dan 5. Industri Alat Angkutan. Kontribusi terbesar dipegang oleh Industri Makanan dan Minuman rata-rata sebesar 6-7%. Sementara itu 4 sektor lainnya, rata-rata sekitar 1-2% kontribusinya terhadap PDB, selisihnya masih cukup besar.

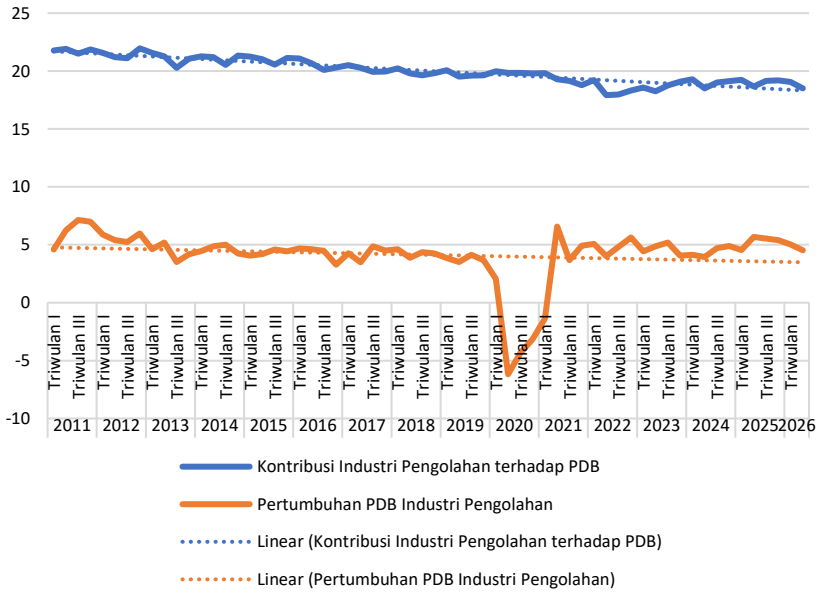

Gambar 31. Kontribusi Industri Pengolahan dan Pertumbuhan Industri Pengolahan
Sumber: BPS

Dalam laporan realisasi investasi yang disampaikan Kementerian Invetasi disebutkan bahwa investasi tertinggi mengalir pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar 150,4 triliun rupiah pada semester I-2026. Industri logam dasar pertumbuhannya sangat tinggi sejak 2021 dan mencapai puncaknya di 2025 mencapai 15,71% pertumbuhan (yoy).

Sementara Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,35% (yoy) dalam 5 tahun terakhir, sejak 2024 mengalami tren penurunan pertumbuhan. Namun dengan investasi yang tinggi dan pertumbuhan PDB yang tinggi, kedua industri tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang lebih besar pada pembentukan PDB.

Artinya kedua industri tersebut belum bisa memberikan dampak berganda yang besar pada ekonomi domestik.

Kegiatan pengembangan hilirisasi yang menjadi prioritas masih bertumpu pada hiliriasasi mineral yang ketersediaan sumberdaya-nya terbatas sehingga perlu direncanakan kesinambungannya. Di sisi lain, upaya pengembangan hilirisasi perkebunan perlu direncanakan kapasitas maksimum produksinya dengan mempertimbangkan kapasitas maksimum perluasan areal lahan. Upaya peningkatan hilirisasi dengan pembukaan pertambangan/penggalian mineral dan perluasan lahan untuk hiliriasasi SDA berbasis perkebunan ini juga perlu tetap memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberlangsungan lingkungan hidup&keanekaragaman hayati. Selain itu perlu memitigasi terjadinya kebencanaan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan/galian yang berupa kebakaran hutan, longsor dan banjir. Sehingga upaya hilirisasi ini dapat dinikmati manfaatnya oleh segenap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Tabel 18. Capaian Pembangunan Industri dan Hilirisasi Tahun 2024-Semester I 2026

Indikator	Satuan	2024	2025	Semester 1	
				2025	2026
Kontribusi PDB Industri Pengolahan 1)	%	18.98	19.07	18.95	18.77
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 1)	%	4.43	5.30	5.12	4.78
Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel 3)	juta ton/tahun	33.96	36.89	36.27	38.12
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel 4)	Rp triliun	153.20	185.20	94.12	70.95
Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga 3)	ribu ton/tahun	1,071.75	1,495.40	1,362.78	1,337.68
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga 4)	Rp triliun	68.50	65.90	40.00	37.40
Ragam Produk Hilir Sawit 2)	produk	193	208	195	208
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit 4)	Rp triliun	44.09	62.82	31.66	29.50
Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa 2)	%	40.00	57.05	40.00	70.04
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa 4)	Rp triliun	4.49	1.78	0.76	0.97

Indikator	Satuan	2024	2025	Semester 1	
				2025	2026
Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut 2)	%	49.51	61.32	55.00	71.38
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut 4)	Rp triliun	0.23	0.32	0.10	0.23
Kapasitas Produksi Pati Sagu 2)	ton/tahun	60,000	100,000	100,000	100,000
Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara 2)	ribu ton	59,783	61,320	61,000	61,320
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi 4)	Rp triliun	17.46	41.74	7.93	26.40
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi 4)	Rp triliun	16.11	18.31	9.35	9.00
Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 1)	%	6.16	4.58	4.08	10.35
Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 1)	%	4.26	3.55	4.50	4.86
Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman 1)	%	5.90	6.38	6.09	7.04

Sumber: Lampiran Pidato Presiden Agustus 2026

BAB 4
KESEJAHTERAAN SOSIAL:
Lapamgan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan. Serta Kesehatan

BAB 4
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT:
Lapangan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan, Serta Kesehatan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam memperbaiki kualitas hidup dan memperluas kesempatan ekonomi secara merata. Evaluasinya perlu menghubungkan kualitas lapangan kerja, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta keterjangkauan layanan kesehatan sebagai aspek yang saling menentukan. Pekerjaan berupah rendah membatasi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, sementara ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan dapat mempertahankan kemiskinan antargenerasi. Karena itu, kebijakan harus dinilai dari kemampuannya meningkatkan pendapatan riil, memperkuat perlindungan sosial, dan membuka jalan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

4.1 Lapangan Kerja

Pada sektor ketenagakerjaan pemerintah menargetkan penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Target 2025 pada level 4,5-5 persen sedangkan pada 2026 sebesar 4,44-4,96 persen. Baik tahun 2025 maupun 2026, target TPT telah tercapai. Namun demikian, persoalan bukan pada tercapainya TPT tetapi pada aspek lain seperti kualitas lapangan kerja tercipta, kesejahteraan tenaga kerja hingga persoalan produktivitas.

Tabel 19. Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbukan (%)

TPT	Target 2025	Target 2026	2025		2026		Keterangan
			Feb	Agu	Feb	Mei	
	4,5-5,0	4,44-4,96	4.76	4.85	4.68	4.65	Tercapai

Sumber: Nota Keuangan APBN, 2026, diolah

4.1.1 Penciptaan lapangan kerja menurun drastis

Janji penciptaan lapangan kerja 19 juta masih jauh panggang dari api. Total penciptaan lapangan kerja sepanjang 2024-2026 baru sekitar 5,5 juta atau 29 persen dari target 19 juta), dengan kecenderungan penurunan. Sejak pemerintahan Prabowo (dikalkulasi Februari 2025); penciptaan lapangan kerja sekitar 3,59 juta yang turun menjadi 1,9 juta pada Febuari 2026. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam empat tahun dan hampir separuh dari capaian tahun sebelumnya.

Perlambatan penciptaan lapangan kerja menunjukkan melemahnya kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja baru. Pada Februari 2026, penciptaan lapangan kerja turun hampir 50 persen dibandingkan periode

sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi mencapai 5,61 persen pada triwulan I-2026. Namun demikian, penciptaan lapangan kerja baru justru turun tajam. Persoalan ini menjadi semakin penting karena TPT 2026 telah berada dalam target APBN.

Di tengah penurunan penciptaan lapangan kerja yang terjadi pada triwulan I 2026, kualitas penyerapan tenaga kerja juga menyita perhatian. Ini bermula dari dominasi penyerapan tenaga kerja informal. Tingginya pekerja informal bukan sekedar pada persoalan status pekerjaan tetapi pada kerentanan ekonomi. Pelaku sektor informal menghadapi ketidakpastian pendapatan, keterbatasan perlindungan sosial, akses pembiayaan yang lebih rendah, dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi.

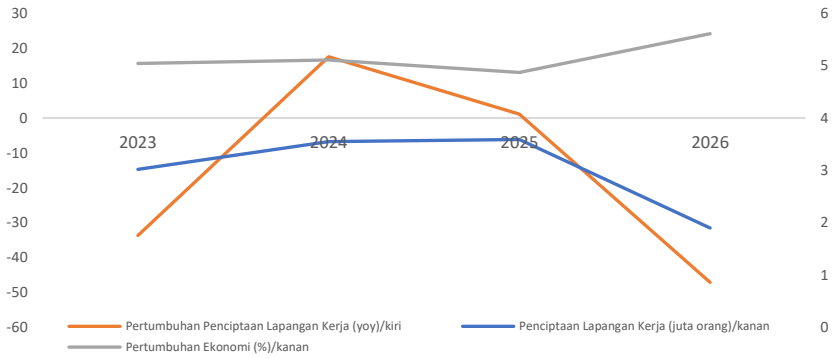

Gambar 32. Grafik Penciptaan Lapangan Kerja
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

Kerentanan tersebut misalnya terlihat dari rendahnya keberlanjutan usaha karena dihadapkan pada biaya-biaya premaren. Salah satu contoh yang paling nyata adalah sektor informal di DIY yang harus menyetor hingga Rp2,5 juta per hari kepada preman dan wajib memberikan makan hingga 10 orang setiap harinya (Kompas, 2026). Tingginya biaya non-produktif yang harus ditanggung pelaku usaha menyebabkan usaha sulit berkembang dan cenderung gulung tikar.

Persoalan dominasi informal telah berlangsung sejak lama. Februari 2026, penyerapan tenaga kerja sektor informal mencapai 1,16 juta atau 61 persen dari tenaga kerja yang terserap. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap 100 lapangan kerja baru, sekitar 61 berada di sektor informal. Ini menunjukkan bahwa ekspansi kesempatan kerja masih lebih banyak berlangsung melalui kegiatan informal dibandingkan pekerjaan formal.

Tabel 20. Penciptaan Lapangan Kerja Menurut Kegiatan Data Februari

Tahun	Formal	Informal	Porsi	Pertumbuhan

			Formal	Informal	Formal	Informal
2022	1.36	3.19	29.89	70.11		
2023	1.01	2.01	33.44	66.56	-25.74	-36.99
2024	2.76	0.79	77.75	22.25	173.27	-60.70
2025	1.14	2.45	31.75	68.25	-58.70	210.13
2026	0.74	1.16	38.95	61.05	-35.09	-52.65

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

Dari sisi jam kerja, porsi pekerja pekerja tidak penuh (1-34 jam per minggu) masih cukup besar, sekitar sepertiga dari seluruh penduduk bekerja. Pada 2026 porsinya mencapai 33,2 persen, meningkat dibandingkan 31,9 persen pada 2025. Dari porsi tersebut, pekerja paruh waktu mencapai 26 persen sedangkan setengah pengangguran sekitar 7,3 persen. Porsi pekerja tidak penuh yang masih tinggi menunjukkan bahwa sebagian kapasitas tenaga kerja belum dimanfaatkan secara optimal (*underemployment*). Dapat dikatakan bahwa TPT yang rendah belum tentu mencerminkan pasar kerja yang sepenuhnya sehat. Pada beberapa kondisi seseorang dapat dikategorikan bekerja dan karenanya tidak masuk statistik pengangguran, tetapi sebenarnya belum memperoleh jam kerja yang memadai.

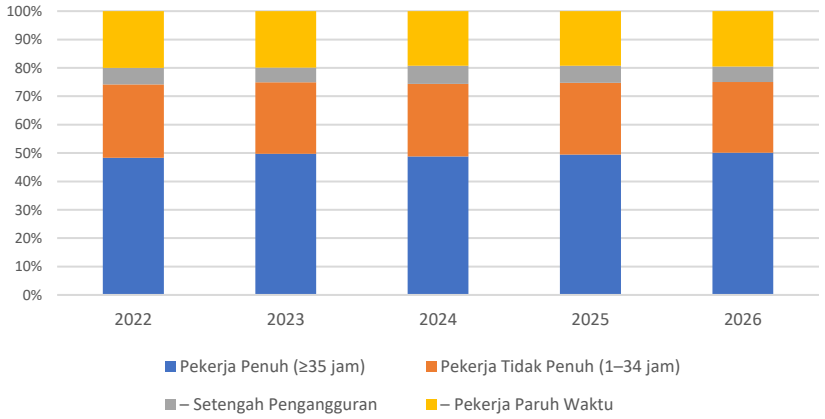

Gambar 33. Pekerja Penuh dan Tidak Penuh
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

4.1.2 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator lain yang dapat menunjukkan penurunan penciptaan lapangan kerja adalah elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Data di bawah ini menunjukkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja cenderung menurun, dari 0,44 pada 2023: Feb menjadi 0,23 pada 2026: Feb. Hal tersebut

bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2026 memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam menciptakan lapangan kerja dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sementara itu, elastisitas penyerapan tenaga kerja pada sektor informal juga lebih tinggi dibandingkan formal masing-maisng 0,24 dan 0,22 pada Februari 2026. Bahkan, 2025: Feb, elastisitas penyerapan tenaga kerja informal terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 0,6.

Menurut lapangan usaha, elastisitas penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor padat karya bervariasi. Namun, satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah penurunan elastisitas penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan, dari 0,84 pada 2025: Feb menjadi 0,44 pada 2026: Feb. Kontras dengan itu, elastisitas pada sektor pertanian meningkat pada 2026: Feb dibandingkan 2025: Feb.

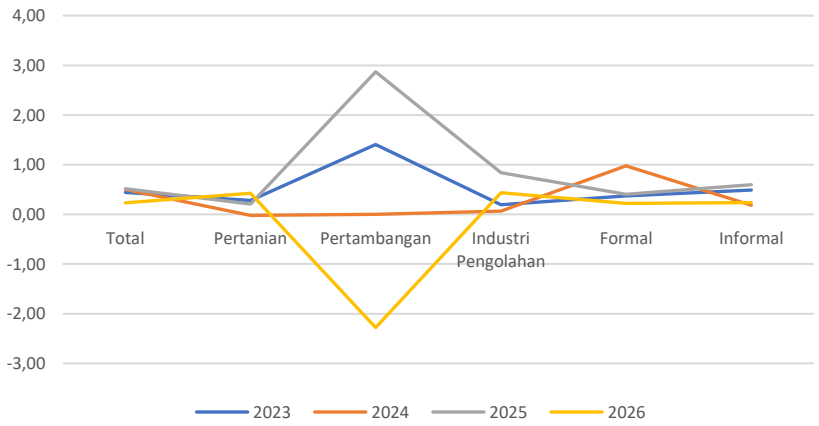

Gambar 34. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

Selain elastisitas penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, data lain yang menarik untuk dianalisis adalah seberapa besar kemampuan 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap jumlah tenaga kerja. Secara umum, kemampuan pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja semakin melemah. Pada 2022, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 906 ribu pekerja. Angka tersebut turun menjadi 599 ribu pada 2023, kemudian 695 ribu pada 2024 dan 737 ribu pada 2025. Pada 2026, setiap 1 persen pertumbuhan hanya menyerap 339 ribu pekerja, turun lebih dari separuh dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena terjadi ketika ekonomi justru tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen (yoy), tertinggi dalam lima tahun pengamatan, sedangkan pada 2025 hanya 4,87 persen. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode Prabowo semakin tidak padat karya.

Dari sisi kualitas, penyerapan tersebut masih bertumpu pada pekerja informal. Pada 2026, setiap 1 persen pertumbuhan menyerap 207 ribu pekerja informal dan hanya 132 ribu pekerja formal. Penyerapan pekerja formal terus menurun dari 540 ribu pada 2024 menjadi 234 ribu pada 2025. Namun demikian, penyerapan pekerja informal juga turun dari 503 ribu pada 2025. Jika tidak membaik, kondisi ini dapat menyebabkan target penciptaan lapangan kerja berkualitas gagal dicapai.

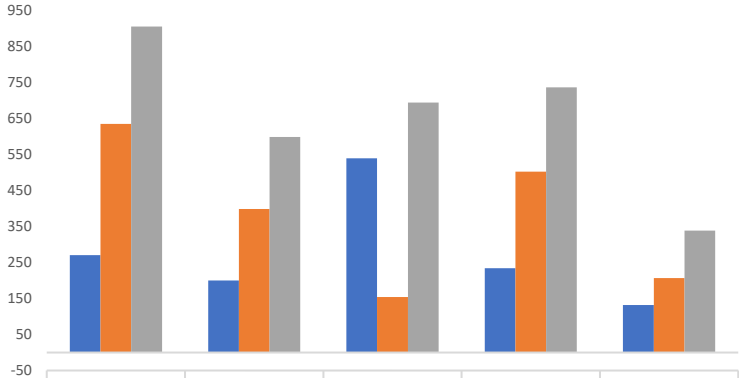

	2022	2023	2024	2025	2026
Formal	270,9	200,4	540,1	234,1	131,9
Informal	635,5	398,8	154,6	503,1	206,8
Total	906,4	599,2	694,7	737,2	338,7

Gambar 35. Kemampuan Penciptaan Lapngan Kerja Setiap 1 Persen Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

Penyerapan tenaga kerja nasional masih bertumpu pada sektor pertanian. Hal itu terlihat dari kemampuan sektor tersebut menyerap tenaga untuk setiap 1 persen pertumbuhan. Februari 2026, 1 persen pertumbuhan sektor pertanian mampu menyerap 8,55 juta tenaga kerja. Sementara itu, elastisitas di sektor industri masih cukup terbatas, hanya 3,97 juta. Level penyerapan tenaga kerja terhadap 1 persen pertumbuhan industri manufaktur juga terus menurun sejak 2023, dari 4,25 juta menjadi 3,97 juta. Pada bagian lain, kondisi di sektor pertambangan menunjukkan pengurangan tenaga kerja sejalan dengan tingginya gejolak eksternal.

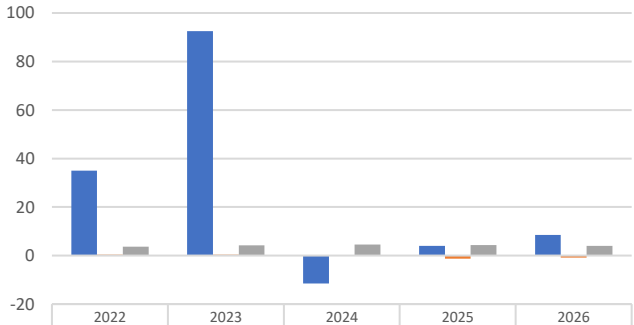

	2022	2023	2024	2025	2026
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,03	92,48	-11,50	3,95	8,55
Pertambangan dan Penggalian	0,42	0,35	0,18	-1,33	-0,80
Industri	3,68	4,25	4,57	4,31	3,97

Gambar 36. Penyerapan Tenaga Kerja Untuk 1 Persen Pertumbuhan Lapangan Usaha (Data Februari)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

4.1.3. Kesejahteraan pekerja Cenderung Tertekan

Pertumbuhan upah rill buruh cenderung tertekan, baik menggunakan data data Februari maupun Agustus. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi oleh pekerja semakin berat, terutama saat biaya hidup semakin mahal. Pada Februari 2026, pertumbuhan upah riil hanya 1,64 persen (yoy) yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Pada beberapa periode, pertumbuhan upah rill sempat negatif seperti tahun 2023. Pertumbuhan upah riil negatif bermakna bahwa pertumbuhan pendapatan tenaga kerja tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa, sehingga daya beli pekerja mengalami penurunan.

Pertumbuhan upah riil Februari melambat dari 11,80 persen pada 2024 menjadi 1,74 persen pada 2025 dan 1,64 persen pada 2026. Data Agustus juga menunjukkan pelemahan, dari 11,71 persen pada 2024 menjadi negatif 0,46 persen pada 2025. Artinya, penguatan daya beli pada 2024 belum berlanjut secara konsisten. Pertumbuhan positif pada Februari 2026 menunjukkan daya beli masih meningkat secara tahunan, tetapi dengan laju yang terbatas; kondisi ini perlu dibedakan dari penurunan daya beli ketika pertumbuhan upah riil negatif.

Tekanan tersebut memperlihatkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Penurunan pengangguran dapat berjalan bersamaan dengan lemahnya kesejahteraan apabila pekerjaan yang tersedia berupah rendah, jam kerjanya tidak memadai, atau perlindungannya terbatas. Namun, data rata-rata upah perlu dibaca secara hati-hati karena perubahannya juga dapat dipengaruhi pergeseran komposisi pekerja antarsektor

dan tingkat keterampilan. Analisis perlu dilengkapi dengan upah median, jam kerja, dan status pekerjaan untuk memastikan kelompok pekerja yang paling tertekan.

Lemahnya pertumbuhan upah riil berpotensi membatasi konsumsi rumah tangga, terutama ketika pendapatan sebagian besar terserap untuk pangan, perumahan, dan transportasi. Jika berlangsung lama, rumah tangga dapat mengurangi tabungan atau menambah utang untuk mempertahankan konsumsi, sehingga ketahanan keuangannya melemah. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu menghubungkan peningkatan produktivitas dengan perbaikan upah, memperluas pekerjaan formal, serta menekan biaya kebutuhan dasar. Keberhasilannya harus tercermin pada peningkatan daya beli pekerja secara berkelanjutan, bukan hanya bertambahnya jumlah orang yang bekerja.

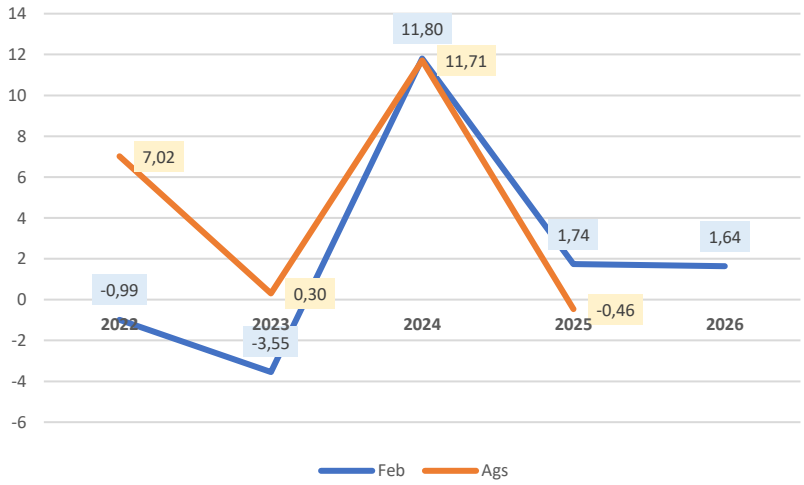

Gambar 37. Pertumbuhan Upah Riil
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

Menurut lapangan usaha, pertumbuhan upah riil relatif beragam. Pada sektor-sektor padat karya, pertumbuhan jauh lebih rendah dibandingkan sektor-sektor padat modal. Dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, pertumbuhan upah riil pada sektor padat karya secara keseluruhan memengaruhi daya beli dan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Februari 2026, upah riil pertanian hanya tumbuh 3,5 persen sedangkan industri pengolahan hanya 2,1 persen. Pertumbuhan upah riil pertambangan mencatat negatif hingga 6,7 persen. Pada bagian lain, upah riil di sektor non tradable tumbuh tinggi seperti aktivitas penerbutan dan telekomunikasi naik hingga 10,33 persen.

Tabel 21. Pertumbuhan Upah Riil Menurut Lapangan Usaha Data Februari

Lapangan Usaha	2025	2026	Selisih
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.12	3.50	3.38
B. Pertambangan dan Penggalian	2.46	-6.70	-9.15
C. Industri	1.72	2.10	0.37
D. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	3.46	-9.89	-13.35
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi	7.50	-7.48	-14.98
F. Konstruksi	8.54	0.05	-8.49
G. Perdagangan Besar dan Eceran	4.42	2.50	-1.93
H. Transportasi dan Penyimpanan	2.04	2.55	0.51
I. Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7.77	2.42	-5.35
J, K. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi	-13.12	10.33	23.45
L. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-5.74	-0.62	5.11
M. Aktivitas Real Estat	-6.65	-3.98	2.66
N, O. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha	6.02	-3.91	-9.93
P. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib	1.99	2.68	0.69
Q. Pendidikan	-2.11	0.39	2.50
R. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.55	5.35	3.80
S, T, U, V. Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional	3.30	6.21	2.91
Total	1.39	1.90	0.51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

4.1.4 Pengangguran Usia Muda dan Pendidikan Tinggi

Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) konsisten jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia produktif 25-59 tahun maupun kelompok usia 60 tahun ke atas. TPT usia 15-24 tahun berada pada kisaran 16–17 persen sepanjang 2022–2026, sementara TPT kelompok 25-59 tahun hanya sekitar 3-4 persen. Tingginya pengangguran usia muda menunjukkan kesenjangan antara pasokan tenaga kerja muda dan kebutuhan pasar kerja. Kelompok ini umumnya sedang berada pada fase transisi dari pendidikan menuju pekerjaan, sehingga menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengalaman kerja, ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*), serta persaingan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan formal. Kondisi tersebut

membuat proses masuk ke pasar kerja menjadi lebih panjang dibandingkan kelompok usia yang sudah memiliki pengalaman kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mempercepat transisi pemuda dari pendidikan ke pekerjaan dan meningkatkan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.

Kondisi tersebut membuat proses masuk ke pasar kerja menjadi lebih panjang dibandingkan kelompok usia yang sudah memiliki pengalaman kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mempercepat transisi pemuda dari pendidikan ke pekerjaan dan meningkatkan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Tingginya TPT usia 15-24 tahun menjadi salah satu indikator penting adanya persoalan *school-to-work transition*.

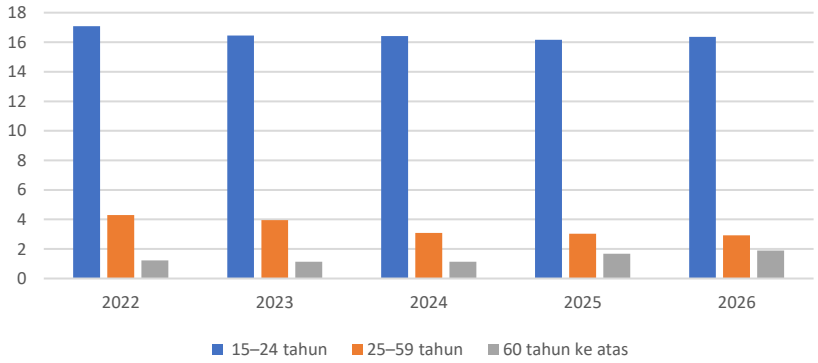

Gambar 38. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Usia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

Menurut tingkat pendidikan, tingginya TPT lulusan SMK menunjukkan bahwa pendidikan vokasi belum sepenuhnya terhubung dengan penciptaan pekerjaan yang sesuai. Meskipun menurun dari sekitar 10 persen pada 2022 menjadi kurang dari 8 persen pada 2026, TPT SMK tetap tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Namun, kondisi ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa kompetensi lulusannya rendah; terbatasnya lowongan, ketidaksesuaian lokasi pekerjaan, serta lemahnya permintaan industri juga perlu diperiksa. Evaluasi SMK harus menjangkau kesesuaian program keahlian, mutu praktik kerja, dan efektivitas kemitraan industri dalam menghasilkan penempatan kerja yang berkelanjutan.

TPT pendidikan tinggi yang masih berkisar 5–6 persen memperlihatkan bahwa peningkatan pendidikan belum selalu diikuti perluasan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersebut. Sebaliknya, rendahnya TPT lulusan SD tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan yang lebih baik karena dapat berkaitan dengan keterpaksaan menerima pekerjaan berproduktivitas dan berupah rendah. Persoalannya mencakup kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan berkualitas

sekaligus kemampuan pendidikan menyiapkan kompetensi yang relevan. Karena itu, keberhasilan kebijakan perlu diukur melalui kesesuaian pekerjaan dengan pendidikan, lama pencarian kerja, upah awal, dan keberlanjutan hubungan kerja, bukan hanya penurunan TPT.

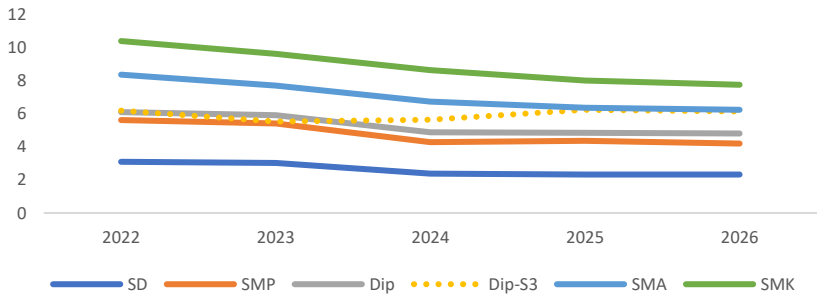

Gambar 39. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

4.1.5 Produktivitas Tenaga Kerja Tumbuh Lambat

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja masih terbatas. Secara total, produktivitas meningkat 10,26 persen pada 2022, kemudian melambat menjadi 1,52 persen pada 2023 dan terkontraksi 1,41 persen pada 2024 sedangkan pada 2025 tumbuh 3,82 persen. Secara lapangan usaha, pertumbuhan produktivitas sektor-sektor padat karya rendah. Rendahnya produktivitas pada sektor pertanian sangat berkaitan dengan teknologi yang masih usang sehingga nilai tambah produk terbatas. Hal ini mengonfirmasi masalah struktural yang dihadapi sektor pertanian.

Tabel 22. Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha

	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.89	-0.62	-2.57	4.08
Pertambangan dan Penggalian	-1.76	-2.19	0.65	-0.66
Industri	2.32	3.67	0.98	3.74
Konstruksi	3.16	-3.88	2.43	4.74
Perdagangan Besar dan Eceran	17.81	12.42	5.58	8.30
Transportasi dan Penyimpanan	4.82	3.93	7.68	6.11
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-0.15	0.81	-1.70	7.35
Aktivitas Real Estat	-12.98	1.48	-7.10	19.79
Total	10.26	1.52	-1.41	3.82

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

4.2 Kemiskinan

Perkembangan indikator kemiskinan merupakan bagian penting untuk mengevaluasi pencapaian Kabinet Merah Putih. RPJMN 2025-2029 menetapkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen pada 2029 dimana *baseline* 2024 sebesar 9,03 persen. Tahun 2025, tingkat kemiskinan ditargetkan 7-8 persen dan gagal dicapai. Pada tahun tersebut, tingkat kemiskinan masih di atas 8 persen pada September. Tahun 2026, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen dan kembali gagal dicapai. Maret 2026, tingkat kemiskinan 8,07 persen.

Tabel 23. Target dan Data Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan	Target 2025	Target 2026	Realisasi			Keterangan
			2025		2026	
			Mar	Sep	Mar	
	7,0% – 8,0%	6,5% – 7,5%	8.5	8.3	8.07	Tidak Tercapai

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menunjukkan angka penurunan, tetapi belum mencapai target pemerintah. Pada 2025, target kemiskinan ditetapkan 7-8 persen, sedangkan realisasinya berada di angka 8,5 persen pada Maret dan 8,3 persen pada September. Angka tersebut berada 0,5 persen (Maret) dan 0,3 persen (September) di atas batas atas target. Pada 2026, target diperketat menjadi 6,5-7,5 persen, namun realisasi Maret 2026 sebesar 8,07 persen masih 0,57 persen di atas batas atas target. Artinya, target kemiskinan gagal dicapai selama dua tahun berturut-turut.

Penurunan kemiskinan berjalan lambat. Dari Maret 2025 ke September 2025, kemiskinan hanya turun 0,2 persen, dan dari September 2025 ke Maret 2026 turun 0,23 persen. Secara keseluruhan, penurunan dalam setahun hanya 0,43 persen, sementara dari *baseline* 2024 (9,03 persen) kemiskinan baru turun 0,96 persen. Kecepatan ini jauh dari yang dibutuhkan untuk mencapai target RPJMN 2029 sebesar 4,5-5 persen, sehingga jarak antara target dan realisasi justru cenderung melebar seiring target yang semakin ketat.

4.2.1 Elastisitas Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas pertumbuhan ekonomi adalah melalui penurunan jumlah penduduk miskin. Data di bawah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menurunkan signifikan menurunkan angka kemiskinan. Bahkan, pada beberapa periode, pertumbuhan ekonomi justru menaikkan angka kemiskinan seperti yang terjadi

pada 2022. Saat itu, kenaikan harga komoditas dunia yang direspons dengan kenaikan harga bahan bakar domestik. Keputusan tersebut menyebabkan biaya hidup naik yang pada akhirnya menaikkan angka kemiskinan. Pada 2026: Feb, elastistitas pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan inelastis, sebesar 0,69 persen. Artinya, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen hanya mampu mendorong penurunan kemiskinan sekitar 0,69 persen. Dengan kata lain, peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan secara proporsional.

Secara jumlah, penurunan kemiskinan paling besar tercatat pada Maret 2018, sekitar 359 ribu jiwa per 1 persen pertumbuhan, sedangkan yang paling kecil terjadi pada September 2022, hanya sekitar 25 ribu jiwa. Rata-rata sepanjang 2016-2019 berada di kisaran 180 ribu jiwa, lalu turun menjadi sekitar 150 ribu jiwa pada 2022-2026. Pertumbuhan pascapandemi ternyata kurang efektif menurunkan kemiskinan dibanding sebelum pandemi. Pada masa Kabinet Merah Putih, hasilnya belum konsisten. Maret 2025 sempat mencatat penurunan sekitar 280 ribu jiwa per 1 persen pertumbuhan, mendekati level 2022. Namun capaian itu tidak bertahan: turun menjadi sekitar 140 ribu jiwa pada September 2025 dan sekitar 165 ribu jiwa pada Maret 2026, di bawah rata-rata 2016-2019. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen belum menghasilkan penurunan kemiskinan yang cukup besar dan stabil untuk mengejar target RPJMN 2029.

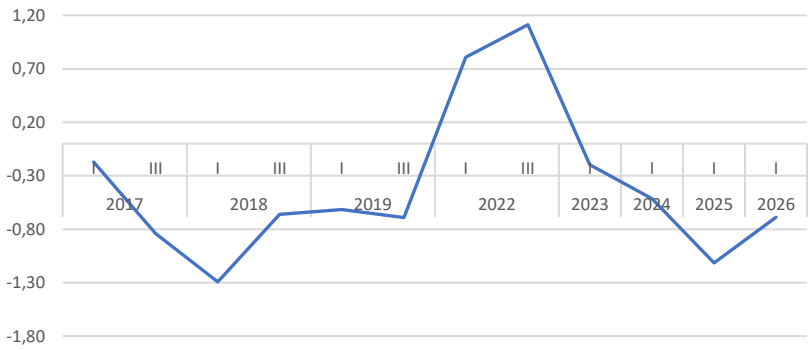

Gambar 40. Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

Pertumbuhan pascapandemi ternyata kurang efektif menurunkan kemiskinan dibanding sebelum pandemi. Pada masa Kabinet Merah Putih, hasilnya belum konsisten. Maret 2025 sempat mencatat penurunan sekitar 280 ribu jiwa per 1 persen pertumbuhan, mendekati level 2022. Namun capaian itu tidak bertahan:

turun menjadi sekitar 140 ribu jiwa pada September 2025 dan sekitar 165 ribu jiwa pada Maret 2026, di bawah rata-rata 2016-2019. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen belum menghasilkan penurunan kemiskinan yang cukup besar dan stabil untuk mengejar target RPJMN 2029.

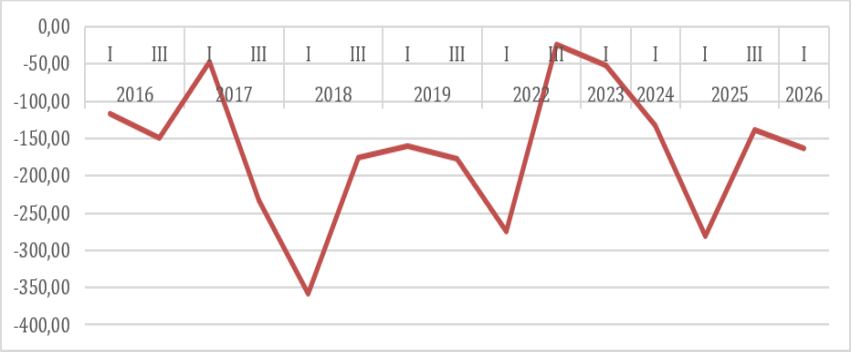

Gambar 41. Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Kemiskinan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

4.2.2 Kemiskinan Berdasarkan Desa Kota

Penurunan kemiskinan selama ini lebih banyak terjadi di perdesaan daripada di perkotaan. Di desa, nilainya hampir selalu negatif, artinya kemiskinan terus menurun, dengan rata-rata sekitar 135 ribu jiwa pada 2016-2019 dan sekitar 152 ribu jiwa pada 2025-2026. Di kota, perubahannya jauh lebih kecil dan tidak stabil, rata-rata hanya sekitar 27 ribu jiwa pada 2016-2019 dan sekitar 43 ribu jiwa pada 2025-2026. Kemiskinan perkotaan beberapa kali justru naik, seperti pada 2017 dan September 2025 (sekitar 26 ribu jiwa). Lonjakan terbesar terjadi pada 2022, ketika kemiskinan kota bertambah 365-370 ribu jiwa sehingga angka total berbalik positif (203 dan 274 ribu jiwa).

Pada masa Kabinet Merah Putih, kemiskinan menurun di kedua wilayah, tetapi belum konsisten. Maret 2025 mencatat penurunan terbesar, sekitar 281 ribu jiwa, ditopang desa (205 ribu) dan kota (76 ribu). Pada September 2025 penurunan melemah menjadi 139 ribu jiwa karena kota kembali naik, sementara desa tetap turun 165 ribu jiwa. Pada Maret 2026, penurunan total sekitar 164 ribu jiwa dengan kontribusi desa (86 ribu) dan kota (78 ribu) yang hampir seimbang. Capaian ini setara dengan rata-rata 2016-2019 (sekitar 163 ribu jiwa), sehingga belum ada percepatan penurunan kemiskinan dibanding periode sebelum pandemi.

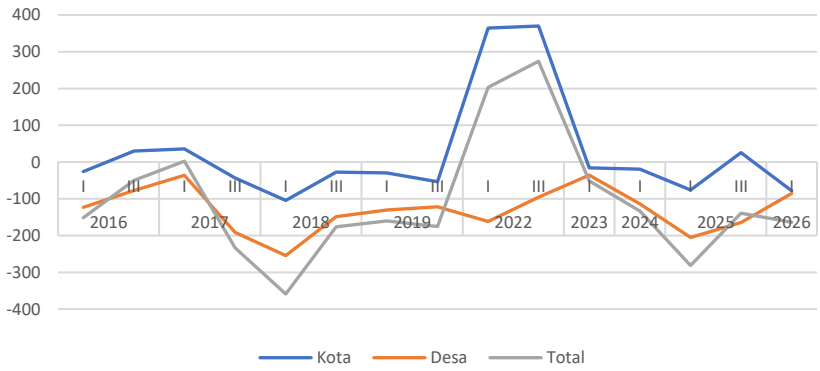

Gambar 42. Tingkat Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

4.2.3 Garis Kemiskinan Indonesia

Salah satu perdebatan yang cukup nyaring adalah garis kemiskinan di Indonesia yang berbeda dengan standar dunia. BPS menggunakan US$3,6 per kapita per hari sedangkan Bank Dunia menggunakan beberapa kategori menurut tingkat pendapatan per kapita yaitu: (i) US4,2 per kapita per hari untuk *lower-middle-income* sebesar US$4,20 per kapita per hari dan (ii) US$8,30 per kapita per hari untuk *upper-middle-income*. Dengan perbedaan garis kemiskinan tersebut, tingkat kemiskinan berbeda. Dengan menggunakan acuan USD3,6 per kapita per hari, tingkat kemiskinan 8,78 persen pada 2025 sedangkan menggunakan US$4,2 per kapita per hari tingkat kemiskinan meningkat menjadi 15,53 persen. Dengan ambang tersebut US$8,3 per kapita per hari, sekitar 64,09 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 24. Garis Kemiskinan BPS dan Bank Dunia

Garis Kemiskinan	USD	Tingkat Kemiskinan (2025) (%)
BPS	3,6	8,78
Lower-Middle-Income Poverty Line	4,20	15,53
Upper-Middle-Income Poverty Line	8,3	64,09

Sumber: BPS dan Bank Dunia, 2026, diolah

4.2.4. Persoalan Garis Kemiskinan Upah Riil

Garis kemiskinan terus naik dari tahun ke tahun, dan kenaikannya mengalami percepatan tajam pada 2026. Garis kemiskinan makanan tumbuh sekitar 4 persen pada 2021, naik hingga puncak sekitar 9 persen pada 2023, lalu melambat menjadi sekitar 4,7 persen pada 2025. Pada 2026 lajunya melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 10 persen. Garis kemiskinan non-makanan bergerak searah, dari sekitar 3,9 persen pada 2025 menjadi sekitar 9,4 persen pada 2026. Kenaikan garis kemiskinan sebesar ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bergerak naik dengan cepat, sehingga rumah tangga harus memiliki pengeluaran yang jauh lebih besar agar tidak tergolong miskin.

Sementara itu, pendapatan pekerja tidak mengikuti kenaikan tersebut. Pertumbuhan upah riil negatif pada 2023 (sekitar -6,4 persen) dan hanya sempat pulih pada 2024 (sekitar 4,4 persen), tetapi kembali negatif pada 2025 (sekitar -4,9 persen) dan 2026 (sekitar -3,0 persen). Di masa Kabinet Merah Putih, daya beli upah turun dua tahun berturut-turut pada saat garis kemiskinan justru naik semakin cepat. Selisih antara kenaikan biaya hidup minimum dan pertumbuhan upah riil melebar hingga sekitar 13 persen pada 2026. Kondisi ini menjelaskan mengapa penurunan kemiskinan berjalan lambat meskipun ekonomi tumbuh di atas 5 persen, dan menunjukkan bahwa kelompok rentan di sekitar garis kemiskinan menghadapi risiko jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.

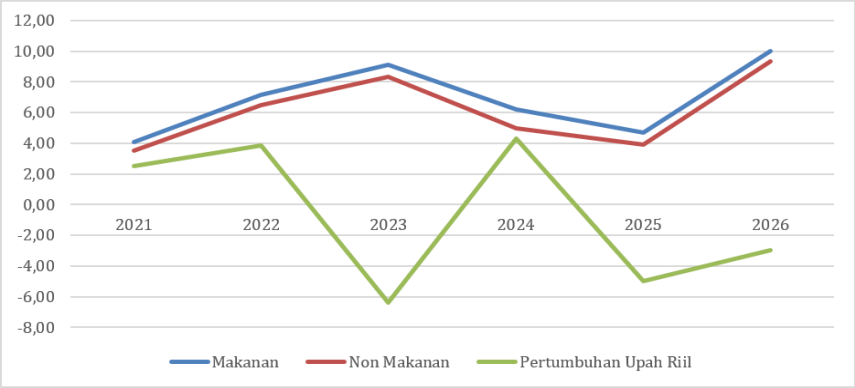

Gambar 43. Perkembangan Upah Riil dan Pertumbuhan Garis Kemiskinan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

BAB 5
AGENDA OPTIMALISASI KINERJA:
Agenda Kebijakan Optimalisasi Kinerja Ekonomi

BAB 5
AGENDA OPTIMALISASI KINERJA:
Agenda Kebijakan Optimalisasi Kinerja Ekonomi

Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa perluasan program dan mobilisasi anggaran belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan produktivitas, pekerjaan berkualitas, dan kesejahteraan yang merata. Beberapa agenda kebijakan ke depan harus diarahkan pada penguatan daya beli, stabilitas ekonomi, perbaikan tata kelola program prioritas, dan percepatan transformasi struktural. Adapun agenda kebijakan ke depan menekankan langkah korektif yang mendesak, dengan keberhasilan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan fiskal, dilihat dari beberapa aspek:

- Dari aspek **makroekonomi**, agenda yang mendesak untuk dilakukan Adalah memperkuat daya beli masyarakat secara berkelanjutan melalui penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan pendapatan, bukan ditopang oleh ketergantungan belanja yang bersifat sementara. Selain itu, pemerintah perlu menjadikan tolak ukur evaluasi keberhasilan ekonomi pada aspek yang lebih substantif seperti capaian efisiensi modal, daya serap tenaga kerja, dan pemerataan wilayah di luar Jawa sebagai indikator inti.
- Dari sisi **moneter**, perlu memperbaiki rantai pasok serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak iklim ekstrem (El Nino) pada sektor pertanian. Sementara itu dari aspek mitigasi situasi krisis, perlu penguatan sinergi KSSK untuk mencegah kekeringan likuiditas melalui penajaman koordinasi bauran kebijakan antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK guna memulihkan daya beli masyarakat, mendongkrak kembali laju Dana Pihak Ketiga (DPK) serta kredit konsumsi, dan mencegah potensi lonjakan suku bunga kredit akibat pengetatan likuiditas perbankan.
- Di sisi **fiskal**, Pemerintah perlu memastikan setiap daerah dapat mengelola anggaran transfer ke daerahnya secara lebih optimal, efisien, dan efektif. Untuk itu, harus dilakukan upaya peningkatan pengawasan dan evaluasi agar dampak pengganda (*multiplier effect*) dari APBD terhadap perekonomian daerah dapat benar-benar terealisasi, serta mendorong agar realokasi anggaran dilakukan di dalam APBD masing-masing daerah tanpa harus memangkas Transfer Ke Daerah (TKD).
- Dari kinerja **Danantara.** Danantara perlu segera mempertegas pemisahan fungsi regulator dan pengelola investasi, membuka hasil audit dan seluruh transaksi afiliasi, dan menetapkan target imbal hasil serta batas risiko yang mengikat. Restrukturisasi BUMN juga harus memperbaiki arus kas dan produktivitas, disertai aturan pembagian dividen yang menjaga kepentingan APBN. Pengawasan DSI juga harus memastikan tata niaga tidak menciptakan rente

baru. Besarnya aset kelolaan baru bermakna apabila menghasilkan tambahan investasi produktif dan manfaat bersih bagi negara.

- Dari sisi program **Program Makan Bergizi Gratis (MBG).** Perluasan MBG harus mengikuti kesiapan layanan, dengan keamanan pangan, mutu gizi, dan ketepatan sasaran sebagai syarat utama. Pemerintah perlu memperketat audit SPPG, membuka biaya per porsi dan pengadaan, serta menghentikan sementara layanan yang melanggar standar. Pengadaan lokal harus melibatkan petani dan UMKM secara kompetitif. Keberhasilan program perlu diukur dari perbaikan status gizi dan manfaat bagi keluarga rentan; pengejaran jumlah porsi tanpa pengawasan memadai justru memperbesar risiko kesehatan dan pemborosan anggaran.
- Dari sisi program **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).** Pemerintah perlu memprioritaskan kelayakan usaha dan operasionalisasi koperasi yang telah terbentuk sebelum menambah bangunan maupun utang. Pembiayaan harus didasarkan pada arus kas realistis, manajemen profesional, dan pengawasan anggota, dengan pembagian risiko yang melindungi anggaran pelayanan publik desa. Kemitraan dengan UMKM, warung, dan BUMDes harus memperluas kegiatan ekonomi lokal. Dukungan lanjutan wajib dikaitkan dengan transaksi aktif, kemampuan membayar kewajiban, dan peningkatan pendapatan anggota agar koperasi tidak menjadi aset menganggur dan beban fiskal.
- Dari sisi program **Swasembada Pangan.** Pemerintah perlu mempercepat rehabilitasi irigasi, akses input bermutu, mekanisasi, dan pengurangan kehilangan pascapanen untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan bersih petani. Pengadaan dan distribusi pangan harus mengikuti musim panen, kapasitas penyimpanan, dan kebutuhan pasar agar harga produsen terlindungi tanpa membebani konsumen. Diversifikasi produksi dan mitigasi iklim perlu diperkuat. Keberhasilan swasembada harus dinilai dari efisiensi biaya, kesejahteraan petani, dan keterjangkauan pangan karena surplus yang bergantung pada subsidi terus-menerus menyimpan kerentanan fiskal.
- Dari sisi program **Swasembada Energi.** Pengurangan ketergantungan impor perlu dipercepat melalui optimalisasi produksi yang layak, pemanfaatan gas domestik, efisiensi konsumsi, dan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah harus membenahi kepastian investasi serta jaringan distribusi, sekaligus mengevaluasi biodiesel berdasarkan penghematan bersih setelah biaya insentif, dampak pangan, dan lingkungan diperhitungkan. Subsidi perlu semakin tepat sasaran, dengan pemisahan tegas antara investasi komersial dan pelayanan publik. Kemandirian energi harus menghasilkan pasokan andal dan biaya kompetitif tanpa menciptakan ketergantungan fiskal baru.
- Dari sisi program **Hilirisasi, Industrialisasi, dan Investasi.** Insentif investasi harus segera dikaitkan dengan tambahan nilai tambah domestik, transfer teknologi, penguatan pemasok lokal, dan pekerjaan produktif. Hilirisasi perlu diperdalam menuju manufaktur lanjutan serta diperluas ke agroindustri dan

industri padat karya terampil, disertai diversifikasi investor dan penegakan standar lingkungan. Dukungan bagi proyek yang gagal memenuhi komitmen manfaat harus dievaluasi dan disesuaikan. Investasi besar dengan keterkaitan domestik yang lemah hanya berpotensi memperbesar akumulasi modal tanpa memperkuat struktur industri secara memadai.

- Dari sisi kinerja **Infrastruktur.** Pemerintah perlu melindungi anggaran pemeliharaan jalan, irigasi, dan konektivitas sentra produksi untuk menekan biaya logistik serta mencegah kerusakan aset semakin mahal ditangani. Penyesuaian anggaran harus menjaga kemampuan daerah membiayai infrastruktur dasar, sementara proyek baru wajib diuji berdasarkan kebutuhan, pemanfaatan, dan biaya pemeliharaannya. Integrasi transportasi, listrik, pergudangan, dan jaringan digital harus memperluas akses pasar. Ukuran keberhasilan adalah penurunan biaya distribusi dan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
- Dari sisi kinerja **SDM dan Pendidikan.** Anggaran pendidikan perlu diprioritaskan untuk pemerataan kualitas guru, dimana penguatan literasi dan numerasi, dan perbaikan sarana dasar sekolah. Pengembangan sekolah unggul harus disertai peningkatan mutu sekolah secara luas agar kesenjangan tidak melebar. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi perlu dihubungkan dengan kebutuhan industri melalui kurikulum adaptif, magang bermutu, dan riset terapan. Evaluasi harus menilai hasil belajar, kesesuaian pekerjaan, serta perkembangan upah lulusan, dengan penciptaan pekerjaan produktif sebagai pasangan utama investasi pendidikan.
- Dari capaian **Lapangan kerja.** Pemerintah perlu mengarahkan insentif investasi pada penciptaan pekerjaan formal, peningkatan upah riil, dan produktivitas, dengan mengevaluasi fasilitas yang minim penyerapan tenaga kerja. Prioritas mendesak ialah memperkuat industri padat karya dan pemasok lokal, menghapus pungutan ilegal terhadap usaha kecil, serta memperluas perlindungan pekerja informal. Pengangguran muda perlu ditangani melalui pemagangan berbayar dan pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, dengan pembayaran program dikaitkan pada penempatan dan keberlanjutan kerja. Keberhasilan harus diukur melalui tambahan pekerjaan formal, penurunan setengah pengangguran, dan perbaikan pendapatan pekerja.
- Dari aspek **Kemiskinan dan ketimpangan.** Pemerintah perlu memperbarui data penerima bantuan secara berkala, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, serta menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan dasar dan kerentanan rumah tangga. Perlindungan harus menjangkau kelompok rentan yang berisiko kembali miskin akibat kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup. Di perdesaan, prioritasnya meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan pendapatan petani; di perkotaan, memperluas pekerjaan layak serta menekan beban perumahan dan transportasi. Anggaran perlu diarahkan untuk memperkecil kesenjangan layanan dasar antarwilayah, dengan evaluasi

mencakup kedalaman kemiskinan, distribusi manfaat belanja, dan keberlanjutan peningkatan pendapatan.

- Dari aspek **Kesehatan.** Pemerintah perlu memastikan kepesertaan jaminan kesehatan aktif benar-benar menghasilkan akses layanan, terutama bagi pekerja informal dan rumah tangga rentan. Langkah mendesak mencakup pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan pemeriksaan dasar di puskesmas, serta pembenahan rujukan untuk mengurangi waktu tunggu dan biaya perjalanan pasien. Pembiayaan harus memperkuat pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan gizi, disertai pengawasan mutu dan pembayaran layanan. Keberhasilannya perlu diukur melalui berkurangnya kebutuhan pengobatan yang tidak terpenuhi dan beban pengeluaran kesehatan yang mengancam kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat). (2023, Agustus 1). Dampak sosial dan lingkungan akibat pertambangan nikel di Halmahera Tengah. https://www.aeer.or.id/dampak-sosial-dan-lingkungan-akibat-pertambangan-nikel-di-halmahera-tengah/

Ajaib.co.id. (2026). 50 persen dana investasi Danantara siap suntik pasar modal tahun ini. https://ajaib.co.id/belajar/berita/lima-puluh-persen-dana-investasi-danantara-siap-suntik-pasar-modal-tahun-ini

ANTARA News. (2026, 8 Januari). Anggaran MBG 2025 terserap 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun.

ANTARA News. (2026, 9 Oktober). Menkeu: Realisasi anggaran MBG capai Rp153,2 triliun hingga September [Video]. https://www.antaranews.com/video/5779152/menkeu-realisasi-anggaran-mbg-capai-rp1532-triliun-hingga-september

ANTARA News. (2026, 9 Oktober). Realisasi anggaran MBG capai Rp153,2 triliun hingga September 2026. https://www.antaranews.com/berita/5778061/realisasi-anggaran-mbg-capai-rp1532-triliun-hingga-september-2026

Antaranews.com. (2023, Juli). Menlu Retno: Banding nikel Indonesia di WTO sudah sesuai aturan. https://makassar.antaranews.com/berita/492156/menlu-retno-banding-nikel-indonesia-di-wto-sudah-sesuai-aturan

Asian Development Bank. (2026, September). Indonesia Economy. https://www.adb.org/id/where-we-work/indonesia/economy

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2026, September-Oktober). *Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: www.bps.go.id

Badan Gizi Nasional. (2026, 1 Oktober). BGN terapkan skema insentif SPPG Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-terapkan-skema-insentif-sppg-rp2000-per-porsi-mulai-5-oktober

Badan Gizi Nasional. (2026, 17 September). Program MBG serap anggaran 63,89 persen per September 2026 [Siaran pers Nomor SIPERS-321/BGN/09/2026]. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/program-mbg-serap-anggaran-6389-persen-per-september-2026

Badan Gizi Nasional. (2026, 24 September). BGN pastikan penanganan penerima manfaat dan investigasi kejadian di Batang berjalan. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-pastikan-penanganan-penerima-manfaat-dan-investigasi-kejadian-di-batang-berjalan

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2026, September-Oktober). Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2016, 5 Februari). Ekonomi Indonesia triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2016/02/05/1267/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2015-tumbuh-5-04-persen-tertinggi-selama-tahun-2015.html

Badan Pusat Statistik. (2019, 6 Februari). Ekonomi Indonesia 2018 tumbuh 5,17 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2020, 5 Februari). Ekonomi Indonesia 2019 tumbuh 5,02 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2021, 5 Februari). Ekonomi Indonesia 2020 turun sebesar 2,07 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen

Badan Pusat Statistik. (2022, 7 Februari). Ekonomi Indonesia triwulan IV 2021 tumbuh 5,02 persen dan ekonomi Indonesia 2021 tumbuh 3,69 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html

Badan Pusat Statistik. (2023a, 6 Februari). Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2023b, 6 November). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,32 persen dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,18 juta per bulan. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002

Badan Pusat Statistik. (2024a, 5 Februari). Ekonomi Indonesia triwulan IV 2023 tumbuh 5,04 persen dan ekonomi Indonesia 2023 tumbuh 5,05 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html

Badan Pusat Statistik. (2024b, 5 November). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,91 persen dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,27 juta per bulan. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html

Badan Pusat Statistik. (2025a, 5 Februari). Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/economic-growth.html

Badan Pusat Statistik. (2025b, 5 November). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,85 persen dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,33 juta per bulan. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-85-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html

Badan Pusat Statistik. (2026a, 5 Februari). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2026b, 5 Mei). Ekonomi Indonesia triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2575/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2026-tumbuh-5-61-persen--y-on-y-.html

Badan Pusat Statistik. (2026c, 5 Agustus). Ekonomi Indonesia triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2605/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2026-tumbuh-5-29-persen--y-on-y-.html

Badan Pusat Statistik. (2026d, 5 Agustus). Seri 2010 sumber pertumbuhan PDB triwulanan menurut pengeluaran. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEyOSMy/-seri-2010--7--sumber-pertumbuhan-y-on-y-pdb-triwulanan-menurut-pengeluaran.html

Badan Pusat Statistik. (2026e, 5 Agustus). Seri 2010 sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTU0IzI%3D/-seri-2010--sumber-pertumbuhan-pdb-menurut-lapangan-usaha-seri-2010.html

Bela Rakyat. (2026, Mei 18). Investasi China di Indonesia menguat, Bamsoet ingatkan risiko ketergantungan industri asing. https://belarakyat.com/investasi-china-di-indonesia-menguat-bamsoet-ingatkan-risiko-ketergantungan-industri-asing/

CERAH (Yayasan Indonesia Cerah). (2025, September 29). Nikel untuk dunia, polusi untuk rakyat. https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/nikel-untuk-dunia-polusi-untuk-rakyat

CNBC Indonesia. (2023, Agustus 18). Banyak pabrik nikel RI dibangun investor China,https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818143716-4-464117/banyak-pabrik-nikel-ri-dibangun-investor-china-ini-alasannya

CNBC Indonesia. (2023, September 3). Kronologi RI kalah di WTO, Jokowi tegas pasang badan. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230903164201-4-468627/kronologi-ri-kalah-di-wto-jokowi-tegas-pasang-badan

detikFinance. (2023, Juli 14). RI banding ke WTO soal larangan ekspor nikel, Uni Eropa tak terima! https://finance.detik.com/energi/d-6821831/ri-banding-ke-wto-soal-larangan-ekspor-nikel-uni-eropa-tak-terima

East Asia Forum. (2026, Agustus 27). Indonesia's sovereign wealth fund faces an impossible trinity. https://eastasiaforum.org/2026/08/27/indonesias-sovereign-wealth-fund-faces-an-impossible-trinity/

FinancialReview.id. (2026). Danantara dan ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi global. https://www.financialreview.id/review/63414666913/danantara-dan-ambisi-menjadikan-indonesia-sebagai-pusat-investasi-global

Green Network Asia. (2026, Januari 12). Eksploitasi pekerja dan kecelakaan mematikan: Alarm bahaya di tengah ambisi hilirisasi nikel. https://greennetwork.id/opini/eksploitasi-pekerja-dan-kecelakaan-mematikan-alarm-bahaya-di-tengah-ambisi-hilirisasi-nikel/

INDEF (Institute for Development of Economics and Finance). (2025, Maret 1). Mustahil tumbuh 8% tanpa industri yang kuat. https://indef.or.id/mustahil-tumbuh-8-tanpa-industri-yang-kuat/

International Monetary Fund. (2026, Juli). World Economic Outlook Update. https://www.imf.org/en/countries/idn

Katadata.co.id. (2026, Juni 19). Menavigasi ulang hilirisasi, membenahi tata kelola nikel Indonesia. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6a33df4f32e8a/menavigasi-ulang-hilirisasi-membenahi-tata-kelola-nikel-indonesia

Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM Republik Indonesia. (Juli, 2026). Capaian Realisasi Investasi Periode Triwulan II (April – Juni) Dan Semester I (Januari-Juni) Tahun 2026. Jakarta: Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM Republik Indonesia.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025, Juli). Ditopang hilirisasi, investasi di Indonesia semester I 2025 tembus Rp942,9 triliun. https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/ditopang-hilirisasi-investasi-di-indonesia-semester-i-2025-tembus-rp942-9-triliun

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025, Oktober). Realisasi investasi triwulan III 2025 tembus Rp491,4 triliun: Hilirisasi dan PMDN jadi penggerak utama. https://bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-triwulan-iii-2025-tembus-rp491-4-triliun-hilirisasi-dan-pmdn-jadi-penggerak-utama.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, Januari 15). Realisasi investasi 2025 lampaui target, hilirisasi melompat 43,3 persen. https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-2025-lampaui-target-hilirisasi-melompat-43-3-persen

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2026). Satudata Kemnaker: Portal Data Ketenagakerjaan RI. https://satudata.kemnaker.go.id/

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN Kita Agustus 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2026). *Lampiran Pidato Presiden Dalam Rangka Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2027*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM Republik Indonesia. (Juli, 2026). *Capaian Realisasi Investasi Periode Triwulan II (April – Juni) Dan Semester I (Januari-Juni) Tahun 2026*. Jakarta: Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM Republik Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah 2026*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, September-Oktober). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: www.kemenkeu.go.id.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Informasi APBN Tahun Anggaran 2025. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 6 Oktober). APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-2026-tujuan-dan-arah-kebijakan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). APBN Kita Agustus 2026. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2027. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, September-Oktober). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: www.kemenkeu.go.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2026). Lampiran Pidato Presiden Dalam Rangka Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2025). Rencana Kerja Pemerintah 2026. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kompas.id. (2025, April 6). Bisakah hilirisasi nikel tak bergantung pada satu negara? https://www.kompas.id/artikel/hilirisasi-nikel-masih-bergantung-pada-china

Kompas.id. (2025, Juni 8). Nikel Indonesia dalam tekanan perdagangan global dan pencemaran lingkungan. https://www.kompas.id/artikel/nikel-indonesia-dalam-tekanan-perdagangan-global-dan-isu-lingkungan/amp

Kompas.id. (2025, Juni). OECD: Percepatan realisasi investasi Danantara bisa dorong pertumbuhan ekonomi 2025. https://www.kompas.id/artikel/oecd-percepatan-belanja-investasi-lewat-danantara-jadi-kunci-stabilitas-ekonomi-2025

Konstruksimedia.com. (2025). 44 kawasan industri masuk proyek strategis nasional 2025, berikut daftarnya. https://konstruksimedia.com/44-kawasan-industri-masuk-proyek-strategis-nasional-2025-berikut-daftarnya/

LBS.id. (2025). Prabowo resmikan Danantara, siap kelola investasi Rp14.710 triliun. https://www.lbs.id/publication/berita/prabowo-resmikan-danantara-siap-kelola-investasi-rp14-710-triliun

Lestari Kompas.com. (2026, Mei 7). Hilirisasi nikel disebut belum dorong penguatan SDM dan industri lokal. https://lestari.kompas.com/read/2026/05/07/084200886/hilirisasi-nikel-disebut-belum-dorong-penguatan-sdm-dan-industri-lokal

Media Indonesia. (2025, Januari 23). Hilirisasi nikel harus libatkan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. https://mediaindonesia.com/ekonomi/737362/hilirisasi-nikel-harus-libatkan-pelestarian-lingkungan-dan-keadilan-sosial

Media Indonesia. (2025, Maret 1). Mustahil pertumbuhan ekonomi 8 persen kalau deindustrialisasi. https://mediaindonesia.com/ekonomi/748079/mustahil-pertumbuhan-ekonomi-8-persen-kalau-deindustrialisasi

Media Indonesia. (2026). Investasi tumbuh, Danantara perkuat dampak ekonomi nasional secara terukur. https://mediaindonesia.com/ekonomi/926153/investasi-tumbuh-danantara-perkuat-dampak-ekonomi-nasional-secara-terukur

Medium - Qeishi. (2026, Januari 7). Sovereign "Walah" Fund: Perbandingan tata kelola Danantara dan Temasek Holdings. https://medium.com/@qeishi/sovereign-walah-fund-1672fce6f24b

Nikel.co.id. (2026, April 1). Investasi China US$65 miliar dorong hilirisasi nikel, tapi tekanan lingkungan menguat. https://nikel.co.id/2026/04/01/investasi-china-us65-miliar-dorong-hilirisasi-nikel-tapi-tekanan-lingkungan-menguat/

OECD. (2026, 23 September). OECD Economic Outlook Interim Report September 2026. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-interim-report-september-2026_f751d02b-en/full-report.html

Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Banten. (2026). Menu MBG didominasi produk UPF, Ombudsman RI Perwakilan Banten minta program MBG di Banten dievaluasi [Kliping media]. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--menu-mbg-didominasi-produk-upf-ombudsman-ri-perwakilan-banten-minta-program-mbg-di-banten-dievaluasi

Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). Ombudsman DIY minta sekolah di Sleman tolak tanda tangan perjanjian rahasiakan keracunan MBG [Kliping media]. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-diy-minta-sekolah-di-sleman-tolak-tanda-tangan-perjanjian-rahasiakan-keracunan-mbg

Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2026, 9 September). Ombudsman RI temukan sejumlah persoalan MBG di KBB, dorong sanksi tegas [Siaran pers Nomor 057/HM.02.07/IX/2026; dipublikasikan 10 September 2026]. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--ombudsman-ri-temukan-sejumlah-persoalan-mbg-di-kbb-dorong-sanksi-tegas

Ombudsman Republik Indonesia. (2025, 30 September). Ombudsman RI temukan empat potensi maladministrasi dalam program Makan Bergizi Gratis [Siaran pers Nomor 52/HM.01/IX/2025]. Tautan.

Project Multatuli. (2025, Juli 9). Cina di hilir: Gurita oligarki nikel Indonesia. https://projectmultatuli.org/cina-di-hilir-gurita-oligarki-nikel-indonesia/

Pusaka Indonesia Gemahripah. (2025, Juni 10). Masalah lingkungan dan kesehatan di balik hilirisasi nikel. https://pusakaindonesia.id/opini/masalah-lingkungan-dan-kesehatan-di-balik-hilirisasi-nikel/

Readers.id. (2026, Maret 31). Target ekonomi 8 persen Prabowo hadapi tantangan defisit pertumbuhan. https://www.readers.id/target-ekonomi-prabowo-tantangan-defisit-pertumbuhan

Republika Online. (2026, September 3). INDEF soroti jarak lebar target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan realisasi. https://ekonomi.republika.co.id/berita/tkryb5423/indef-soroti-jarak-lebar-target-pertumbuhan-ekonomi-8-persen-dan-realisasi

SUAR.id. (2026, Juni 7). Dominasi nikel Indonesia di tengah arus diversifikasi investasi China. https://www.suar.id/dominasi-nikel-indonesia-di-tengah-arus-diversifikasi-investasi-china/

Tempo.co. (2025, Agustus 17). Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12 persen tapi banyak PHK. Ada yang salah? https://www.tempo.co/ekonomi/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-5-12-persen-tapi-banyak-phk-ada-yang-salah-2060055

World Bank. (2026, Juni). Indonesia Economic Prospects: Managing Risks, Unlocking Productivity. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect

Dua tahun berjalan, pemerintahan Prabowo belum mampu mengubah besarnya mobilisasi sumber daya menjadi percepatan transformasi ekonomi. Pertumbuhan semester I 2026 yang tercatat 5,45% masih menyisakan jarak yang lebar dari sasaran 8%, sementara tekanan nilai tukar dan kenaikan harga tak kunjung mereda. Investasi yang terus didorong belum terhubung dengan produktivitas, pekerjaan berkualitas, dan kesejahteraan, sehingga program prioritas berisiko memperbesar beban tanpa hasil yang sepadan.

Dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo, INDEF menerbitkan buku Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo yang mengupas berbagai aspek ekonomi mulai dari pertumbuhan, stabilitas moneter dan fiskal, program prioritas (MBG, KDMP, Danantara, swasembada pangan dan energi), hilirisasi, infrastruktur, hingga SDM, ketenagakerjaan, dan kemiskinan.

Temuan utama dalam buku ini adalah masih lemahnya kualitas pertumbuhan yang melambat dari 5,61% pada triwulan I menjadi 5,29% pada triwulan II 2026. Elastisitas kesempatan kerja turun dari 0,68 menjadi 0,26, sementara ICOR yang bertahan di level 6,24 tetap membutuhkan modal yang cukup besar untuk melahirkan pertumbuhan. Investasi hilirisasi naik menjadi Rp300,1 triliun pada semester I 2026, tetapi pangsa industri pengolahan justru turun dari 18,95% menjadi 18,77% terhadap PDB.

Dengan kata lain, tambahan modal belum memperluas basis produksi. Stabilitas ekonomi menghadapi tekanan bersamaan. Kurs melemah dari Rp15.732 menjadi Rp18.046 per dolar AS, dan inflasi naik dari 1,71% menjadi 3,28%. Kredit investasi tumbuh 25,13%, sedangkan kredit konsumsi hanya 5,38%, sehingga pemulihan permintaan rumah tangga belum merata. Di daerah, belanja turun sekitar Rp150 triliun (10%) dan belanja modal anjlok 42,10%, yang berisiko mengorbankan aset produktif. Kesejahteraan belum menguat secepat angka makro. Tambahan penduduk bekerja turun dari 3,59 juta menjadi 1,90 juta orang, dan 61% di antaranya pekerja informal. Porsi pekerja tidak penuh naik menjadi 33,2%. Kemiskinan turun menjadi 8,07% (Maret 2026), tetapi masih 0,57 poin di atas batas atas target 7,50% dan Program prioritas perlu diukur dari hasil, bukan skala. MBG, KDMP, dan Danantara harus dikoreksi sebelum menjadi beban fiskal permanen.

Berkontemplasi dengan kondisi tersebut, INDEF merekomendasikan beberapa langkah yang penting untuk didengar dan dijalankan pemerintah sesegera mungkin untuk memulihkan daya beli melalui penciptaan pekerjaan layak, memperkuat koordinasi stabilitas moneter dan keuangan, melindungi belanja produktif daerah, terutama belanja modal dan pemeliharaan aset, mengikat insentif hilirisasi pada pendalaman rantai produksi, transfer teknologi, dan kepatuhan lingkungan dan menetapkan indikator hasil, tenggat, penanggung jawab (PIC), dan evaluasi terbuka yang menentukan kelanjutan pendanaan setiap program

INDEF
Jl. Baru Merah No.45
Pejaten Timur
www.indef.or.id